

**Seminar Sejarah Lokal
Topik I**

STRATIFIKASI SOSIAL DAN POLA

KEPEMIMPINAN LOKAL



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL
SEMINAR SEJARAH LOKAL**

1982

VIII.12

rat
n

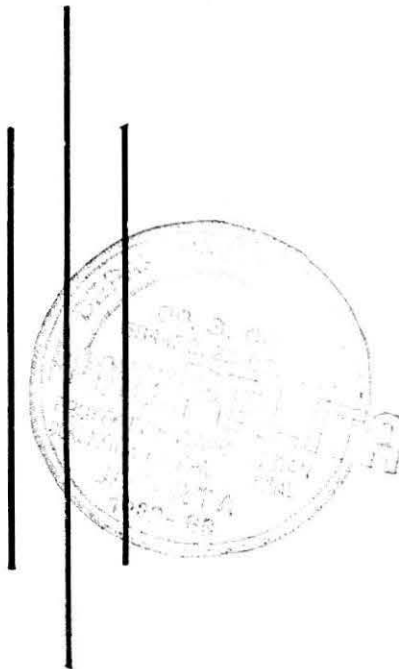
905 DEP s

Seminar Sejarah Lokal

Topik I

STRATIFIKASI SOSIAL DAN POLA

KEPEMIMPINAN LOKAL



DAFTAR ISI

1. Tuan Bek dan Inlandsche Komendant Batavia
oleh : Mona Lohanda
2. Stratifikasi Sosial dan Pola Kepimpinan Lokal
di Sumatera Barat.
oleh : Mardanas Safwan
3. Kerajaan Ternate dan Tidore di abad ke XIV
oleh : Frans Hitipeuw
4. Kepemimpinan dalam struktur Masyarakat Lio di
Nusa Tenggara Timur
oleh : Munanjar Widyatmika
5. Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinan Lokal
di Surakarta.
oleh : Suyatno
6. Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinan di Daerah
Surabaya ; Suatu studi perbandingan antara masa se-
belum dan sesudah Pertengahan abad ke 18
oleh F. A. Sutjipto
7. Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinannya
(Beberapa Catatan Masalahnya di Bali)
oleh ; I Gusti Ngurah Bagus
8. Stratifikasi Sosial dan Kepemimpinan
oleh ; Onghokham.

OLEH : MONA LOHAUDA .
ARSIP NASIONAL

I

Menemukan sisi Betawi yang "indigenous " ternyata amat sulit, tersebut oleh masalah kelangkaan sumber yang " indigenous " itu sendiri. Kalaupun menjumpai fakta yang kelihatannya " indigenous ", itu pun diperlukan sikap amat berhati-hati mengingat pencipta fakta adalah juga dari sumber kolonial Belanda. Ditambah dengan praduga tentang miskinnya sumber tulisan di kalangan pendukung etnis Betawi, belum lagi dengan mencoba menyimak secara empiris asal-muasal kelahiran etnis Betawi, menguatkan dugaan akan kelangkaan yang nyaris memperlihatkan ketiadaan sumber " indigenous " Betawi.

Namun demikian, tumpuan masih dapat disandarkan kepada adanya sumber-sumber pemerintah kolonial --- yang walaupun bukan tanpa kritik ----, agar sedikit-tidaknya gambaran tentang suatu kelompok etnis hibrid Betawi masih dapat kita peroleh menurut alur historis.

Ciri pokok yang tidak bisa ditanggalkan dalam membicarakan etnis Betawi adalah unsur hibrid yang menjadikannya nasib sendiri. Sebagaimana orang tidak lagi bisa secara mutlak menentukan kapan mulai terbentuknya masyarakat-masyarakat lama (old societies), maka masyarakat Betawi yang lebih muda usianya dibanding dengan etnis Jawa, Bugis, Melayu dan lain-lain juga sulit ditentukan secara pasti kapan mulai munculnya. Apalagi dengan mengingat pembentukan masyarakat macam apapun menempuh suatu cara prosedural yang amat lama (long durée).

Untuk konteks Betawi proses pembentukan tersebut menjadi agak jelas dengan adanya pengaruh-pengaruh pendudukan VOC di permulaan abad ke tujuh-belas. Sudah barang tentu di abad-abad sebelumnya Sunda Kalapa sebagai kota bandar di pantai utara Jawa Barat mengalami arus keluar masuk unsur yang datang dan pergi, kelompok-kelompok yang hanya singgah ataupun yang menjadi pen tetap. Dari sebuah deskripsi tahun 1622 diperoleh gambaran akan adanya suatu kehidupan yang memberi ciri kemajemukan yang khas , " Tidak ada hal yang lebih mempesonakan ataupun pemandangan yang lebih menarik daripada

menyaksikan sejumlah besar berbagai bangsa yang hidup di suatu kota besar. Tiap-tiap bangsa tinggal di perkampungan masing-masing, menjalankan cara hidup sendiri-sendiri. Pada setiap sa'at orang menyaksikan ada tata-cara yang baru, tingkah laku yang khas, beraneka-ragam kebiasaan, wajah dengan warna kulit yang berbeda-beda --- hitam, putih, sawomatang dan kuning ----. Setiap orang hidup di mana ia suka, setiap orang berbicara dalam bahasa nya sendiri-sendiri. Meskipun ada keaneka-ragaman adat tata-cara yang kadang-kadang kontras satu sama lain, seseorang dapat mengamati adanya suatu perpaduan yang menakjubkan di antara para penduduknya; ini semata-mata disebabkan oleh perdagangan yang merupakan jiwa yang umum dimiliki para penduduk, sehingga mereka bergerak sejalan dan harmonis di dalam segala hal, hidup tenang dan berbahagia di masa itu ". (John Crawford, A Descriptive Dictionary of the Indian Island and Adjacent Countries . Kuala Lumpur, 1971.)

Dari catatan ini sedikit banyak ditunjukkan bahwa ada berbagai kelompok etnis yang mendiami Batavia yang menjalankan corak kehidupan sendiri-sendiri entah itu pendatang bangsa Eropah, pendatang sesama pribumi Indonesia, orang-orang Cina dan Timur Asing lainnya.

Konfigurasi penduduk Batavia memang cukup menarik untuk disimak. Dari Laporan Tahunan yang sifatnya administratif (Algemeen Verslag atau Administratief jaarlijksch Verslag) yang dibuat residen Batavia, penduduk wilayah pemerintahannya terurai dalam kelompok-kelompok : Europeanen, Chinezen, Arabieren, Mooren en Bengalezen, Inlanders.

Sebaliknya dalam Laporan Politik (Politieke Verslag) yang juga dikeluarkan setiap tahun, uraian tentang penduduk tersebut dalam kelompok : Europeanen (dalam mana termasuk Nederlanders en Andere Vreemdelingen yang bukan bangsa Belanda), Kreolen, Mestiezen, Chinezen en Andere Vreemde Oosterlingen, en Inlanders.

Pada dasarnya perbedaan pengelompokkan ini terletak dalam kategori jumlah (untuk Algemeen Verslag), sementara dalam laporan politik yang dilihat adalah secara kelompok kesatuan tanpa memperhatikan jumlahnya. Jadi misalnya dalam sebuah Laporan Umum, jumlah penduduk Batavia pada

akhir Desember 1859, adalah :

Europeanen	:	4504	jiwa
Chinezen	:	44.265	jiwa
Arabieren	:	513	jiwa
Mooren en Bengalezen	:	298	jiwa
Inlanders	:	408.202	jiwa

jumlah 457.782 jiwa.

Uraian lebih terperinci pada catatan sensus penduduk Batavia di tahun 1855 menjabarkan sebagai berikut :

I. Eropa dan kelompok yang sejenis/dipersamakan :

- a. Belanda (kulit putih) yang lahir di Nederland atau di luar
Hindia-Belanda : 571 jiwa
- b. Belanda (kulit putih) yang lahir di Hindia Belanda
: 1141 jiwa
- c. Asing (kulit putih) yang lahir di luar Hindia - Belanda
: 269 jiwa
- d. Asing (kulit putih) yang lahir di Hindia-Belanda
: 65 jiwa
- e. Mestizo dan kulit berwarna lainnya : 2099 jiwa

Jumlah : 4.145 jiwa.

II. Pribumi dan kelompok yang dipersamakan

- a. Cina : 41.137 jiwa
- b. Arab dan Timur Asing
lainnya : 943 jiwa
- c. Bumiputera : 348.504 jiwa

Jumlah : 394.729 jiwa .

Secara lebih terperinci lagi, catatan ini meliputi keterangan tentang jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tanah pemerintah (Gouvernements-landen), yang berdiam di wilayah tanah partikelir, terbagi lagi atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak.

Laporan Politik dipihak lain, lebih menunjukkan seberapa jauh sikap masing-masing kelompok terhadap kebijaksanaan pemerintah kolonial secara umum, kecenderungan - kecenderungan yang ada dalam kelompok, hubungan antara pimpinan kelompok dengan anggota warga etnis kelompok.

Dari konfigurasi yang terlihat di atas, maka lalu timbul pertanyaan siapakan yang dimaksud dengan " Inlanders " itu ?

Data dari Laporan Umum tidak lah menunjukkan penjelasan lebih lanjut tentang siapa-siapa yang termasuk sebagai kelompok " Inlanders " itu, demikian pula halnya dengan uraian dalam Laporan Politik. Dan baru lah uraian tentang " Inlanders " ini dapat ditemui dengan melihat kepada jabatan-jabatan Kepala kelompok anak-negeri yang disebut " Inlandsche Kommandanten van Batavia ", seperti tersebut di bawah ini :

- " Kommandant der Balijers ",
- " Kommandant der Boegineezen en Maccassaren ",
- " Kommandant der Maleijers " ,
- " Kommandant der Boegineezen en Amboneezen ",
- " Kommandant der Soembawarezen en Mandharezen " ,
- " Kommandant der Parnakkans ",
- " Kommandant der Oostzijdsche Javanen " ,
- " Kommandant der Westzijdsche Javanen " ,

ditambah dengan : " Kapitein der Chinezen "

- " Kommandant der Papangers " ,
- " Majoor der Mooren en Bengalerezen " ,
- " Kommandant der kampong buiten de boom " .

Jabatan-jabatan tersebut baru muncul dalam catatan resmi pemerintah kolonial dari masa sesudah tahun 1820-an. Resolusi tanggal 25 September 1827 no. 2 menyebutkan bahwa Stad en Voorsteden Batavia terbagi atas 12 distrik (sebagaimana jabatan di atas) dalam mana dinyatakan

bahwa masing-masing penduduk anak negeri sebagai kelompok secara administratif sehari-hari sepenuhnya berada dalam pengaturan para " wijkmeester " masing-masing yang berada dibawah perintah para " kommandant " di masing-masing distrik. Dan bahwa kekuasaan para " kommandant " dan " wijkmeester " ini tidak berlaku untuk kelompok " Papangers, Mooren en Chineezen ", karena kelompok-kelompok tersebut memiliki pula " wijkmeester " nya sendiri. Patut pula ditambahkan, bahwa jabatan " Hoofd der Arabieren " secara resmi baru muncul di sekitar tahun 1846, di samping jabatan " Hoofd der Mooren en Bengaleezen " yang sudah ada terlebih dahulu.

Surat Keputusan 15 Maret 1828 nomor 8 menunjukkan hasil proses re-organisasi wilayah Stad en Voorsteden Batavia yang dinyatakan terbagi menjadi 5 distrik, yaitu :

- wilayah " Stad en Voorsteden "
- wilayah " Oostersche district "
- wilayah " Zuider district "
- wilayah " Zuidwester district "
- wilayah " Wester district ".

Di sekitar tahun 1830-an terjadi kembali pembagian distrik baru yaitu Batavia menjadi 7 distrik, dengan catatan bahwa distrik ke 6 diperuntukkan kelompok Cina (" Kapitein der Chinezen en als zoodanig hoofd van het zesde district "). Pembagian administratif yang ini berlangsung cukup lama, dan baru disekitar tahun 1886 dimunculkan susunan pembagian wilayah yang baru dengan 4 " afdelingen ", yaitu :

(Surat Keputusan 9 Juli 1886 no. 5C)

a. Afdeling Stad en Voorsteden :

- distrik Penjaringan
- distrik Pasar Senen
- distrik Mangga Besar
- distrik Tanah Abang
- distrik Kepulauan Seribu ;

b. Afdeling Mester Cornelis :

wilayah Meester Cornelis
wilayah Bekasi
wilayah Kebayoran
wilayah Cabangbungin ;

c. Afdeling Tangerang :

wilayah Tangerang
wilayah Mauk
wilayah Balaraja ;

d. Afdeling Buitenzorg :

wilayah Buitenzorg
wilayah Cibinong
wilayah Jasinga
wilayah Parung
wilayah Leuwiliang
wilayah Cibarusca ;

Untuk tiap-tiap distrik di afdeling Stad en Voorsteden Batavia masing-masing dikepalai oleh seorang " kommandant ", sedangkan untuk tiap-tiap wilayah di afdeling Meester Cornelis, Tangerang, dan Buitenzorg, dikepalai oleh seorang " demang ".

Pada dasawarsa pertama di abad dua puluh reorganisasi pembagian wilayah Batavia diadakan kembali yang sekaligus pula jabatan-jabatan pemuka anak negeri se tempat mulai mempergunakan nama-nama jabatan :
" regent, patih, wedana ".

II

Dalam kehidupan folklor Betawi terutama di bidang teater rakyat, ada satu posisi atau peranan yang nyaris hampir tak terpisahkan dalam gambaran masyarakat anak negeri setempat sebagaimana disebutkan di dalam repertoar-repertoarnya. Jabatan ini yang disebut sebagai " bekmester ", menurut lafal se tempat , atau " tuan bek ", yang dimaksudkan adalah " wijkmeester ", di samping tuan tanah Cina, pemilik tanah partikelir, para centeng atau jagoan dan lain-lain.

Melalui pengamatan ekspresi teater tersebut kesan akan besarnya wewenang para " wijkmeester " terlihat jelas, ini pun akan terungkap dalam aturan yang dibuat pemerintah kolonial guna mengatur pemerintahan anak negeri di Batavia. Sementara di pihak lain, pengaruh para " kommandant " tidak lah cukup kuat terasakan langsung kepada anak negeri. Bahwa ini pun dapat dilihat dari jabaran aturan kewenangan dan tugas dari " Inlandsche commandanten " tersebut.

Para " komandant " mengepalai suatu distrik, setiap distrik terbagi lagi dalam sejumlah " wijken " yang dapat diartikan semacam " kampung ". Distrik ke enam yang diperuntukkan penduduk Cina juga mengenal " wijken " dan " wijkmeesters " sendiri., demikian pula halnya dengan pengaturan bagi penduduk bangsa Eropa.

Keputusan yang memuat batasan tentang pengaturan anak negeri di Batavia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan tanggal 15 Maret 1828 nomor 3 itu, antara lain menggariskan bahwa :

- a. Pada setiap "wijk " ditempatkan seorang " Inlandsche wijkmeester " yang penunjukannya harus dengan persetujuan residen Batavia, dan yang kedudukannya berada di bawah " district commandant " ;
- * b. Di dalam suatu kampung/ wijk yang terdapat 25 keluarga Cina atau lebih , maka mereka diatur oleh " wijkmeester " nya sendiri, begitu juga halnya dengan penduduk bangsa Moor dan Bengalen yang memiliki " eigen commandant " ;

- c. Pada setiap distrik dibentuk sebuah " Districtraad " yang diketuai oleh "Inlandsche commandant " distrik setempat, para penghulu dari mesjid-mesjid yang terdapat di wilayah distrik dengan jumlah yang sama dengan para "wijkmeester" yang ada di distrik bersangkutan ;
- d. Bilamana terjadi pertikaian di kalangan anak negeri, Dewan Distrik (Districtraad) menentukan batas denda tidak melebihi f.20.-. Untuk denda di atas f.20.- yaitu antara f.21.- f. 50.- harus dimintakan persetujuan dari Landraad ;
- e. Persoalan-persoalan yang lebih luas dan besar diselesaikan dalam Dewan Distrik yang lebih besar (een Grooter District Raad) yang terdiri dari empat kommandan distrik, penghulu dari masing-masing distrik ditambah dengan " hoofdpanghoeloe " dan " hoofddjaksa " dari Landraad. Yang menjadi ketua dari Dewan distrik ini adalah " district commandant " yang menduduki jabatan terlama dalam kedudukannya sebagai " commandant " ;
- f. Districtraad tidak mengurus masalah-masalah kelompok penduduk Cina.

Batas kewenangan dan tugas pokok para " wijkmeester " atau " kamponghoofd " pada garis besarnya disebutkan, bahwa :

1. " Wijkmeester " harus menjaga ketertiban, keamanan, ketenteraman wilayahnya, mengamati keadaan kesehatan penduduk secara umum, seperti jika ada epidemi, kerja para " vaccinateur ", mengawasi pelaksanaan ordonansi dan aturan pada tingkat kampung masing-masing, mengatur jalannya pungutan-pungutan pajak, dinas kebakaran, jembatan, jalan kanal dan selokan, tempat-tempat latihan menembak ; mengawasi pelaksanaan jaga/ronda malam dari jam 8 malam hingga jam 5 pagi.
(Secara lebih terperinci dijabarkan pula sanksi-sanksi dalam pemeriksaan terhadap penduduk yang dijumpai berkeliaran tanpa membawa surat pas, yaitu jika anak negeri pribumi harus dihadapkan kepada " district commandant ", jika bangsa Eropa dibawa kepada " onder-

Schout ").

2. Setiap bulan Januari setiap tahun harus melaporkan jumlah kuda dan gerobak yang dimiliki penduduk pribumi yang tinggal diwilayahnya ;
3. Menyelidiki dan mendapatkan kembali para budak yang melarikan diri ;
4. Membuat catatan dan memberitahukan secara berkala setiap tahun semua penduduk di wilayahnya yaitu laki-laki di atas batas umur 14 tahun, pekerja bebas baik yang bekerja pada keluarga Eropah atau lainnya beserta anak isterinya ;
5. Membuat catatan kelahiran, perkawinan, kematian di kalangan penduduk pribumi dan dalam waktu 14 hari mengirimkan salinannya kepada " district commandant " ;
6. Jika seorang " wijkmeester " akan pindah rumah dari satu " wijk " ke " wijk " yang lain harus melaporkan kepada Asisten-Residen Batavia, dan mengusulkan pula pada saat yang sama seorang bawahan yang mewakili dalam menerima denda f. 10.- pada pengadilan sub-poena ;

Untuk " district commandant " antara lain ditugaskan :

1. Mengawasi pelaksanaan tugas kewajiban para " wijkmeester " di wilayah masing-masing ;
2. Melaporkan pada Asisten-Residen Stad en Voorsteden Batavia setiap pagi jam 3.00 secara in persoon segala hal kejadian di wilayahnya sebagaimana yang dilaporkan para " wijkmeester " ;
3. Mengawasi adanya pertemuan-pertemuan rahasia dan yang tidak mendapat ijin di wilayah masing-masing ;
4. Menyelenggarakan pertemuan " Districtraad " dua kali dalam seminggu pada hari Selasa dan Jumat membicarakan segala keluhan, tuntutan dan pertikaian-pertikaian yang timbul di kalangan penduduk anak negeri

di wilayahnya ;

5. Menangani persengketaan-persengketaan kecil, huru-hara atau perkela-
hian di antara anak negeri ;
6. Hal-hal yang dibicarakan di dalam " Districtraad " ataupun yang di-
selesaikan di luar " raad " harus dilaporkan tertulis dalam bahasa
Melayu yang disampaikan dalam setiap pertemuan dan salinannya dikirim-
kan kepada Residen Batavia ;
7. Mereka yang tidak puas dengan keputusan para " district commandant " ,
boleh mengajukan perkaranya kepada Residen Batavia ;
8. Papan tanda pengenal dimuka rumah dengan lambang kerajaan Belanda
bertuliskan " District Kommandant van het district " .

Para " kommandant " ini juga masih harus mengucapkan sumpah di
hadapan Residen Batavia menurut agama masing-masing dengan menyatakan
bahwa :

- " Di dalam tugas yang dipegangnya berjanji dan bersumpah untuk
tidak menerima atau/dan memberi hadiah kepada siapa pun " ,
- " Bersumpah setia kepada kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya,
dan hanya menerima perintah dari Residen, serta bersama para
bawahannya melaksanakan perintah tersebut " ,
- " Akan memperlakukan para bawahan secara adil, menurut aturan
hukum, dan tidak memihak " ,
- " Sebagai Kommandant di dalam menangani perkara tidak akan mene-
rima hadiah dari siapa pun ;
- " Mengusahakan segala daya upaya demi untuk menjaga ketenteraman
dan ketertiban " ,
- " Memenuhi kewajibannya dengan segala kesadaran, pengetahuan yang
terbaik, tidak akan menyimpang dari kewajiban dalam keadaan
apa pun, dalam susah dan senang, dengan rasa suka atau pun

tidak suka, dalam keadaan persahabatan ataupun dalam suasana permusuhan " .

Kembali kepada pengamatan ekspresi repertoar dari bentuk-bentuk teater rakyat Betawi, terlihat bahwa yang lebih dikenal penduduk adalah sang "tuan bek " ini, terutama dalam soal pemungutan pajak, surat pas, pencatatan sipil, ronda malam dan beberapa hal yang langsung berkenaan dengan pola kehidupan sehari-hari. Terlebih-lebih para " wijkmcester " yang berada di lingkungan tanah-tanah partikelir di wilayah " Ommelanden " yang sedikit jauh dari pengawasan pemerintah pusat di kota.

Pada banyak Laporan Politik Batavia dikatakan bahwa kepada para kepala anak negeri (maksudnya " Inlandsche Kommandanten " ini) diberikan jenjang kepangkatan tertentu, dimaksudkan agar di satu pihak mereka dapat menikmati hak istimewa sosial yang memang diperlukan dan di lain pihak dengan kepangkatan ^{itu} mereka dapat menjalankan pengaruhnya terhadap kelompok bangsanya . Pangkat yang diberikan kepada pemuka anak negeri ini adalah " luitenant " dan " kapitein " . Yang sudah pensiun mendapat pangkat " luitenant of kapitein titulair " . Pangkat ini tidak lagi diberikan sesudah tahun 1907, dalam waktu mana semua jenjang jabatan pangreh-praja dari Binnenlands-Bestuur diseragamkan untuk seluruh wilayah Hindia-Belanda. Sedangkan untuk jabatan pemuka anak negeri bukan pribumi seperti Cina, Moor, Bengaldan Arab, kepangkatannya adalah " luitenant " , " kapitein " dan " majoor " , yang terus dipertahankan hingga berakhirnya masa kekuasaan Hindia-Belanda di tahun 1942.

Bagi pemerintah Batavia, para " Inlandsche Kommandanten " ini tidak lah banyak mengancam suasana tertib aman kekuasaan kolonial, karena menurut penilaian mereka yang lebih perlu diamati adalah para kepala anak negeri di wilayah tanah partikelir sebab mereka ini ditunjang oleh wewenang " policioneel " , dan dibayar oleh para tuan tanah setempat. Tambahan lagi, para " kommandant " yang diangkat pemerintah Batavia atas saran Residen Batavia ini hanya memperoleh gaji antara f. 100.- -- f.150.- sehingga dikatakan pula bahwa dalam segi kesejahteraan tidak lah dapat dikatakan tingkat kemakmuran hidup para " kommandant " ini cukup tinggi.

Bahkan perlu dipikirkan perbaikan dengan menaikkan pendapatan mereka. Hanya mereka yang dalam jabatan lebih lama dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi.

Kondisi kemakmuran yang dialami para "kommandant" ini juga mewakili gambaran tingkat kehidupan anak negeri. Artinya tingkat kemakmuran secara umum tidak lah begitu begitu, sekalipun tentu ada penduduk yang berkecukupan tetapi kemiskinan juga tidak terlihat jelas. Di wilayah bagian Selatan dan Timur kota tingkat kemakmuran penduduk umumnya lebih baik dari penduduk wilayah bagian tengah kota (Stad en Voorsteden), karena kebanyakan adalah petani yang mengerjakan tanah-tanah pertanian. Di wilayah bagian Barat agak lebih rendah tingkat kemakmuran yang dimiliki penduduk, karena acapkali mereka mengalami panen yang buruk. Banyak pula di antara mereka yang pergi ke Batavia untuk bekerja sebagai kuli.

Oleh adanya banyak perbedaan dalam pengertian bahwa masing-masing kelompok penduduk di Batavia memiliki karakternya sendiri-sendiri, dapat dikatakan hubungan antara penduduk anak negeri pribumi dengan kelompok bangsa Eropa, Cina ataupun Arab dalam bentuk yang setaraf, amat kecil kalau mau dikatakan hampir tidak ada. Lain halnya dengan kelompok-kelompok Mestizo, Moor, Bengalen, yang diduga karena ada sedikit banyak persamaan sifat dan kebiasaan yang membuat mereka lebih mudah bercampur-gaul dengan penduduk anak negeri pribumi di Batavia.

Di dalam hal pelapisan atas dari penduduk anak negeri ini, selain kelompok "beambten en hoofden" ini terdapat pula kelompok yang tidak kurang pentingnya berperanan, yaitu yang disebut sebagai "geestelijke hoofden en beambten". Pada kelompok ini dimasukkan : "hoofdpanghoeloe",

" districtspanghoeloe ", "panghoeloe bij Landraad ", " naib ", "chatib ",
" modin ", " merbots ", " bilal ", " goeroe ngadjie's ", " hadjies ",
" imam ", " santires ", dan lain-lain.

Tentu diperlukan penelitian yang lebih luas, melebar dan mendalam jika gambaran yang lebih komprehensif mau didapatkan, tetapi tulisan ini akan berhenti hanya pada " tuan bek " dan " kommandant Batavia " saja, yang ini pun jauh daripada lengkap.

Jakarta, 25 Agustus 1982

Mona Lchanda
Arsip Nasional RI
Jakarta.

Seminar Sejarah Lokal

Topik : I

STRATIFIKASI SOSIAL DAN POLA
KEPEMIMPINAN LOKAL DI
SUMATERA BARAT

Oleh :
Mardanas Safwan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
SEMINAR SEJARAH LOKAL

1982

STRATIFIKASI SOSIAL DAN POLA PEMIMPINAN BOKAL DI SUMATERA BARAT

I

Dewasa ini kata Minangkabau mempunyai pengertian yang identik dengan istilah Sumatera Barat. Perkembangan Sejarah Minangkabau menunjukkan bahwa daerah geografis Minangkabau tidak merupakan bahagian dari daerah propinsi Sumatera Barat sekarang.¹⁾

Istilah Minangkabau mengandung pengertian kebudayaan di samping makna geografis. Ada suku bangsa Minangkabau, ada kebudayaan Minangkabau, tetapi tidak ada suku bangsa Sumatera Barat, maupun kebudayaan Sumatera Barat. Daerah Minangkabau dahulu terdiri atas kesatuan geografis, politik-ekonomis dan kultur-historis, lazim disebut "Pesisir", "Daré", dan "Rantau".²⁾

Daerah Pesisir terbagi pula menurut nama daerah ataupun kota dagang yang dalam sejarah pernah memainkan peranan yang penting seperti Tikus-Pariaman di sebelah utara, Padang di tengah-tengah, Bandar X dan Indrapura di sebelah selatan.

Daré adalah daerah inti Minangkabau yang terdiri dari tiga daerah yaitu: Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Limapuluhkota. Ketiga daerah ini oleh orang Minangkabau disebut "Luhak Nan Tigo" (Luhak Yang Tiga). Daerah inilah yang disebut daerah Minangkabau asli atau "Alam Minangkabau".³⁾

Daerah yang terletak di lembah sungai dan anak sungai yang berasal dari daerah pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di Selat Malaka maupun di Laut Cina Selatan disebut "Rantau". Penduduknya terutama berasal dari Daré dan merupakan daerah kolonisasi Alam Minangkabau.⁴⁾ Daerah Rantau ini bahkan kemudian meluas keluar pulau Sumatera yaitu Semenanjung Melayu, khususnya "Negeri Sembilan". Sampai sekarang menjadi sebutan dan slogan di Negeri Sembilan "BERAJA KE JOHOR, BERTALI KE SIAK, BERTUAN KE MINANGKABAU".⁵⁾

Setelah Minangkabau berhubungan dengan Belanda pada pertengahan abad ke-17, mereka menamakan bahagian pesisir barat Sumatera yang mula-mula jatuh di bawah pengawasan dan kekuasaan ekonomi serta politik-administratif Belanda dengan istilah "Sumatra's Westkust". Kemudian sesudah Belanda dapat meluaskan kekuasaannya

pada abad ke-19 ke daerah "Alam Minangkabau" dan daerah-daerah lainnya mereka menamakan daerah ini "de Residentie Sumatra's Westkust". Jepang kemudian menamai daerah ini "Sumatra Kishi Kai-gan Shu", dan pemerintah Republik Indonesia menamakan Keresidenan, kemudian Propinsi Sumatera Barat.⁶⁾

Stratifikasi sosial dalam masyarakat Minangkabau tidak dapat digambarkan secara umum dan menyeluruh, karena pada kenyataannya stratifikasi sosial itu hanya berlaku dalam kesatuan sebuah desa (nagari) tertentu saja, atau sekelompok desa yang berdekatan. Pelapisan itu membagi masyarakat menjadi: urang asa (bangsawan), orang biasa dan orang yang paling rendah. Lapisan terakhir ini mungkin dapat dihubungkan dengan budak dalam arti yang lebih ringan.⁷⁾

Perbedaan lapisan sosial dapat dihubungkan dengan perbedaan kedatangan suatu keluarga ke dalam suatu tempat tertentu. Keluarga yang mula-mula datang dianggap sebagai keluarga bangsawan. Karena itu mereka dalam masyarakat Minangkabau juga dikenal sebagai urang asa (orang asal). Penghulu umumnya diangkat dan dipilih dari golongan ini oleh kaum yang bersangkutan. Keluarga yang datang kemudian, tetapi tidak terikat seluruhnya kepada keluarga asal, dapat membeli menjadi orang biasa atau golongan pertengahan dalam masyarakat yang bersangkutan. Tidak demikian halnya dengan keluarga yang datang kemudian dan menumpang pada keluarga yang datang lebih dahulu dengan jalan menghambakan diri. Mereka itulah yang dianggap paling rendah dalam masyarakat yang bersangkutan. Jumlah orang yang menghambakan diri sangat sedikit, makin lama makin berkurang, karena diterima keluarga tempat menumpang sebagai anggota keluarga sendiri. Bahkan semenjak tahun 1876 golongan ini boleh dikatakan tidak ada lagi dalam masyarakat.⁸⁾

Menurut konsepsi orang Minangkabau, perbedaan lapisan sosial ini dinyatakan dengan istilah: kamanakan tali pariuk, kamanakan tali budi, kamanakan tali ameh, dan kamanakan bawah lutuik, yang terutama dilihat dari sudut seorang urang asa. Seorang kamanakan tali pariuk adalah keturunan langsung dari suatu keluarga

urang asa. Kamanakan tali budi adalah keluarga yang datang kemudian, tetapi karena kedudukan mereka yang tinggi di tempat asalnya, mereka dapat membeli tanah yang cukup luas di tempat yang baru. Mereka kemudian dianggap sederajat dengan keluarga urang asa. Kamanakan tali ameh adalah pendatang baru yang mencari hubungan dengan keluarga urang asa, tetapi kemudian mereka tidak tergantung kepada belas kasihan keluarga urang asa. Kamanakan bawah lutuik adalah orang yang menghamba pada keluarga urang asa, mereka sungguh-sungguh tidak punya apa-apa dan hidup dari membantu rumah tangga urang asa.⁹⁾

Di samping istilah kamanakan juga lazim digunakan kata anak buah yang berarti orang suruhan dari penghulu. Mereka melakukan kerja berat dan berbahaya seperti membuka hutan untuk dijadikan sawah atau ladang dan menjaga keamanan nagari sebagai pagar kampung. Tiap-tiap nagari mempunyai sejumlah anak buah barisan pengawal yang anggota-anggotanya ahli menggunakan senjata tajam dan bersilat. Mereka lazim disebut dubalang (hulubalang), mereka ini umumnya terdiri dari lapisan sosial yang paling bawah.¹⁰⁾

Kedudukan dubalang, makin lama makin dihargai dalam masyarakat, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan peranannya memadamkan kerusuhan, apalagi kalau diikuti dalam pertempuran. Di antara mereka ada juga yang jadi terkenal, karena berhasil dalam melaksanakan tugasnya.¹¹⁾

Mengenai pola kepemimpinan dapat dikatakan bahwa sulit untuk melihat suatu pola yang jelas dalam masyarakat Minangkabau. Hanya dua kali dalam sejarahnya sebahagian besar daerah Minangkabau patuh pada suatu kekuasaan, tunduk pada satu ideologi dan mempunyai tentara nasional yaitu zaman raja Adityawarman (+ 1347-1375) dan di zaman Gerakan Padri (+ 1800-1840). Kedua kekuasaan yang timbul sebagai meteor itu hancur, karena mendapat reaksi hebat dari kalangan yang ingin menegakkan dan melanjutkan sistem komunalisme nagari kembali berdasarkan ikatan darah.¹²⁾

Raja Minangkabau yang berkedudukan di Pagarruyung tidak mempunyai kekuasaan yang nyata, raja hanya dianggap sebagai tokoh sakral orang bertuah yang merupakan lambang kerajaan Minangkabau,

ia tidak mempunyai kekuasaan politik. Kekuasaan terpecah menurut jumlah nagari sebagai daerah otonom dalam kerajaan Minangkabau. Yang sebenarnya berpengaruh dan memegang tampuk pimpinan di Minangkabau adalah penghulu. Ia seorang penguasa otonom, mempunyai daerah (sawah dan ladang), rakyat (Kemenakan) yang mematuhi segala undang-undang yang dibuatnya. Nagari tempat penghulu berkediaman, adalah suatu federasi penghulu yang pada hakekatnya merupakan sebuah republik kecil. Gabungan republik genealogis ini jumlahnya mendekati seribu buah dan hubungan dengan sesamanya longgar yang disebut Minangkabau.¹³⁾

Mengenai kekuasaan penghulu, pepatah adat mengatakan:

"kamanakan beraja ka mamak
mamak beraja ka penghulu
penghulu beraja ka mupakat
mupakat beraja ka alua jo putuik"

(kemanakan beraja pada mamak
mamak beraja ke penghulu
penghulu beraja pada mupakat
mupakat beraja pada alua dan patut)¹⁴⁾

Kedudukan dan fungsi sebagai penghulu berdasarkan pilihan seluruh anggota keluarga (perut, kaum dan suku) dan kerennanya tidak dipusakai oleh anak maupun oleh kamanakan kandung. Seorang penghulu adalah ningrat jabatan dengan hak istimewa yang melekat pada gelar pusaka yang dipakainya sebagai penghulu.

Sebagai penghulu ia bergelar datuk (datuk), ia bertindak sebagai administrator dan pembina-pemelihara harta pusaka keluarga dalam bentuk tanah dan rumah pusaka. Sebagai anggota kerapatan adat dalam nagari ia terutama mewakili dan membela hak keluarga yang dipimpinnya. Sebagai penghulu kaum yang mengepalai kaum (sukunya) seorang penghulu itu bernama penghulu suku. Ia hanya berkuasa dalam suku yang dipimpinnya, sedangkan di luar sukunya ia tidak mempunyai kekuasaan. Anggota suku yang berada di bawah kekuasaan seorang penghulu suku dinamai kamanakan atau ada juga yang menamakan anak kamanakan.

Di dalam nagari, penghulu suku merupakan anggota kerapatan

adat memilih salah seorang dari mereka untuk diangkat menjadi penghulu kepala yang akan mengopalai nagari yang bersangkutan.¹⁵⁾

Di daerah Rantau keadaannya agak berbeda dengan daerah Minangkabau asli. Di daerah itu kedudukan penghulu hanya mengurus masalah adat, sedangkan urusan pemerintahan dipegang oleh seorang kepala yang kedudukannya sama dengan kedudukan seorang raja. Kedudukan sebagai seorang raja tidak diturunkan kepada kamanakan seperti di Minangkabau asli, tetapi diturunkan kepada anak. Keadaan ini juga berlaku di daerah pesisir, umpamanya di Indrapura. Di daerah pesisir khususnya Pariaman dan Padang, keadaannya hampir sama dengan di daerah rantau. Daerah Pariaman mengenal gelar Sultan, Sidi dan Bagindo, bagi golongan yang mempunyai kedudukan maupun fungsi mendekati golongan ningrat di Jawa, dan mereka ini disebut orang berbangsa. Orang berbangsa di Padang memakai gelar Sutan atau Marah di depan namanya, gelar itu dapat diturunkan kepada kepada anak, tetapi tidak kepada kamanakan. Nama suku dan gelar pusaka tetap diterima dari pihak ibu. Orang dari daerah Pariaman juga banyak yang memakai gelar penghulu yaitu datuk, karena mereka itu umumnya juga berasal dari daerah Luhak Nan Tigo.¹⁶⁾

Satu golongan lagi yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat, tetapi tidak mempunyai kekuasaan yang nyata adalah kaum ulama. Sebelum Gerakan Padri ulama hanya berperanan sebagai pendidik dan pembimbing kehidupan rokhani masyarakat. Kedudukan dan fungsi ini tidak diimbangi oleh kekuasaan praktis, yang menyebabkan para ulama merasa tidak puas.

Sesudah Gerakan Padri, maka para ulama mulai mendapatkan hak mereka. Mereka mulai diikuti-sertakan di kerapatan adat dalam nagari, dan dimasukkan sebagai anggota dewan pemerintahan nagari. Mulai saat ini kaum ulama mendapat pengaruh dalam masyarakat, dibawa mereka diakui oleh masyarakat di samping penghulu, mereka juga mendapat sebutan Tuanku Imam atau Tuanku Syech. Kekuasaan dalam nagari dipegang oleh "orang yang empat jenis", yaitu: penghulu, ulama(imam-chatib), manti (cerdik pandai) dan dubalang.¹⁷⁾

II

Setelah Belanda berkuasa di Sumatera Barat pada pertengahan abad ke-19, terjadi perubahan dalam susunan masyarakat yang terikat pada birokrasi Pemerintah Hindia Belanda. Sistem pelapisan sosial yang lama makin hilang atau bertukar mengambil bentuk lain.

Sistem pelapisan dalam masyarakat yang didasarkan kepada penguasaan tanah tidak begitu besar lagi peranannya. Tanah yang diusahakan, terutama untuk perdagangan, sudah tidak mendatangkan hasil yang banyak. Karena itu penghasilan yang didapat dari tanah boleh dikatakan tidak bertambah, sehingga hasil yang ada makin sedikit dengan makin bertambahnya keturunan mereka. Orang-orang yang sepenuhnya terikat kepada tanah akhirnya kehidupannya menjadi susah, dan ada juga yang menjadi miskin.

Orang yang mengerti dan tahu akan perubahan zaman, mencari usaha lain untuk mendapatkan hasil, yaitu dengan jalan berniaga. Ternyata banyak di antara mereka lebih cepat mendapat kemajuan di bidang ini, sehingga dengan kekayaan yang mereka dapat, mereka bisa juga naik derajatnya dalam masyarakat. Bila kenaikan mereka ini disertai dengan kemunduran dari golongan orang tua, terjadilah keadaan yang berbeda dari yang ada sebelumnya.

Dalam pada itu terbuka lapangan kerja pada pemerintah dalam sektor kerengajaan, menyebabkan timbulnya golongan elite yang baru. Proses ini memberikan pengaruh pula terhadap perubahan sistem pelapisan sosial yang tradisional di Minangkabau.¹⁸⁾

Perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan pelapisan sosial dapat dilihat dari ungkapan yang populer pada saat itu:

"dahulu kar-hok nan bajelo

kini siriah nan dimakan

dahulu asa nan baguno

kini pitih urang tanyokan"

Pitih (uang) memainkan peranan yang sangat menentukan dalam masyarakat. Sistem ekonomi berdasarkan uang, membebaskan manusia dari ikatan tanah, uang membuat manusia merdeka untuk bergerak dan lepas dari ikatan tanah. Uang mempermudah dan memperpendek proses memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ikatan adat menjadi longgar dan peranan penghulu (ninik mamak) sebagai pimpinan adat

menjadi berkurang.¹⁹⁾ Walaupun secara tradisional kedudukan penghulu mulai berkurang perannya tetapi oleh Pemerintah Hindia Belanda mereka dipertahankan untuk menanamkan dan mengembangkan kekuasaannya di Sumatera Barat. Sekarang, kepatuhan orang kepada penghulu umumnya dikaitkan dengan hubungan mereka dengan sistem administrasi Pemerintah Hindia Belanda.

Walaupun secara tradisional kekuasaan penghulu di tiap-tiap nagari menjadi berkurang, tetapi dalam scope supra nagari dan Sumatera Barat menjadi bertambah. Kalau dahulu seorang penghulu hanya berkuasa dalam lingkungan kaum dan nagarinya saja, maka sekarang kekuasaannya menjadi luas. Banyak penghulu yang diangkat menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda seperti jaksa, demang, guru dan lain-lain yang mempunyai kekuasaan formal dalam masyarakat.

Di samping itu banyak pula penghulu yang menjadi tokoh ulama seperti H. Mansur Daud Datuk Palimé Kayo, HAMKA Datuk Indomo dan lain-lain yang kepemimpinan mereka diakui di seluruh Sumatera Barat. Selain itu ada pula penghulu yang menjadi tokoh partai politik seperti H. Datuk Daduak yang juga terkenal di Sumatera Barat.

Selain dari itu ada pula seorang penghulu yang diangkat menjadi anggota Volksraad yang bernama Datuk Kayo. Bahkan beliau ikut mendirikan Fraksi Nasional di Volksraad yang dipimpin oleh M.H. Thamrin. Anggota lainnya adalah: Kusomo Utoyo, Dwijosewoyo, Datuk Kayo, Muchtar, Teuku Nyak Arif, Sunjukupon, Pangeran Ali, Gutadi dan R.P. Suroso.²⁰⁾

Setelah Belanda berkuasa di Sumatera Barat, mereka menerapkan sistem pemerintahan menurut pola yang dijalankan di Jawa. Sejak tahun 1830 mulai diperkenalkan jabatan Regent, yang dimulai dengan nagari Batipuh Padang Panjang. Regent yang mengemudikan nagari Batipuh, akhirnya pada tahun 1841 memimpin perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda yang rakyatnya dipaksa melakukan rodi kopi. Pada tahun 1860 mulai diperkenalkan jabatan Laras yang mengemudikan satu negeri atau beberapa nagari. Kemudian sejak tahun 1914 diperkenalkan jabatan kepala nagari (Angku Palo), kepala kecamatan (Assisten Demang), Demang dan Asisten Residen yang mengemudikan kabupaten (Luhak), yang dikepalai oleh Tuan Luhak.²¹⁾

Dalam pada itu kaum ulama yang telah mulai dapat pengaruh dan kedudukan nyata dalam masyarakat sesudah Gerakan Padri baik dalam nagari maupun supra nagari, oleh Belanda dipertentankan dengan kaum Penghulu untuk saling berdebutan pengaruh. Sebagai pimpinan informal yang berada di luar kekuasaan resmi Pemerintah Hindia Belanda, kaum ulama makin lama makin berpengaruh dalam masyarakat Sumatera Barat. Kaum ulama muda yang muncul di Sumatera Barat pada permulaan abad ke-20 telah membawa paham modernisme Islam.

Pada masa sebelumnya di Sumatera Barat pendidikan Islam dipengaruhi oleh kaum tradisional yang terkenal dengan nama kaum Tua. Mereka lebih memperhatikan persoalan agama dalam arti yang sempit, sering juga pada soal ibadah semata-mata. Untuk mereka Islam itu lebih terbatas pada persoalan fiqh, kadang-kadang juga disertai dengan paham mistik dan tarikat. Mereka mengakui taqlid dan menolak idjtihad.²²⁾

Sebaliknya kaum yang lebih terkenal dengan sebutan Kaum Muda modernis mempunyai kesediaan besar untuk mengadaptasi cara-cara berorganisasi, pendidikan, serta pemikiran Barat, termasuk cara misi Kristen, sejauh ini tidak dianggap bertentangan dengan dasar Islam. Dalam sekolah kaum muda dimasukkan mata pelajaran umum, di samping bahasa Arab, juga bahasa Belanda dan Inggris diajarkan. Dalam sekolah yang dipentingkan adalah pengertian bukan hafalan. Pembicaraan tentang Islam tidak terbatas di surau atau di mesjid saja, tetapi juga melalui pers dan dengan jalan tabligh, dan persoalan itu sampai kepada masyarakat umum.²³⁾

Kaum intelektual Barat sebagai golongan ketiga antara kaum adat dan kaum ulama dibangun dan dibina oleh Belanda di Sumatera Barat sejak tahun 1873. Pada tahun itu dibuka di Bukittinggi "Sekolah Raja" yang murid-muridnya berasal dari anak-anak kaum adat maupun kaum ulama. Dengan bertambah luasnya kekuasaan Belanda di Sumatera Barat, mereka berusaha memantapkan dominasi politik dan ekonominya. Tenaga dan unsur pengembang kekuasaan Belanda mulai disiapkan secara berencana. Anggota dan alat pemerintahan yang pandai tulis-baca, berpengetahuan umum dan sekedar dapat mengerti bahasa Belanda, kian lama kian dirasakan keperluannya.

Pendidikan menghasilkan kaum terpelajar yang mata dan hatinya terbuka bagi banyak kepincangan masyarakat, yang tidak terlihat maupun dihiraukan sebelumnya. Daya kritik timbul, dipupuk oleh ilmu pengetahuan, tidak saja ditujukan pada masyarakat sendiri, tetapi juga pada kekuasaan asing sebagai penjajah. Golongan terpelajar ini kemudian ditampung dalam wadah pergerakan kebangsaan.²⁴⁾

Beritulah perubahan sosial-ekonomis dengan segala aspeknya ikut mempengaruhi kedudukan dan status seseorang dan juga terhadap nilai-nilai yang mendukung stratifikasi sosial.²⁵⁾

Penghulu yang diangkat mengopalai suatu nagari, didampingi oleh pimpinan yang terdiri dari tiga unsur yang dinamai dengan istilah "tungku tiga sajarangan" yaitu: ninik mamak (penghulu), alim ulama dan cerdik pandai. Anggota dewan ini, walaupun tidak mendapat penghasilan tetap dari pemerintah Hindia Belanda, mereka termasuk aparat pemerintahan nagari. Jabatan paling tinggi dalam bidang pamong praja yang dipegang oleh orang Sumatera Barat pada waktu itu dalam jajaran Pemerintah Hindia Belanda adalah demang dan jaksa, tamatan "Sekolah Raja" di Bukittinggi.

Sebagai pejabat pemerintah Hindia Belanda dan pemimpin formal dalam masyarakat, seorang demang kadang-kadang juga mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat. Untuk menjaga agar mereka ini jangan terlalu berpengaruh, maka oleh Pemerintah Hindia Belanda seorang demang tidak boleh lebih dari tiga atau empat tahun di satu tempat.²⁶⁾

Kaum ulama yang telah muncul sebagai golongan yang paling berpengaruh di Sumatera Barat pada waktu itu, mereka berada di luar kekuasaan formal pemerintah Hindia Belanda. Sebagai pemimpin informal yang bergerak dalam bidang agama dan pendidikan, mereka mempunyai banyak pengikut di kalangan masyarakat luas di Sumatera Barat.

Salah seorang dari ulama terkenal di Sumatera Barat pada permulaan abad ke-20 adalah Syech Moh. Janil Jambek atau terkenal dengan panggilan "Inyak Jambek". Beliau dilahirkan di Bukittinggi pada tahun 1860. Waktu muda beliau terkenal sebagai seorang parewa yaitu pemuda yang tidak mengacuhkan agama, peraturan dan sopan

santun atau pemuda yang makan "masak mantah".

Setelah berumur 22 tahun beliau mulai tobat dan menjalankan perintah agama dan naik haji ke Mekah. Kemudian beliau keliling Malaya, dan sesudah kembali ke Sumatera Barat mengajar di beberapa tempat, dan akhirnya menetap di kampung beliau sendiri yaitu Nagari Yangah Sawah kota Bukittinggi. Selain dari seorang ulama besar, Syech Jamil Jambek juga seorang ahli hisap yang terkenal kepandaiannya. Murid Inyak Jambek datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat, dan mereka ini ikut menyebarkan paham modernisme Islam di daerah ini. 27)

Ulama lain yang juga terkenal pada masa itu adalah Haji Abdul Karim Amarullah atau terkenal dengan sebutan "Inyak Rasul". Beliau dilahirkan di Maninjau pada tahun 1879, atau tepatnya nagari Sungai Datang. Pada usia 16½ tahun Abdul Karim Amarullah naik haji ke Mekah dan menetap di Mekah selama beberapa tahun. Dalam usia 23 tahun beliau pulang ke tanah air dan mengajar agama di Sungai Datang, dan kemudian pindah ke Padang Panjang mengajar dan menjadi salah seorang tokoh pimpinan "Sumattara Tawalib".

Pada tahun 1926 bersama H. Abdullah Ahmad, Inyik Rasul berangkat ke Mesir untuk memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al Azhar di Kairo. 28)

Murid-murid dari kedua ulama terkenal itu tidak saja berasal dari pulau Sumatera tetapi juga dari Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke Semenanjung Melayu. Sekembali mereka ke daerah asal masing-masing, mereka berporan sebagai pembaharu sistem pendidikan dan penyuluh dakwah Islam yang modern pula. 29)

Ulama lain yang terkenal dari angkatan Inyik Jambek dan Inyak Rasul adalah H. Abdullah Ahmad. Beliau dilahirkan di Padang Panjang pada tahun 1878. Pada tahun 1895 beliau naik haji ke Mekah dan tahun 1899 kembali ke Sumatera Barat. Mula-mula Haji Abdullah Ahmad mengajar di Padang Panjang termasuk perguruan Sumatera Thawalib, dan kemudian pindah mengajar ke Padang. 30)

Berbeda dengan Inyik Jambek dan Inyik Rasul yang mengadakan pembaharuan sistem pendidikan agama Islam dengan tetap mengutamakan pendidikan agama Islam dengan bahasa Arab sebagai bahasa

pengantar maka H. Abdullah Ahmad mendirikan HIS met de Qur'an ("Adabiah School") di Padang, yang memberikan pendidikan menurut sistem Barat berdasarkan Al Qur'an. Dengan demikian H. Abdullah Ahmad mendidik kaum intelektual Barat di Sumatera Barat yang berpegang pada huan agama Islam.³¹⁾

Seorang ulama terkemuka lainnya yang sezaman dengan Inyiah Jambek, Inyiah Rasul dan H. Abdullah Ahmad adalah Syech H. Thaib Umar. Beliau dilahirkan di Sungayang Batus ngkar tahun 1874. Dalam usia muda beliau telah naik haji ke Mekah dan menetap di sana selama 5 tahun. Sekembali ke tanah air mengajar di berbagai tempat di Sumatera Barat, dan pada tahun 1911-1916 ikut memimpin majalah Al Munir di Padang bersama dengan H. Abdullah Ahmad dan H. Abdulkarim Amarullah.³²⁾

Salah seorang ulama lain yang tidak kecil jasanya adalah Syech Chatib Ali di Muaralabuh, yang dapat menenangkan pertentangan yang meruncing sejak akhir abad ke-19 mengenai pelaksanaan hukum waris menurut hukum adat dan hukum agama Islam (hukum faraidh). Beliau mengeluarkan fatwa yang disokong oleh sebarisan besar ulama modern dengan mengatakan bahwa harta pencaharian diwariskan kepada anak dan harta pusaka kepada kemandakan.³³⁾

Sebagai ulama angkatan kedua yang meneruskan usaha ulama modernis di Sumatera Barat adalah Zainuddin Labai El Junusi yang dilahirkan di Padang Panjang pada tahun 1890. Beliau pernah belajar kepada Syech Abdullah Ahmad di Padang, tetapi kemudian pada tahun 1915 mendirikan "Diniyah School" di Padang Panjang untuk putera dan puteri (ke-edukasi). Sekolah Diniyah mempunyai tujuh kelas seperti HIS Belanda, bahkan sistem penyelenggaraannya hampir menyamai sekolah Belanda, tetapi isinya mengenai agama Islam.³⁴⁾

Usaha dari Zainuddin Labai El Junusi sesudah meninggal dunia dilanjutkan oleh adiknya (wanita) yang bernama Rahmah El Junusiah yang dilahirkan di Padang Panjang pada tanggal 29 Desember 1900. Beliau mendirikan Perguruan Diniyah Puteri yang bertujuan memajukan kaum wanita untuk kepentingan rumah tangga, agama dan masyarakat.³⁵⁾

Ulama lain yang juga dapat pengaruh dari ulama modernis adalah Syech Ibrahim Musa Parabek yang dilahirkan di Parabek Bukit-

tinggi tahun 1884. Beliau mendirikan sekolah Thawalib Parabek seperti sekolah Thawalib Padang Panjang.³⁶⁾

Seorang ulama yang juga cukup terkenal pada waktu itu di Sumatera Barat adalah Syech Daud Rasyidi yang dilahirkan di Balingka Bukittinggi. Sesudah kembali dari Mekah beliau pernah belajar pada H. Abdulkarim Amarullah pada tahun 1908.

Pada tahun 1919 Syech Daud Rasyidi ikut serta membentuk Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) Sumatera Barat, dengan tujuan ikut memajukan pendidikan Islam. Beliau juga aktif dalam pergerakan nasional dengan memasuki organisasi Muhammadiyah. Kemanakannya H. Muchtar Luthfi anaknya Mansur Daud Datuk Polimo Kayo dan menantunya H. Jalaluddin Thaib adalah tokoh-tokoh Sumatera Barat yang aktif dalam pergerakan nasional.³⁷⁾

Tokoh-tokoh ulama lainnya yang bergerak di bidang politik di samping mengurus pendidikan agama adalah H. Ilyas Yakub dan H. Udin Rahmani. Semua tokoh ini aktif memimpin PSII, Muhammadiyah dan PERMI yang bernefaskan agama Islam.³⁸⁾

Tokoh-tokoh muda Sumatera Barat yang lahir sekitar awal abad ke-20 yang telah mendapat pendidikan di sekolah pemerintah Hindia Belanda, juga aktif dalam pergerakan kebangsaan. Tetapi sebahagian besar dari mereka itu aktif di luar Sumatera Barat seperti H. Agus Salim dan Abdul Muis. H. Agus Salim pada mulanya pernah mendirikan HIS Swasta di nagarinya sendiri Kotogadang sebelum pindah ke Jakarta.

Tokoh-tokoh yang lebih muda pada mulanya aktif bergerak di Sumatera Barat seperti Nazir Pamuncak, Moh. Hatta, Bahder Djohan, Moh. Yamin, Abdul Rivai, Amir, Jamaluddin Adinegoro dan lain-lainnya, akhirnya pindah dan ikut berjuang di Jakarta. Bahkan Hatta dan Nazir Pamuncak ikut berjuang di negeri Belanda sebagai Ketua dan anggota Perhimpunan Indonesia (PI).³⁹⁾

Di Sumatera Barat juga muncul tokoh emansipasi wanita yang bernama Pohana Kudus. Beliau dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1884 di Keto Gadang - Bukittinggi, anak dari Moh. Rasyid Maharaja Sutan seorang pegawai Pemerintah Hindia Belanda di Alahan Panjang. Melalui perkumpulan Amai Setia beliau mengajar kaum wanita

untuk pandai tulis-baca dan pelajaran tentang kerajinan wanita. Pada tahun 1912 beliau mendirikan sebuah harian yang bernama "Soenting Melayu". Melalui harian ini Rohana Kudus mengemukakan pandangannya tentang bagaimana kaum wanita hidup dalam masyarakat.⁴⁰⁾

Seorang tokoh pendidikan terkenal di daerah Sumatera Barat dan Indonesia bernama Moh. Syafei yang dilahirkan pada tahun 1899. Di waktu masih kecil diangkat menjadi anak angkat oleh Marah Sutan, seorang guru dan pengarang pada waktu itu di Sumatera Barat.

Setelah menamatkan Sekolah Guru di Bukittinggi, beliau menjadi guru di sekolah Kartini di Jakarta. Pada tahun 1922 beliau pergi ke Eropah melanjutkan sekolahnya, dan tertarik dengan sekolah kerja Kerchensteiner di Jerman. Sesudah kembali ke tanah air beliau mendirikan "Indonesische Nationale School" (INS) di Kayutanam.

Moh. Syafei mendidik para pemuda untuk mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing. Bakat mereka dipupuk dan dikembangkan agar dapat berdiri sendiri dalam masyarakat sebagai pengusaha kecil, ahli bangunan, seniman, sastrawan, pelukis dan lain-lain sebagainya.

Dalam proses perubahan sosial-politik Sumatera Barat lulusan INS ikut menyumbangkan tenaga dan pikiran mereka. Sebagai orang yang dididik untuk berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung nasib serta penghidupannya sebagai pemakan gaji di kantor Pemerintah Hindia Belanda maupun kantor-kantor dagang Belanda.⁴¹⁾

III

Stratifikasi sosial yang telah menemukan polanya pada masa kebangkitan nasional, pada masa pendudukan Jepang kembali mengalami perubahan. Perubahan sosial yang tercipta berdasarkan kepentingan Jepang itu tidak merata untuk seluruh Indonesia.⁴²⁾

Di Sumatera Barat juga terjadi perubahan pelapisan sosial, walaupun perubahannya tidak begitu mendasar. Untuk memperkokoh kedudukannya, penguasa Jepang ketika itu lebih menonjolkan kedudukan dan peranan kaum ulama dari pada kaum penghulu. Alim ulama se-

bagai pemimpin masyarakat yang selalu dipersempit ruang geraknya dan dipersulit kedudukannya oleh Belanda dianggap oleh Jepang sebagai anti kolonial Belanda. Mereka dipertentangkan dengan kaum penghulu, sebagai ninik mamak yang membantu Belanda dan dicap sebagai kaki tangan penjajah Belanda.⁴³⁾

Kaum ulama dirangkul, diberikan fasilitas yang tidak pernah mereka alami di zaman penjajahan Belanda. Mereka diundang untuk berkumpul dan disambut oleh "Shu-Co-Kan" serta pembesar militer dan sipil Jepang bertempat di "Yamato Hoteru" yang waktu Hindia Belanda bernama "Oranje Hotel" yang merah di Padang dan sekarang bernama Hotel Muara. Mereka diundang untuk bersama-sama dengan ulama se Sumatera mengadakan "Muktamar Islam Asia Timur Raya" di Shonanto. Maksud Jepang agar dengan perantaraan mereka sebagai pemimpin rokhaniah rakyat di Sumatera Barat konsekwen anti penjajahan Belanda, dapat mengarahkan bantuan material dan moral segenap lapisan penduduk untuk berjuang hingga tetesan darah terakhir bagi kemenangan "Dai Toa Senso".⁴⁴⁾

Di samping dengan kaum adat (penghulu) kaum ulama juga dipertentangkan dengan kaum cerdik pandai yang mendapat pendidikan Belanda, yang juga dianggap sebagai kaki tangan Pemerintah kolonial Belanda, sungguhpun tenaga mereka tetap dipakai oleh Jepang dalam kantor-kantor pemerintah.⁴⁵⁾

Tokoh intelektual hasil pendidikan Barat yang tidak bekerja pada pemerintah Hindia Belanda seperti Moh. Syafei juga diperhentikan oleh pemerintah Jepang. Tokoh pergerakan nasional, baik yang dihasilkan oleh pendidikan Islam maupun hasil pendidikan Barat perlu dirangkul oleh Jepang. Jepang berusaha menghapus pengaruh Barat serta menanamkan rasa benci rakyat terhadap yang berbau kebudayaan Barat. Slogan yang sengaja dibuat Jepang di Sumatera Barat seperti "Inggris dilinggis", "Amerika disetrika" dan "Belanda kurang ajar", merupakan usaha Jepang untuk menanamkan rasa kebencian rakyat terhadap pengaruh Barat.⁴⁶⁾

Satu golongan yang mendapat perhatian khusus pada zaman pendudukan Jepang adalah golongan pemuda. Mereka berasal dari lingkungan sosial yang berbeda-beda, seperti anak golongan ulama, po-

longan adat dan golongan intelektual hasil pendidikan Barat. Perhatian Jepang diarahkan kepada kaum muda ini karena mereka dinilai pada umumnya memiliki sifat yang giat, penuh semangat dan biasanya masih diliputi idealisme. Mereka belum sempat atau belum begitu merasakan perbedaan antara orang Jepang dan orang Indonesia.⁴⁷⁾

Salah satu perubahan nilai yang dianggap mendasar pada zaman pendudukan Jepang adalah pandangan masyarakat Sumatera Barat terhadap tentara (serdadu). Masyarakat Minangkabau pada zaman dahulu maupun pada zaman kebangkitan nasional, umumnya tidak bersedia atau tidak suka untuk dijadikan serdadu. Masyarakat menganggap bahwa kedudukan serdadu sama dengan dubalang atau hulubalang, yang dalam susunan masyarakat Minangkabau dahulu termasuk golongan yang paling bawah.

Berkat jasa pemuda Chatib Sulaiman, seorang tokoh pemuda Islam, maka pandangan masyarakat mulai berubah. Ia menjelajah Sumatera Barat untuk memberikan penerangan dan propaganda agar para pemuda atau masyarakat Sumatera Barat pada umumnya tidak menganggap rendah lagi kedudukan tentara. Berkat jasa Chatib Sulaiman banyak pemuda Sumatera Barat yang kemudian mendaftar masuk latihan Gyu-G dan lasykar rakyat lainnya. Bahkan kemudian para pemuda Gyu-Gun dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi oleh masyarakat, dalam kenyataannya status mereka seringkali dianggap lebih tinggi dari seorang kepala nagari atau camat misalnya.⁴⁸⁾

Polapisan sosial baru dalam masyarakat Sumatera Barat pada zaman pendudukan Jepang, memberi corak pada pola kepemimpinan masyarakat pada waktu itu. Kaum ulama yang telah mendapat kepercayaan dari Jepang, telah mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Mereka ikut mendorong dan memberikan semangat kepada para pemuda untuk ikut pendidikan militer seperti Gyu-Gun dan barisan sukarela lainnya.⁴⁹⁾

Dalam pembentukan pendidikan militer ini para ulama terkemuka Sumatera Barat yang dipelopori oleh Inyik Jambek dan Syech Sulaiman Ar Rusuli, merestui pembentukan Gyu-Gun, tentara sukarela pembela tanah air dan agama. Para ulama juga mendapat sokongan dari tokoh pemuda seperti Chatib Sulaiman dan Rangkyo Basuna.

Said, sebagai wakil pemuda Islam. Mereka juga mendapat dukungan dari kaum cerdik pandai berpendidikan Barat seperti Moh. Syafei dan Abdullah Datuk Rumah Panjang dan ninik mamak kaum adat yang tergabung dalam "Majlis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau" (M.T.K.A.A.M.).⁵⁰⁾

Kaum ulama juga berhasil memanfaatkan kesempatan yang dibuka oleh Jepang untuk melanjutkan usaha pendidikan. Sekolah-sekolah agama seperti sekolah Muhammadiyah dan sekolah PERTI dibiarkan terus melaksanakan kegiatan pendidikannya. Madrasah dan surau yang sangat banyak terdapat di Sumatera Barat yang kelangsungan hidupnya tergantung pada ulama pemimpinnya, dibiarkan terus melakukan segala kegiatan pendidikan dan pengajian agama. Bahkan pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya suatu badan yang bernama "Majlis Tinggi Islam Minangkabau" yang diketuai oleh Syech Jamil Jambek dengan Sekretaris Haji Mansur Daud Datuk Palimo Kayo.⁵¹⁾

Terhadap urusan pemerintahan, pemerintah Jepang juga bersikap lunak, dibandingkan dengan sikap pemerintah Hindia Belanda yang tidak pernah memberikan jabatan penting kepada orang Sumatera Barat. Pada masa pendudukan Jepang orang Sumatera Barat banyak diberi kesempatan oleh Jepang untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan.⁵²⁾

Di Sumatera Barat didirikan Badan Kebaktian Sumatera Barat yang dipimpin oleh Moh. Syafei dan Mr. S.M. Rasyid sebagai kepala kantornya. Di samping jabatan itu Mr. S.M. Rasyid juga diangkat menjadi Jaksa tinggi Sumatera Barat. Moh. Syafei juga kemudian diangkat menjadi Ketua Badan Perwakilan Sumatera Barat (Syu Sangi Kai). Nantinya juga didirikan suatu badan penasihat untuk seluruh Sumatera, di mana masuk tokoh dari tiap daerah, yang untuk Sumatera Barat diketuai juga oleh Moh. Syafei dan Kepala bahagian umum adalah Jamaluddin Adi Negro.⁵³⁾

Tokoh Moh. Syafei dan Mr. S.M. Rasyid, sesudah Indonesia Merdeka menjadi Residen pertama dan Residen ketiga Sumatera Barat. Mr. S.M. Rasyid dilahirkan di Pariaman pada tanggal 19 November 1911, kemudian menamatkan Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta pada tahun 1938. Semenjak muda telah bergerak dalam organisasi pemuda seperti Ketua "Jong Sumatranen Bond" cabang Padang, dan Sekretaris Indone-

sia Muda (IM) cabang Jakarta.⁵⁴⁾

Atas inisiatif Chatib Sulaiman, maka dipersatukanlah organisasi pemuda dan kepanduan yang diberi nama "Pemuda Nippon Raya". Pemakaian nama itu hanya sebagai siasat saja, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk memupuk jiwa pemuda Sumatera Barat agar jangan terpengaruh dengan propaganda Jepang. Kegiatan organisasi ini akhirnya dicurigai oleh Jepang dan kemudian dibubarkan. Kepada Chatib Sulaiman kemudian dipercayakan memelopori kegiatan mendirikan Gyu-Gun, setelah pembentukan Heiho kurang berhasil di Sumatera Barat.⁵⁵⁾

Chatib Sulaiman kemudian ditunjuk menjadi Ketua Gyu-Gun, dengan para pembantu di antaranya: Suska, Rasuna Said, Leon Salim, Mansur Thaib, Rahmah El Junusiah dan Mr. Nazaruddin. Chatib Sulaiman berhasil mengumpulkan tenaga dan kekuatan yang diperlukan seperti kaum pergerakan, guru swasta dan karyawan perusahaan. Tenaga-tenaga muda yang berhasil dikumpulkan di antaranya adalah: A. Husin, empat orang putera Syech M. Jamil Jambek dan Syarif Usman dan banyak lagi pemuda yang berasal dari sekolah pendidikan Belanda dan sekolah pendidikan Islam.⁵⁶⁾

Chatib Sulaiman juga berhasil mempengaruhi Ismael Lengah yang pada waktu itu menjabat direktur sekolah pertukangan di Padang. Pendidikan dan latihan yang diberikan kepada Gyu-Gun sangat keras dan ketat, apalagi bagi pemuda Sumatera Barat yang umumnya baru untuk pertama kali mengenal kehidupan militer. Pada pelantikan pertama terhadap 11 orang opsir Gyu-Gun, selain dihadiri oleh Chatib Sulaiman juga dihadiri oleh para pemimpin Sumatera Barat seperti Moh. Syafai (Ketua Chuo Sangi In) dan Syech Moh. Jamil Jambek.⁵⁷⁾

Selain dari Gyu-Gun dan Heiho, Jepang juga mengadakan latihan calon perwira bagi pelajar dari sekolah Cu-Gakkō di Padang.

Sesudah Gyu-Gun dibentuk dan berjalan dengan lancar di bawah asuhan Chatib Sulaiman, maka beberapa tokoh merencanakan membentuk suatu wadah di mana semua pemuda dapat latihan dalam ilmu kemiliteran. Untuk berhasilnya rencana itu maka diundenglah Gun Sei Kan Sumatera untuk makan siang di sekolah INS Kayutanam dan pada kesempatan itu dimajukanlah permintaan tersebut. Sesudah dipertimbangkan maka penguasa Jepang dapat menyetujui usul tersebut. Pemuda

Sumatera Barat dibolehkan mendapat latihan ketentaraan dalam jumlah terbatas yaitu 5000 orang, mereka disebut Seinendan.⁵⁸⁾

Di kalangan kepolisian diadakan pula Keibodan yang akan membantu polisi Jepang untuk menjaga keamanan. Bagi keamanan di kampung dilatih Bogodan yang akan bertugas jika ada serangan udara dan soal-soal keamanan lainnya dalam kampung. Pegawai negeri diberi latihan militer dan dipompakan semangat Jepang (Nippon Suisin), begitu juga kepala kampung, tua kampung dan pemimpin formal maupun pemimpin informal lainnya.

Jepang sangat menyadari bahwa pentakuan terhadap sumber kekuatan politik di Sumatera Barat perlu dilakukan. Tokoh pergerakan nasional, tokoh politik serta sumber kekuatan lain dalam masyarakat perlu digunakan. Melalui Moh. Syafoi, Chatib Sulaiman dan Syech Jamil Jambek Jepang berusaha menghapus pengaruh Barat di daerah Sumatera Barat.⁵⁹⁾

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemuda-pemuda Minangkabau mendapat latihan militer, belajar disiplin dan mempergunakan senjata modern. Mereka kemudian memegang peranan yang menentukan bagi suksesnya Revolusi Fisik di Sumatera Barat.⁶⁰⁾

CATATAN BAWAH

- 1) M.D. Mansoer et.al., Sejarah Minangkabau, Bhrotara Jakarta, 1970, hal. 1.
- 2) Ibid, hal. 2.
- 3) Mardjani Martamin et.al., Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat, Proyek IDKD Dep. P. dan K. Jakarta, 1980, hal. 2.
- 4) Mochtar Naim, Merantau: Minangkabau Voluntary Migration; A Dissertation Presented to the Faculty of Arts and Social Sciences University of Singapore, 1973, p. 81.
- 5) Dato' Abdul Samad bin Idris, Hubungan Minangkabau dengan Negeri Sembilan Dari Seri Sejarah dan Kebudayaan. Pustaka Azas Negeri, Seremban 15 Juli 1970, hal. 25. Karangan ini sengaja dicetak dan dipersiapkan untuk dibacakan di hadapan "Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau" di Betusangkar yang diadakan dari tanggal 1 sampai 8 Agustus tahun 1970.
- 6) M.D. Mansoer et.al., opcit, hal. 2.
- 7) Umar Yunus, Kebudayaan Minangkabau, Dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Direksi oleh Koentjaraningrat, Jambatan Jakarta, 1980, hal. 251.
- 8) Taufik Abdullah, The Beginning of the Pabri Movement, Paper of the Dutch-Indonesian Historical Conference, Leiden/Jakarta 1978, p. 14 a.
- 9) Umar Yunus, opcit, hal. 252.
- 10) M.D. Mansoer et.al., opcit, hal. 12.
- 11) Lihat Nur St. Iskandar, Hulubalang Raja, Balai Pustaka, Jakarta, 1953.
- 12) M.D. Mansoer et.al., opcit, hal. 8.
- 13) Ibid, hal. 12. Lihat juga B. Schrieke, Indonesian Sociological Studies, Sumur Bandung, 1960, p. 95.
- 14) I.H. DT. R. Penghulu, Pokok Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, Sekretariat LKAAM Sumatera Barat Padang, 1968, hal. 109.
- 15) Lihat, Taufik Abdullah, opcit, p. 145.
- 16) Lihat M.D. Mansoer et.al., opcit, hal. 14.

- 17) Ibid, hal. 12.
- 18) Umar Yunus, opcit, hal. 252.
- 19) M.D. Mansoer et.al., opcit, hal. 157.
- 20) 48ste Vergadering in de Volksraad, Eerste aanvullende begroo-
ting van Indie voor 1930 alg. beschouwingen, Maandag 27 Janu-
1927.
- 21) Lihat Taufik Abdullah opcit, p. 145 dan M.D. Mansoer et.al.,
opcit, hal. 152.
- 22) Deliar Noer, Hubungan Tiga Golongan, Bulletin Yapernas No. 14
Tahun III, Juni 1976, hal. 20.
- 23) Ibid, hal. 25.
- 24) M.D. Mansoer et.al., opcit, hal. 158.
- 25) Yusmar Basri (editor), Sejarah Nasional Indonesia V, Balai
Pustaka Jakarta, 1977, hal. 155.
- 26) S.M. Rasyid et.al., Sejarah Perjuangan R.I. di Minangkabau
1945-1950 jilid I, P.P. S.I.M. Jakarta 1978, hal. 57.
- 27) Tamar Jaya, Pusaka Indonesia, Bulan Bintang Jakarta, 1966,
hal. 622.
- 28) Ibid, hal. 744, Lihat juga HAMKA, Ayahku, Wijaya Jakarta, 1958
- 29) M.D. Mansoer et.al., opcit, hal. 167.
- 30) Tamar Jaya, opcit, hal. 696.
- 31) M.D. Mansoer et.al., opcit, hal. 160.
- 32) Tamar Jaya, opcit, hal. 692.
- 33) M.D. Mansoer et.al., opcit, hal. 169.
- 34) Mardjani Martamin et.al., opcit, hal. 227.
- 35) Aminuddin Rasyad, Bahmah El Junusiah Kartini Percaturan Islam,
Majalah Prisma No. 8 Agustus 1977, hal. 101.
- 36) Mardjani Martamin et.al., opcit, hal. 229.
- 37) Ibid, hal. 235.
- 38) Ibid, hal. 239.
- 39) Untuk memperdalam bahagian ini dapat dibaca antara lain:
- Moh. Hatta, Memoir, Tintamas Jakarta, 1978.

- Bung Hatta 70 tahun; Panitia Ulang Tahun Bung Hatta ke 70, Jakarta 1972.
- Mardanas Safwan, Peranan Gedung Kramat Raya 106 dalam melahirkan Sumpah Pemuda, Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, 1973.
- 40) Yusmar Nasri, (editor), opcit, hal. 245.
- 41) M.D. Mansoor et.al., opcit, hal. 198.
- 42) Nugroho Notosusanto (editor), Sejarah Nasional Indonesia VI, Balai Pustaka Jakarta 1977, hal. 127.
- 43) M.D. Mansoor et.al., opcit, hal. 22.
- 44) Ibid, hal. 216-217.
- 45) Ibid, hal. 217.
- 46) Mardjani Martamin et.al., Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional Sumatera Barat, Proyek IDKP Dep. P. dan K. 1977, hal. 223.
- 47) Nugroho Notosusanto (editor), opcit, hal. 128.
- 48) S.M. Rasyid et.al., opcit, hal. 84; Lihat juga Nugroho Notosusanto (editor), opcit, hal 193.
- 49) M.D. Mansoor et.al., opcit, hal. 22.
- 50) Ibid, hal. 218.
- 51) Mardjani Martamin et.al., Sejarah Kebangkitan Nasional, opcit, hal. 224.
- 52) Ibid, hal. 225.
- 53) S.M. Rasyid et.al., opcit, hal. 80.
- 54) S.M. Rasyid et.al., Sejarah Perjuangan Kemerdekaan B.I. di Minangkabau jilid II, BPSIM, Jakarta, 1981, hal. 513.
- 55) S.M. Rasyid jilid I, opcit, hal. 81.
- 56) Ibid, hal. 85.
- 57) Ibid, hal. 85.
- 58) Ibid, hal 95.
- 59) Mardjani Martamin et.al., Sejarah Kebangkitan Nasional, opcit, hal. 213.
- 60) M.D. Mansoor et.al., opcit, hal. 213.

Seminar Sejarah Lokal

Topik : I

KERAJAAN TERNATE DAN TIDORE DI ABAD KE XIV

Oleh :

Drs. Frans Hitipeuw

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
SEMINAR SEJARAH LOKAL
1982

KERAJAAN TERNATE DAN TIDORE DI ABAD KE XIV

1. PENDAHULUAN

Pada Abad ke XIV Kerajaan Ternate dan Tidore mempunyai suatu pengertian serta pola kepemimpinan tersendiri. Ternate dan Tidore yang masing-masing dipimpin oleh seorang Raja mempunyai pengertian Maluku asali (Maluku awal).¹⁾ Begitu pula Bacan, Gilolo (Jailolo). Kerajaan Iha di pulau Saparua, Hitu di pulau Ambon, Banda juga disebut tersendiri selaku Kerajaan-kerajaan yang mempunyai status tersendiri pula. Masing-masing mempunyai status dan terdapat perbedaan lapisan-lapisan dalam masyarakat yang didukung oleh nilai-nilai tertentu. Hal ini disebabkan karena sejak dahulu Kerajaan-kerajaan di kepulauan Maluku mempunyai Pemerintahan sendiri.²⁾

Di dalam Kronik/Hikayat Ternate yang ditulis oleh Naidah (seorang Rakyat Ternate) dapat kita temukan suatu stratifikasi sosial yang didukung oleh nilai tertentu dan sangat dominan³⁾ di Ternate dan Tidore.

Hal yang sama dapat kita jumpai dalam Kronik/Hikayat Bacan yang ditulis oleh W.P.H. Coolhaas untuk Kerajaan Bacan dan Jailolo.⁴⁾

Bahkan di dalam Gedenschrift Marasali dapat kita temukan struktur sosial dan pola kepemimpinan Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo.⁵⁾ yang juga terdapat dalam Kronik Bacan dan Kronik Ternate.

Di kemudian hari kita dapati tulisan Imam Rijali seorang guru Agama Islam di Hitu menulis tentang Hikayat Tanah Hitu dan pola-pola kepemimpinan Hitu.⁶⁾

Demikian pula Kerajaan Iha dengan pola kepemimpinannya dalam tulisan Rumphius Ambonsche Historie dan ditulis lagi oleh Francois Valentijn maupun Dr. De Graaf, Lektor pada Universitas Indonesia, dalam ceramahnya Een Oude en een Nieuwe Negorij.⁷⁾

Di dalam Kronik/Hikayat Ternate yang ditulis Naidah, ada disebut "Moelaka" artinya Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan,

"gemakoha maronga Besie mabinatang Gaheka makie maronga Aradat tielah."

Begitu pula dalam Hikayat/Kroniek Bacan, kita temukan "Jailolo makaha maronga Talenamie makie maronga Isim koderat mabinatang Bilolo. Tidore Mahaka maronga Duko Makie maronga Ajatoelkabaka baria mabinatang Sceo.

Ternate dan Tidore dan pola-pola kepemimpinannya dalam pengertian Maluku asali (Maluku murni) ini juga kita temukan dalam sumber Nagara Kertagama sarga 14, bait 5, karangan Mpu Prapanca sebagai berikut:

"ikan saka sanusanusa makhasar buton/bangawi, kunir ggalian mwan i salaya sumba solot/muar muwah tikhan i wandan ambwan athawa maliko wanin, ri seran i timur makadinin aneka nusatutur".

Terjemahannya menurut Dr. Th. Pigeaud sebagai berikut:

1. Itulah (dihitung) pulau demi pulau: Makasar, Buton/Benggawi.
2. Kunir, Galiyao dan Salaya, Sumba, Solot, Muar.
3. dan Wandan (negeri) Ambwan dan juga Maloko (Ternate dan Tidore), Wwanin
4. Seran, Timur, inilah yang membuat pertama-tama sejumlah pulau-pulau yang pernah terpikirkan.

Kemudian dalam sarga 15 bait 1 dinyatakan:

"nahan/lwir ning deantara kacaya de crinarapati, demikian seperti aspek negeri lain dilindungi oleh Sri Narpapati.⁸⁾

Demikianlah penampilan kerajaan Ternate dan Tidore di abad ke 14 dengan status dan perbedaan lapisan-lapisan dalam masyarakat yang didukung oleh nilai-nilai tertentu yang dapat ditemukan dalam sumber-sumber primer yang akan diuraikan dalam uraian-uraian selanjutnya.

2. KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PROSES PERTUMBUHAN PELAPISAN-PELAPISAN SOSIAL

Penduduk Ternate dan Tidore di abad ke-14 maupun masya-

rakat Maluku pada umumnya sejak purba (abad 1 - abad ke 15) berdiam di gunung-gunung (daerah pedalaman) yang letaknya sangat strategis, untuk menjaga diri terhadap serangan musuh, karena sering terjadi pertentangan antarasuku yang satu dengan yang lainnya.¹⁾

Masyarakat hidup berkelompok dan membentuk suatu kehidupan masyarakat hukum genealogis yang susunannya menurut patri-lineal (menurut garis keturunan ayah).

Kelompok-kelompok sosial yang genealogis itu bertumbuh dan berkembang dengan pesat dan akhirnya membentuk suatu kesatuan politis. Informasi mengenai kehidupan politik di Maluku, sangat kurang. Hal ini ditulis S. Kalf dalam tulisannya "De Hongitochten".

Kesatuan politik baru muncul di Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo pada abad ke XIII.²⁾ Keempat kerajaan ini saling berebutan pengaruh, dengan jalan saling menaklukkan satu dengan yang lainnya. Untuk memperbaiki situasi gawat antara mereka pada abad ke XIV diadakan musyawarah di pulau Motir, di mana dalam musyawarah ini dicapai persetujuan bersama mengenai batas-batas petuwaran an (wilayah kekuasaan masing-masing) antara lain Kolano Maloko Ternate, Kolano Maloko Tidore, Kolano Maloko Jailolo dan Kolano Maloko Bacan.³⁾

Meskipun dicapai persetujuan bersama di Motir, namun keputusan musyawarah ini tidak dapat menjamin stabilitas politik di wilayah ini, karena mereka saling berusaha untuk merebut status tertinggi (Penguasa tunggal) di Maluku serta mendominir kerajaan lainnya.

Struktur politik pemerintahan di Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo ini berkembang terus dan agak berlawanan dengan apa yang terjadi di daerah-daerah Maluku lainnya (Maluku Tengah dan Tenggara).

Menurut Dr. J.C. Van Leur, Struktur politik berkembang terus di mana ditemukan di Maluku Tengah suatu "Patrician Republican", yaitu struktur pemerintahan di bawah suatu rezim

aristokrasi, sedangkan di Maluku Tenggara terbentuk "Dorps Republieken" atau Republik-republik desa.⁴⁾

Di Ternate dan Tidore (Maluku awal) keadaan struktur politik pemerintahan berkembang pesat dan agak lain dari apa yang ditemukan dalam pelapisan-pelapisan sosial dan Pola Kepemimpinan Maluku Tengah dan Tenggara.

Kalau di Ternate dan Tidore sejak dahulu pemerintahan berbentuk monarki, di Maluku Tengah dan Tenggara bersifat aristokrasi.

Di Ternate dan Tidore pada abad ke XIV masyarakat sudah terorganisir dalam kelompok-kelompok sosial yang genealogis. Terdapat kesatuan masyarakat yang terkecil yang disebut Soa, yang mendiami suatu wilayah yang dikatakan Dukuh. Pimpinan/Kepala Soa ini disebut "Fomanyira", (orang tua/orang tertua). Beberapa Soa kemudian membentuk satu negeri (kampun) yang dipimpin oleh seorang Gimelaha.

Gimelaha ini kemudian membentuk persekutuan yang lebih besar lagi namanya Boldan yang dipimpin oleh seorang Kolano. Di Bacan disebut Jou.⁵⁾

Boldan itu adalah suatu bentuk politik yang dikuasai oleh Kolano (Raja) pada awal Pemerintahan di Ternate dan Tidore. Bentuk Boldan ini berubah setelah masuknya Islam di Ternate dan Tidore pada abad ke-15, di mana sebutan Boldan (Kolano = Raja) diganti dengan "Sultan".

Dari uraian-uraian di atas proses pembentukan dan pertumbuhan masyarakat-masyarakat sosial genealogis itu kemudian berkembang menjadi kesatuan-kesatuan politik secara jelas yang menjadi landasan pokok susunan masyarakat di Ternate dan Tidore, Bacan, Jailolo maupun di daerah Maluku lainnya.

Pelapisan-pelapisan sosial itu kita kenal mulai dari rumah tau (matarumah = suatu Keluarga Besar), kemudian menjadi Soa (kumpulan beberapa Keluarga Besar). Di Maluku Tenggara disebut Rahanyam. Kemudian menjadi Hena atau Aman (Negeri) dan diangkat seorang Raja/pemimpin untuk mengatur serta mengaman-

kan masyarakat di dalam ketertiban dan kesejahteraan. Rumah Tau -- Soa (Rahanyam) -- Pemimpin (Raja) merupakan proses pertumbuhan masyarakat sosial genealogis di Ternate, Tidore, maupun di daerah Maluku lainnya. Kehidupan Rumah Tau -- Soa -- Hena (Aman) masyarakat Maluku sejak dahulu terlibat dalam suatu sistem kekeluargaan/kekerabatan adat yang mengatur segala hal ikhwal yang menyangkut pelapisan-pelapisan sosial masyarakat. Yang menjadi norma atau nilai kehidupan masyarakat adat di Maluku adalah keluarga (family sistem). Di dalam mengatur pelapisan-pelapisan masyarakat dalam kehidupan masyarakat adat, hukum adat, memegang peranan penting. Hak-hak dan kewajiban, status, fungsi dan kewenangan dalam pelapisan sosial dilindungi hukum adat (hukum yang tidak tertulis). Masyarakat memiliki status dan nilai-nilai tertentu serta mengenal hak-hak dan kewajiban tertentu. Memiliki hak-hak petuwanan atas tanah (dati maupun pusaka) dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh hukum adat. Tetapi ada juga terdapat pada hal-hal tertentu, yang lebih luas di dalam masyarakat, maka terbentuklah hukum adat Siwa Lima artinya seluruh masyarakat memiliki, menguasai dan menikmati sesuatu secara bersama-sama (tidak mengenal milik perorangan (misalnya tanah-tanah kerajaan yang belum terbagi-bagi (terregistrasi), buah-buahan yang jatuh dari pohon terkecuali kelapa, hasil-hasil laut berupa ikan dalam batas kilometer tertentu, binatang-binatang liar yang keluar dari kurungan perorangan yang tak bisa dijinakkan lagi. Untuk menjaga keselamatan kesejahteraan sosial masyarakat. Secara anak adat (pribadi), keluarga, maupun masyarakat Siwa lima (masyarakat luas) itu dibentuklah suatu Dewan Adat yang dipimpin oleh Raja selaku Hakim Adat (Hakim Pendamai) beserta suatu Staff Pembantunya . (Dewan Saniri) dalam melaksanakan fungsi pemeliharaan dan pengawasan hak-hak milik dan kewajiban perorangan maupun kelompok kelompok masyarakat itu. Staff Pembantu Raja kita kenal dengan istilah Dewan Saniri Negeri. Di dalam Saniri negeri terdapat beberapa Dewan anta-

ra lain Dewan Kewano, Dewan tua-tua adat dan lain sebagainya. Harta milik suatu keluarga diatur dan dijaga secara baik oleh Tua adat dalam Rumah Tau (Kepala Dati atau Kepala Pustaka dari suatu keluarga). Dalam bentuk pelapisan masyarakat luas diatur pula ketentuan-ketentuan tersendiri misalnya suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama sama dalam masyarakat luas dalam arti tolong menolong yang lahir dari dalam batin secara ikhlas tanpa dipaksa dan tanpa mendapatkan imbalan disebut "gotong royong" (tolong menolong dalam suka duka). Ini sering diatur dalam suatu Perkumpulan atau Perhimpunan Tolong Menolong (Gotong Royong).

Bila dalam pekerjaan tolong menolong itu diberikan imbalan atau upah berupa uang atau sedikit dari penghasilan ataupun makanan disebut Maschi.

Perbuatan tolong menolong dalam kekerabatan antara 2 negeri atau lebih disebut Pela (Pela perang, Pela tempat sirih, Pela Rumah Ibadah, Pela Kawin/Nona, Pela Batu Karang dan lain-sebagainya).

Baik gotong royong, Maschi maupun pela dalam kekerabatan hukum adat adat terkecil sampai yang besar di Maluku ini tunduk kepada hukum pelapisan sosial/adat dan berada di bawah suatu pola kepemimpinan lokal yang turun-temurun. Hal ini menunjukkan sifat disiplin kekerabatan, penghormatan terhadap orang tua, Pemimpin masyarakat, Raja/Sultan yang telah ditetapkan secara tradisi lisan oleh leluhur atau nenek moyang suku Maluku awal (Ternate dan Tidore) di abad 14.

Dalam hal kepemimpinan masyarakat diatur secara turun temurun, dan masih saja berlaku di Maluku sampai sekarang, terutama di Maluku Tenggara sangat utuh dan dipertahankan karena takut terhadap hukum adat yaitu mendapat hukuman dari leluhur/datuk datuk mereka.

Di Maluku Utara dan Tengah sudah mulai berubah. Semenjak kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yaitu Kesultanan sudah mulai dihilangkan dan Raja tidak selalu dipilih menurut ke-

turunan. 1 "

Peranan kekeluargaan ini ditingkatkan kepada sesama keluarga, sesama negeri, sesama pulau dan akhirnya sesama suku yang masih keras sekali dan merupakan suatu identitas kesukuan. Begitu akrabnya kekerabatan ini di Maluku, maka biar berjauhan tempat tinggal masyarakatnya (anak adatnya), tetapi perasaan satu keluarga tetap terbenam/mendarah daging di dalam tubuh jiwa raganya. Semua ini disebabkan karena sejak kecil seorang anak adat sudah dididik mengenal/mengetahui hubungan hubungan keluarga dalam pelapisan masyarakat menurut garis ayah maupun garis ibu, family, negeri, pulau, daerah, dan sebagainya.

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan terjadi penyerbuan secara serentak di Senen, Kramat Raya pada beberapa waktu lampau itu disebabkan karena masyarakat Maluku terlalu peka terhadap kekerabatan adat yang merasa bersatu kalau menemukan kesulitan maupun kesenangan.

Orang Maluku berani mati bila keluarganya dihina atau disiksa oleh orang lain sudah menjadi tradisi lisan sejak dahulu.

Namun kadang-kadang mereka sendiri saling berperang karena keamanan petuwanan (batasan wilayah kerajaan mereka) diambil orang negeri lain atau perluasan wilayah kekuasaan atas teritorial suatu kerajaan melanggar teritorial kerajaan (negeri) lain.⁶⁾

Jadi pelapisan-pelapisan sosial di Ternate dan Tidore sejak abad ke XIV menyangkut hak-hak petuwanan (pemilikan tanah) maupun menyangkut masalah-masalah sosial lainnya sudah diatur sejak dahulu menurut norma atau nilai tertentu.

Khusus mengenai hak-hak pemilikan tanah pada zaman Belanda, ⁱⁿⁱ didaftarkan dalam Register register Hak Milik Dati maupun Pusaka. Mengenai hal ini dapat ditemukan pada tulisan Rumphius, yang berjudul Ambonsche Landsbeschrijving, Dagregister dan register yang diterbitkan di Casteel Batavia, maupun Register Dati/Pusaka yang dibuat secara lokal.

Kita kenal Register Register tahun 1823, 1868, 1923. Pencacahan jiwa dan lain sebagainya di Ternate, Tidore maupun di Daerah Maluku umumnya adalah tidak lain suatu usaha pengaturan menurut struktur sosial masyarakat.

Apabila suatu persoalan di dalam tak dapat diselesaikan secara adat barulah ditingkatkan ke lembaga hukum tertulis (Landraad = Pengadilan Negeri).

3. POLA KEPEMIMPINAN LOKAL

a. Sebelum masuknya Islam

Jauh sebelum masuknya Islam di Kerajaan Ternate dan Tidore (abad 1 - 15), yang memegang tampuk pimpinan tertinggi adalah Raja (Kolano = Maloko = Boldan).¹⁾

Dari sumber tertua (kronik/Hikayat Ternate yang ditulis Naidah maupun Hikayat Bacan dan Gedenschrift Marasacoli oleh Valentin dapatlah kita temukan pola Kepemimpinan lokal ini bukan saja di Ternate, Tidore, tetapi juga di Bacan dan Jailolo, (Maluku Awal).²⁾ Rupanya keempat kerajaan ini tumbuh dan berkembang dalam suatu waktu yang bersamaan dan saling berebutan pengaruh (saling menaklukkan) sehingga dari sumber Naidah Van Ternate dikatakan Ternate yang paling unggul dari 3 kerajaan yang lainnya. Begitu juga dikatakan Tidore selaku kerajaan kedua yang berpengaruh, tetapi akhirnya tunduk dan mengakui Raja Ternate. Dari Hikayat Bacan kita temukan bahwa Bacan yang paling berpengaruh, tetapi kemudian tunduk di bawah Kerajaan Ternate. Begitu pula ada yang mengatakan Jailolo yang paling unggul tetapi ternyata akhirnya tunduk di bawah Ternate dan Tidore. Jelas terjadilah pertarungan dan penonjolan pengaruh merebut kepemimpinan. Jelas yang unggul adalah kerajaan Ternate. Itulah sebabnya pada 4 kerajaan (Maloko awal ini) kita temukan yang mula-mula memegang tampuk pimpinan disebut Raja (Kolano) Maloko Ternate, Kolano/Maloko Tidore, Kolano/Maloko Bacan dan Kolano/Maloko Jailolo. Sebutan Kolano (Maloko) sama

juga dengan Boldan. Jelas dari sumber-sumber tertua ini kita ketahui yang paling berpengaruh di antara 4 kerajaan (Maloko awal) ini adalah Kerajaan Ternate dan Tidore, di abad ke XIV. Begitu luasnya pengaruh kerajaan Ternate dan Tidore sehingga hampir sulit untuk melaksanakan Pemerintahan di Daerah takluknya.

Dari sumber-sumber tadi dikatakan pengaruh kerajaan Ternate meliputi sebagian besar Wilayah Kepulauan Maluku, Sulawesi (kecuali Bugis dan Makasar), Palu, Buton Muna, Mandar - Kenda, Sangihe Talaud sampai ke Pulau Mangindanao, sebagian Kalimantan Selatan dan Tengah, Nusa Tenggara Timur (Flores, Solor dan Bali).³⁾

Dikatakan bahwa kerajaan Ternate ini pada abad 14 menguasai 72 buah pulau yang membentang antara Mindanao di sebelah utara sampai di Bima dan Corea (Sumbawa) di selatan, Irian di sebelah timur dan P. Matheo (Sulawesi) di barat.⁴⁾

Kerajaan Tidore menguasai sebahagian kecil wilayah Kepulauan Maluku, pantai utara dan barat daya Irian Barat (Irian Jaya).⁵⁾

Menurut Letnan Jenderal Ali Murtopo, Menteri Penerangan R.I., pengaruh kerajaan/kesultanan Ternate ini malah sampai ke Kepulauan Hawaii. Menurut beliau di sana ia menemukan keturunan Sultan Suleiman (Ternate) yang kini menjadi Raja yang terkenal di Hawaii sekarang yaitu King of Kamchameha.⁶⁾

Pada abad ke XIV Pimpinan kerajaan baik di Ternate maupun di Tidore berada pada Raja.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan Raja dibantu oleh suatu Dewan executif antara lain:

- a. Yogugu (Wakil Raja)
- b. Kapita Lao (Panglima Armada)
- c. Hukom (Ketua Pengadilan Tinggi = Kehakiman).⁷⁾

Untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Pemerintahan Kerajaan, terdapatlah suatu Lembaga tertinggi Kerajaan (Lembaga Legislatif) yaitu Dewa Soa Siwa. Dewan Soa Siwa ini berhak mengangkat dan memberhentikan Raja, mengesahkan Undang-Undang dan

Keputusan-Keputusan yang dibuat oleh Raja maupun 3 Pejabat tinggi (Dewan executif) tadi. Selain itu Dewan Sora Siwa ini menentukan arah dan tujuan Kerajaan.

Pemerintahan di Daerah (distrik distrik) dipimpin oleh seorang "Sangaji".

Pemerintahan pada negeri/hena/~~hena~~ dipimpin oleh "Orang Kaya". Pemerintahan pada Daerah pengaruh (Daerah Takluk) dipimpin oleh "Gimelaha" (Duta Besar yang berkuasa penuh selaku Wakil Raja di Daerah takluk), selaku seorang "Kepala Daerah".⁸⁾

Oleh karena begitu luasnya pelapisan pelapisan sosial yang takluk di bawah Raja Ternate dan Tidore akibat perkembangan sosial, politik dan ekonomi maka di dalam masyarakat terjadilah pengelompokan beberapa negeri/Hena (Aman) ke dalam suatu persekutuan sosial yang agak luas yang diberi nama Uli. Untuk membedakan Uli yang berada di bawah Raja Ternate atau Raja Tidore baik dalam Wilayah Kerajaan maupun Daerah takluk, maka kita kenal Uli Lima dan Uli Siwa.⁹⁾

Perkembangan Uli Lima dan Uli Siwa ini meliputi seluruh Wilayah Kepulauan Maluku dan Irian Barat. Di daerah Maluku Tengah (Buru, Seram, Ambon Lease, Banda dan Teon Nila Serua) dikenal dengan istilah Pata Lima dan Pata Siwa. Di daerah Maluku Tenggara dan Irian Jaya dikenal dengan nama Lor Lim dan Ur-Siu.¹⁰⁾

Walaupun namanya berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Dengan demikian Persekutuan Sosial yang disebut Uli/Pata/Lor atau Ur ini sudah ada sejak dahulu (abad 1 - 15) di bawah Raja Ternate dan Tidore.

Di dalam Bidang Keagamaan dikenal penyembahan kepada kekuatan kekuatan alam (animisme dan dinamisme) kemudian berkembang menjadi Agama Nitu.¹¹⁾ Menurut Dr. Abineno dalam tulisannya "Sejarah Pendidikan Kristen di Indonesia", dikatakan jauh sebelum masuknya Islam dan Kristen di Maluku, masyarakat Maluku memeluk agama Nitu (yaitu kepercayaan kepada nenek moyang, Rumah Tau atau Matarumah).

Di Maluku Utara (Ternate) dikenal dengan nama "Gomonga", sa-

ngot ditakuti oleh masyarakat, karena mempunyai 3 bentuk roh jahat yaitu Hatemadubo yang mendiami pohon-pohon, Meiki, mendiami gunung-gunung, Goda mendiami Gua-gua (liang-liang). Tiga roh jahat ini disetir oleh Gikirimoi (Gikiri artinya pribadi dan Moi artinya satu). Gikirimoi artinya satu kepribadian tertinggi, yang disamakan dengan Tuhan. Tuhan menyerahkan kuasa kepada nenek moyang (manusia pertama) yang disebut Gomanga tadi. Di Tidore masyarakat mengenal roh tertinggi adalah Jou Wonge artinya yang "ajib". Jou Wonge kemudian menurunkan kekuatannya kepada Momale (manusia awal). Jou Wonge ini sangat ditakuti dan dihormati oleh orang Tidore. Penyembahan mereka kepadanya lewat Momale itu.

Di Maluku Tengah (Buru, Seram, Ambon Lease, Banda) Tuhan dikenal sebagai Upu Lamite atau Upu Umi.¹²⁾ Penyembahan terhadap Upu Lamite dan atau Upu Umi itu dilakukan melalui kakek-nenek moyang (Rumah Tau) itu.

Di Maluku Tenggara kepercayaan kepada animisme disebut Nu-mat dan kepercayaan kepada dinamisme disebut Wadar Metu.

Kepercayaan ini berkembang menjadi kepercayaan kepada Nit Fayaut (arwah nenek moyang) dan kepada Far-Wakat yaitu roh-roh yang masih hidup.

Dari sudut Seni Budaya, masyarakat Kerajaan Ternate dan Tidore di abad 14 mengenal Cawat (pakaian yang dibuat dari kulit kayu. Seluruh masyarakat Maluku mengenal cawat ini.

Kemudian berkembang motif-motif hiasan pada barang anyaman, lukisan lukisan dan bahan tembikar. Seni gambar, seni anyaman, seni pahat, seni ukir, seni bangunan, seni suara, seni tari sudah berkembang sejak dahulu (abad ke I - XV) hanya dalam bentuk berbeda.

Sebagai contoh dapat diberikan misalnya seni tari di Ternate, Tidore misalnya:

1. Tari Tuala Hulo -- motifnya menghormati Raja
2. Tari Cakalele -- " tari perang
3. Tari Lala -- " tari nasehat/agam.

- | | | | |
|-------------------|----|----------|-----------------------|
| 4. Tari Moro-moro | -- | motifnya | tari hiburan |
| 5. Tari Kabata | -- | " | tari hiburan dan adat |
| 6. Tari Tide-Tide | -- | " | menghormati tamu |
| 7. Tari Ronggeng | -- | " | tari pergaulan |

Di Maluku Tengah:

- | | | | |
|-----------------------|----|----------|-------------------------------|
| 1. Tari Somba Upu | -- | motifnya | tari Penghormatan kepada Raja |
| 2. Tari Maku Maku | -- | " | tari Pergaulan |
| 3. Tari Cakalele | -- | " | tari Perang |
| 4. Tari Lenso | -- | " | tari Pergaulan |
| 5. Tari Horlapeip | -- | " | tari pergaulan |
| 6. Tari Maru Maru | -- | " | tari Pergaulan |
| 7. Tari Se-ro | -- | " | tari perekonomian |
| 8. Tari Sagu | | " | tari Perekonomian |
| 9. Tari Pabeh Cengkeh | -- | " | tari Perekonomian |
| 10. Tari Sawat | -- | " | tari Pergaulan |

Di Maluku Tenggara:

- | | | | |
|-------------------|----|----------|-------------------------------|
| 1. Tari Somba Upu | -- | motifnya | Penghormatan kepada Raja |
| 2. Tari Panah | -- | " | tari Perang |
| 3. Tari Cakalele | -- | " | tari Perang |
| 4. Tari Ular | -- | " | tari penghormatan kepada tamu |
| 5. Tari Sawat | -- | " | tari Pergaulan |

Dari segi seni budaya kita dapat melihat ada beberapa daerah culturil di Maluku yaitu culturil Ternate, Tidore (Maluku Utara), culturil Maluku Tengah dan culturil Maluku Tenggara. Hal ini dapat dipahami sesuai letak geografisnya yang saling terpisah dan berjauhan akibat luasnya Lautan yang memisahkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Dengan demikian tidak mustahil kalau di Maluku sendiri kita jumpai sekian banyak Bahasa tanah (Bahasa Daerah setempat), kesenian dan ber-corak ragam adat-istiadat menurut sistem pelapisan sosial yang digerakkan oleh Raja (Kolano) Ternate dan Tidore, Baen, Jailolo (Maluku Utara), Raja-Raja di Maluku Tengah (Raja Iha Hitu, Hoamual, Banda), dan Raja-Raja di Maluku Tenggara (Raja Ohoiwuru) selaku peletak dasar kebudayaan. Itulah sebabnya

di Maluku kita temukan 3 Wilayah kulturil yaitu:

- a. Kulturil Maluku Utara
- b. Kulturil Maluku Tengah
- c. Kulturil Maluku Tenggara.¹³⁾

b. Masuknya Islam

Agama Islam masuk ke kerajaan Ternate dan Tidore pada XIV - XV. Dari Kronik Ternate dan Kronik Bacan maupun ceritera-ceritera rakyat dikatakan Jafar Sedek, seorang Arab yang datang dengan pedagang-pedagang Islam (keturunan Nabi Muhammad) disertai mubalig-mubalighnya dianggap sebagai peletak dasar dan pembaharuan Kesultanan Ternate dan menurunkan Sultan-Sultan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Sejak masuknya Islam ke Ternate, Kerajaan dirobah menjadi Kesultanan. Istilah Raja (Kolano/Maloko/Boldan) dirobah menjadi Sultan.¹⁴⁾

Jafar Sedek kawin dengan Nursafah (puteri dari kayangan Ternate) menghasilkan 8 orang putera-puteri, yaitu 4 orang putera dan 4 orang puteri. Empat putera inilah yang menjadi Sultan-Sultan pertama menggantikan 4 Raja-Raja di Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo, yaitu:

1. Masyhur Malamo : Sultan I di Ternate
2. Sehajati : Sultan I di Tidore
3. Halil Buqa : Sultan I di Bacan
4. Darajati : Sultan I di Jailolo

Dari catatan-catatan sejarah di Ternate dan Tidore terdapat Sultan-Sultan yang memerintah Ternate sejak Sultan pertama Masyhur Malamo sampai Sultan terakhir Sultan Iskandar Muhammad Jabir (dinobatkan tahun 1930) ada 44 orang sultan, di **Tidore** sejak Sultan pertama Sehajati sampai Sultan terakhir Zainal Abidin Alting (diangkat di Denpasar 14-12-1946 dan dinobatkan di Tidore 27-2-1947 atau 26 Rabiulawal 1366 H.) ada 35 orang Sultan.¹⁵⁾

Sultan Jailolo pertama Sultan Darajati sampai Sultan terakhir Talobuddin ada 16 orang Sultan.

Dengan masuknya agama Islam membawa banyak perubahan dalam struktur masyarakat yang sudah ada sejak awal (abad I - XV) itu, disesuaikan dengan kehidupan keagamaan Islam itu. Sebelum datangnya Jafar Sedek (ayah dari 4 Sultan Maluku di atas) yang dianggap sebagai tokoh pembaharu dan peletak dasar masyarakat Kraton dan Kesultanan, masyarakat telah mengenal pola kepemimpinan kerajaan (Kolano/Maloko/ Boldan) yaitu Gape, Duko, Seke, Tuanane, Kolano merupakan pimpinan tertinggi, di bawahnya kepala-kepala suku (Hena/Aman/negeri), sesudah itu tua-tua adat dan akhirnya lapisan bawah (rakyat biasa). Sistem pelapisan ini kemudian dirobah Jafar Sedek, Kolano diubah menjadi Sultan, di bawahnya terdapat aparat Pemerintahan yang disebut Yogugu, Kapitahao, Hukum Soa Siu, Hukum Sangaji, Tulilimo.

Aparat Pemerintahan itu dibantu oleh Dewan Legislatif yaitu Bobato 18 artinya Dewan ini mempunyai 18 orang Anggota yang terdiri dari para Gimelaha, Fanyira dan Sangaji. Anggota-anggota Aparat Pemerintahan ini semuanya dari Bangsawanan. Sesudah itu terdapat Bala (rakyat biasa). Sistem ini berkembang walaupun pada mulanya terdapat pertentangan pertentangan, karena perubahan nilai-nilai tadi.

Kemudian terdapatlah dalam masyarakat

- Golongan Sangaji (Golongan tertinggi keluarga Sultan dan Bangsawan Kraton)
- Golongan Manyira (Golongan menengah, kaum bangsawan bukan kraton, putera-putera dari selir)
- Golongan Mahimo (golongan terendah dalam masyarakat a.l. pedagang, petani, budak kraton dan bangsawan, serta rakyat dari daerah takluk).

Di samping Sultan terdapat Yogugu (Pembantu Utama Sultan) dari golongan Sangaji. Tugasnya mengatur dan mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan baik dalam bidang pemerintahan, sosial

- Imam Suhodo yaitu Ajudan Pribadi Sultan
- Suwohi, yaitu Protokol Istana.
- Tulolimo yaitu Sekretaris Negara dan istana

Tulolimo dibantu Staff yang dinamakan Soseba Yotuli.

Urusan Perdagangan an dipimpin oleh Syahbandar. Daerah-daerah Kerajaan (distrik) diperintah oleh seorang Sangaji. Para Sangaji memerintah Gumalaha (Kepala desa/negeri).¹⁶⁾

Pada Kerajaan Iha dan Hitu (di Maluku Tengah) tidak terdapat banyak perubahan. Pimpinan tertinggi Kerajaan ada di tangan Upu Latu atau Raja. Di bawah Raja terdapat pemimpin-pemimpin utama yang mengepalai Uli-Uli yaitu Patih, Orang Kaya, Hohuhan, Malige Hukum, Kepala Soa, Dewan Samiri Kerajaan dan Marinyo.¹⁷⁾

Khusus Kepemimpinan dan Pengaturan Pemerintahan Kerajaan IHA di Maluku Tengah sampai masuknya Islam, Pimpinan tertinggi Kerajaan IHA adalah Raja (Upu Latu Sopakua Latu).

Di bawah Raja terdapat Pembantu-Pembantu (Pemimpin Utama) yang mengepalai Uli-Uli yaitu Patih, Orang Kaya, Hahuhan, Malige Hukum, Kepala Soa, Marinyo.

Di samping Pemimpin-pemimpin utama Kerajaan ini dibentuk pula Aparat-aparat Pemerintahan yaitu:

- Badan Samiri Raja Patih
- Badan Samiri Lengkap
- Badan Samiri Besar.

Badan Samiri Raja Patih adalah badan eksekutif yang melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari terdiri dari Raja - Patih - Orang Kaya, Malige Hukum - Hohuhan - Kepala Soa - Kapitan - Latu Kewano - Marinyo.

Badan Samiri Lengkap: Badan ini adalah badan legislatif untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang terdiri dari Raja, Patih, Orang Kaya, Hahuhan, Malige Hukum, Kepala Desa, Tuan Tanah dan Maueng (Pendeta Adat).

Badan Samiri Besar: merupakan Badan tertinggi Kerajaan (sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang anggotanya

anggotanya terdiri dari Badan Saniri Raja Patih, Badan Saniri Lengkap, Kepala-Kepala Rumah Tau dan semua orang laki-laki yang sudah dewasa. Badan ini berhak mengangkat dan menurunkan Raja, Saniri Raja Patih, Saniri Lengkap. Persidangan Badan ini merupakan Demokrasi langsung dan dilakukan setahun sekali atau dalam keadaan mendesak 3 bulan sekali di Bailau (Balai Desa).

Di samping itu terdapat suatu lembaga adat untuk melindungi keamanan dan ketertiban dalam Kerajaan IHA ini, yaitu:

- Kapitan = Panglima Perang
- Malossi = Pembantu Kapitan
- Maueng = Pemimpin upacara adat
- Mantoke = Pembantu Maueng
- Tuan Tanah = Tuan Negeri = Kepala adat (mewakili Raja di dalam hal adat)
- Latu Kewano = Kepala Kewang (Polisi Hutan)
- Marinyo = Pesuruh kerajaan ¹⁸⁾

Di Kerajaan Hitu setelah masuknya Islam kekuasaan tertinggi yang ada pada Raja, berubah menjadi Presidium (kolegial), menjadi 4 Perdana. Sebagai Kepala Pemerintahan ditunjuk salah satu dari 4 orang Perdana itu adalah:

- a. Patih Saelan Binaur atau Zamjadi yang bergelar Toto² hatu dari Tanunu (Seram Barat).
- b. Mulai yang bergelar Tanah Hitumesen berasal dari Tuban (Jawa) yang mendirikan negeri Waipoliti.
- c. Yamilu bergelar Nusatapi (pendamai nusa), seorang yang pernah mendamaikan konflik antara Patih Saelan Binaur dan Mulai.
- d. Patih Lian atau Kiai Patih bergelar Patih Tuban. Semula bergelar Patih Tuha atau Patih Tua.

Di bawah Perdana-Perdana itu ada 7 orang Penggawa:

- Penggawa Siatu di Hitu (Uli Helawan)
- " Latuhelu di Negeri Lima (Uli Nau Binau)
- " Helalatu di Seith (Uli Ala)

- Penggawa Heilesssi di Haitetu (Uli Hutumuku)
- " Titowahitu di Wakal (Uli Sawani)
- " Maatitauen di Hila (Uli Solemata)
- " Pikassao berkedudukan di Tomo (Uli Selooi)

Ketujuh Penggawa ini memerintah 49 gelaran (Gulungan = Orang Kaya) yang mengepalai 49 desa di Tanah Hitu. Tanah Hitu termasuk Uli Lima/Pata Lima (Pengaruh Kerajaan Ternate)).¹⁹⁾

Di Kerajaan Iha terdapat 7 Uli, yaitu:

- Uli Iha diperintah oleh Patih Iha
- Uli Hatala diperintah oleh Hukum Hatala
- Uli Mahu diperintah oleh Malige Mahu
- Uli Matalete diperintah Hahuhan Matalete
- Uli Pia (Tomarala) diperintah oleh Kepala Soa Pia.
- Uli Kulur diperintah oleh Patih Oelu (Kulur) disebut Patih Oeku.
- Uli Hatulesidiperintah oleh Orang Kaya Hatulesi.¹⁹⁾

Tujuh Uli ini diperintah oleh ketujuh orang Patih/Malige Hukum/Orang Kaya Hahuhan/ Kepala Soa yang memerintah 49 Hona (Aman = Negeri kecil) di dalam Wilayah Kerajaan Iha itu.

Masing-masing Uli meliputi 7 negeri, maka Kerajaan Iha ini termasuk kelompok Pata Lima/Uli Lima, artinya takluk di bawah pengaruh Ternate. Penyatuan ini terdapat pula di Kerajaan Alaka di bawah Tidore, dan Hoamual, Banda di bawah Ternate, Pantai Utara dan Barat daya Irian Barat (Irian Jaya) di bawah Tidore.

Di daerah Maluku Tenggara, terjadi juga perubahan-perubahan setelah masuknya Islam, khususnya di Kepulauan Kei. Persekutuan persekutuan sosial yang telah ada yaitu Ohoiratun (negeri) yang dikepalai oleh seorang pemimpin yang disebut Hallai. Beberapa negeri (ohoiratun) bergabung dalam "Lor" dan "Ur" -- (Lor Lim dan Ur Siu), atau Uli Lima dan Uli Siwa. Pemimpin Ur disebut Rat (Raja). Pemimpin Lor disebut Raja Lor Lim (Uli Lima = Pata Lima) terdiri dari:

- Tuble (Raja Negeri Tual)
- Marbadan (Raja negeri Tetoat)
- Ibes (Raja negeri Nerong)
- Banaf (Raja negeri Fer)
- Songli (Raja negeri Rumat)
- Kinkes (Raja negeri Ibra)

Pengaruh kerajaan Ternate.

Ur Siu (Uli Siwa = Patasiwa) terdiri dari:

- Amuhu (Raja negeri Danar)
- Sakelas (Raja negeri Wain)
- Baldu (Raja negeri Dullah)
- Wahadat (Raja negeri Ohoitahait)
- Katel (Raja negeri Ohoimangan)
- Ekkel (Raja negeri Yantel)
- Bosman Somlain (Raja Watlaar)
- Bentar (Raja negeri Ohoilimwat)²¹⁾

4. PEMUTUP

Dengan masuknya Agama Islam di Ternate-Tidore dalam abad XIV - XV maka terjadilah perubahan dalam pelapisan sosial maupun Pola Kepemimpinan Lokal, maka terjadilah kontak pelapisan sosial maupun kepemimpinan lokal yang erat antara Ternate-Tidore (Maluku) dan Jawa. Bahkan terjadi pula kaitan hubungan internasional (Ternate-Tidore - Jawa, Sumatera - Malaka, India, Persia, Gujarat) dan Eropah.

Hubungan Ternate dan Jawa (Susuhunan Parapen di Giri, di mana banyak orang Jawa dijadikan Imam atau guru-guru agama Islam di Ternate).

Hal ini banyak memperkaya kebudayaan Rohani Ternate pada khususnya dan Maluku umumnya. Ajaran-ajaran agama Islam yang memasuki daerah Maluku berarti pula sedikit banyaknya memperkaya hukum adat setempat di Indonesia yang justru seringkali unsur-unsur hukum Islam ini bergandengan dengan hukum adat seperti di Aceh, Melayu, Jawa, Sulawesi, dan lain-

sebagainya.

Sejalan dengan perkembangan Islam itu sendiri, Bahasa dan Huruf Arab sudah tentu memasuki juga Daerah Maluku dan secara perlahan-lahan dipakai oleh Sultan-Sultan/Raja-Raja di daerah Maluku. Kaum bangsawan maupun penduduk Maluku yang menjadi penganut Islam dan tentunya memperkaya perbendaharaan bahasa Melayu dan Bahasa daerah (Ternate-Tidore) serta mempengaruhi nilai-nilai sosial yang sejak purba telah ada di sini.

Jadi jika dilihat dari sudut Kebudayaan maka Maluku dengan pusatnya Ternate di abad XIV merupakan salah satu daerah yang turut serta bersama-sama daerah-daerah yang dikuasai Islam lainnya berperan di peron Nasional membentuk periode kebudayaan yang bercorak Islam di Indonesia. Demikian pula kontak antara kerajaan Iha di Maluku Tengah dengan Aceh di dalam hal masuk dan berkembangnya agama Islam di Kerajaan Iha sangat memperkaya kebudayaan kerohanian Iha, dan memunculkan perskutuan erat antara Iha - Aceh - Banten (Jawa) antara Masjid Raya Malakey - Masjid Baiturrachman dan Masjid Agung.

Demikianlah kira-kira garis besarnya peran serta Kerajaan Ternate-Tidore di abad ke XIV di atas pentas Sejarah Lokal Bumi Persada Indonesia. Dari uraian garis besar tersebut di atas ternyata jelas masih banyak problema yang kita hadapi untuk penulisan Sejarah Lokal yang harus kita teliti berdasarkan sumber-sumber detail dari Daerah, Arsip-arsip Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris, Perancis, maupun dari negara-negara Arab dan negara Islam lainnya yang berhubungan dengan daerah Maluku.

Mudah-mudahan Seminar Sejarah lokal ini dapat menghasilkan penulisan Sejarah Lokal maupun Sejarah Nasional yang bersifat ilmiah sekaligus menjadi Pedoman kita sebagai Bangsa yang berBhinneka Tunggal Ika, berkebudayaan Pancasila di atas landasan Undang-Undang Dasar '45, bersatu manggurobe maju

"Lawamena Haulala".

Denpasar, 1 September 1982

Drs. Frans Hitipeuw

DAFTAR CATATAN KAKI

1. PENDAHULUAN

- 1) Naidah Van Ternate, diterjemahkan dan diberikan Catatan oleh P. Van der Crab dalam Bijdragen tot de taal-, land- en Volkenkunde Van Ned. Indie, IV, volcreeks, 2de deel, 's Gravenhage, BKI 1878, halaman 382.
- 2) P. Van der Crab, De Moluksche eilanden, Reis Van Z.E. den G.G. Charles Ferdinand Pahud door de Moluksche Archipel, Batavia, 1862, halaman 293 dan seterusnya.
- 3) Van der Crab, Naidah van Ternate, op.cit., halaman 3.
- 4) Coolhaas, W.P.H., Kronik Van het rijk Bacan, T.B.G., 1929.
- 5) Valentijn, Francois, Oud en Nieuw Oost Indies, I, Amsterdam, 1727, halaman 3.
- 6) -----, Oud en Nieuw Oost Indie, met aantekeningen, volledige inhoudregister diterbitkan oleh Dr..S. Keyzer, II, deel, 's Gravenhage, 1858, halaman 183.
- 7) De Graaf, H.J., Dr. Oud Lector aan de Universiteit Van Indonesie in de nieuwere geschiedenis der Indonesische Volkeren, Een ^Oude en een nieuwe negorij, Jakarta, 1949.
- 8) Uka Tjandrasasmita, Drs., Peranan dan Sumbangan Islam dalam Sejarah Maluku, Suatu prasaran dalam Seminar "Sejarah Maluku I (Hasil-hasil materi Seminar Sejarah Maluku I), Ambon, 1972, halaman 201.

2. KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PROSES PERTUMBUHAN PELAPISAN-PELAPISAN SOSIAL

- 1) Van der Crab, P.A., Geschiedenis Van Ternate, en Ternateansche en Maleische Tekst, door den Ternateen Naidah, met Vertaaling en aantekeningen door P.A. Van der Crab, B.K.I. 1878.
- 2) Valentijn, Francois, Oud en Nieuw Oost Indien, I, hal. 3
- 3) Leirissa, R.Z., Kerajaan Ternate dan stelsel Ekstirpasi, Jakarta, 1965, hal. 1.

- 4) Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Sejarah Daerah Maluku, Jakarta, 1976/1977, hal. 22.
- 5) Coolhaas, W.P.H. Kroniek Van het Rijk Bacan, T.B.G., 1929.

3. POLA KEPEMIMPINAN LOKAL

- 1) Van der Crab, P., De Moluksche eilanden, Reis Van Z.E. den G.G. Charles Ferdinand. Pahud voor de Moluksche Archipel, Batavia, 1862, halaman 293.
- 2) Valentijn Francois, Oud en Nieuw Oost Indie, met aantekeningen Volledige inhoudsregisters, diterbitkan DR.S. Keyzer, II, deel, 's Gravenhage, 1856, halaman 183.
- 3) Kern, R.A., Geschiedenis Van Nederlandsche Indie, halaman 357.
- 4) Wessels, S.J.C. De Geschiedenis der R.K. Missie in Amboina, 1546-1605, Utrecht, 1926, halaman 100.
- 5) Naidah Van Ternate, yang telah diterjemahkan dan diterbitkan oleh P. Van der Crab, Bijdragen tot de taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indie, IV Volgreeks, 2de deel ('s Gravenhage 1878, hal. 383.
- 6) Ali Murtopo, Letnan Jenderal TNI AD, Menteri Pencerangan R.I., Pengalaman saya di Hawai, suatu informasi kepada Panitia Penulisan Film Perang Pattimura, Jakarta, 1980.
- 7) Valentijn, Francois, Oud en Nieuw Oost Indie, diterbitkan DR.S. Keyzer, II, opcit, hal. 191.
- 8) Valentijn, Francois, Oud en Nieuw Oost Indie, Id., hal. 192.
- 9) Naidah Van Ternate, yang telah diterjemahkan P. Van der Crab, opcit, hal. 384.
- 10) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek P.3.K.D. Departemen P. dan K. Jakarta, Sejarah Daerah Maluku, 1976/1977, hal. 48.

- 11) Abinino, Prof. Dr., Sejarah Pendidikan Kristen di Indonesia, hal. 78.
- 12) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek P.3.K.D. Dep. P. dan K. Jakarta, Sejarah Daerah Maluku, 1976/1977, opcit, hal. 40.
- 13) Hitipiew, Frans, Drs. Pahlawan Revolusi Karel Sasuitubun, Proyek I.D.S.N., Dep. P. dan K. Jakarta, 1979/1980, hal. 35.
- 14) Naidah Van Ternate, yang telah diterjemahkan P. Van der Crab, ibid, hal. 383.
- 15) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek P.3.K.D. Dep. P. dan K., Jakarta, Sejarah Daerah Maluku, 1976/1977, ibid, halaman 44.
- 16) Valentijn, Francois, Beschrijving Van Amboina, hal. 87. dan seterusnya.
- 17) -----, Beschrijving Van Amboina, opcit, hal. 86.
- 18) Abdul Gawi Latukaisupi, Catatan dan Gambar Struktur Pemerintahan dan penasturan Masyarakat Kerajaan IHA sejak Purba, Iha, Seram Barat, 1966.
- 19) -----, Beschrijving Van Amboina, ibid, hal. 96-98.
- 20) -----, Beschrijving Van Amboina, Loccit, hal. 86.
- 21) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek P.3.K.D. Dep. P. dan K., Jakarta, Sejarah Daerah Maluku, 1976/1977, loc.cit, halaman 48 - 50.

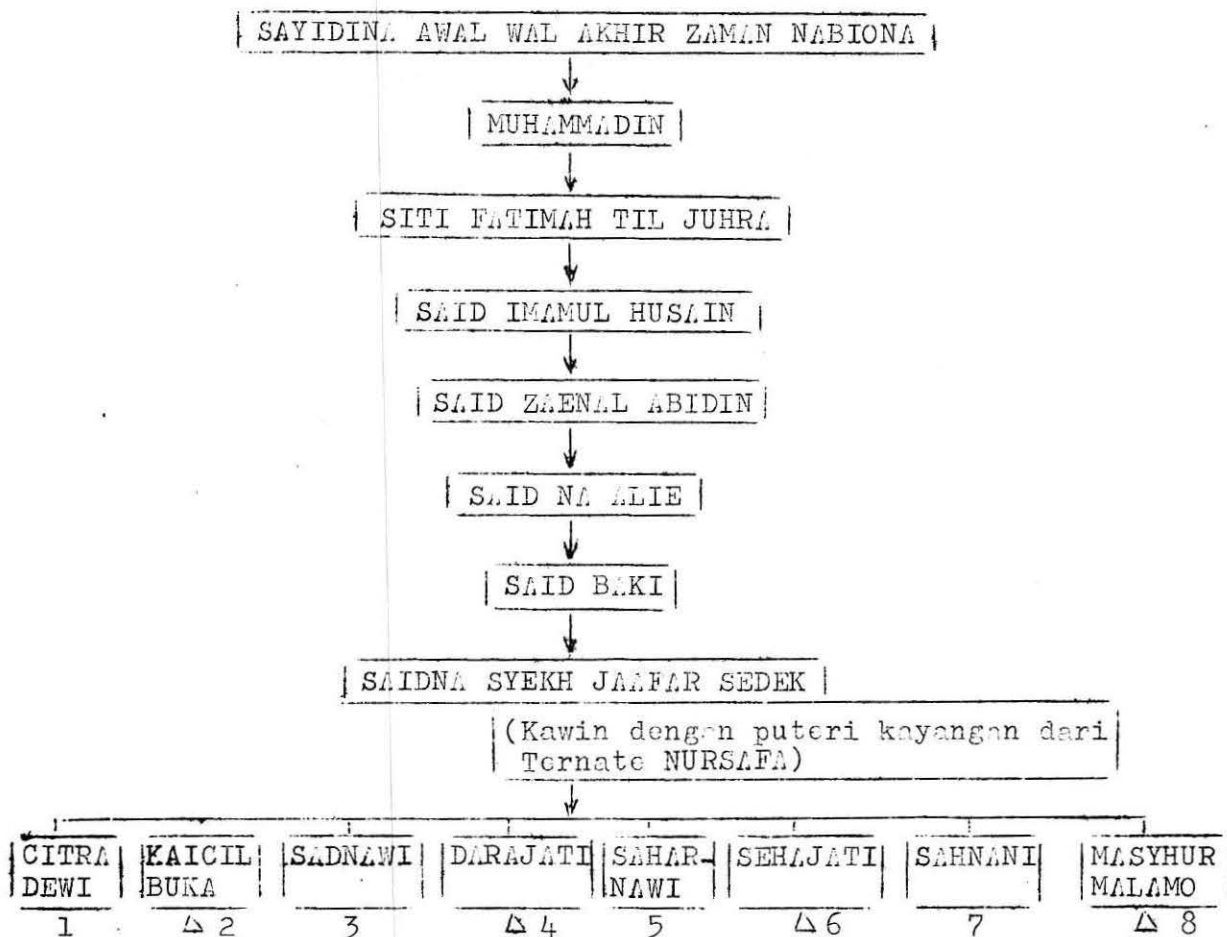
DAFTAR SUMBER

1. Abdullah, Taufiq, Dr., Ke arah penulisan Sejarah Sosial Daerah, Proyek IDSN, Ditsenitra, Departemen P. dan K., Jakarta, 1982/1983.
2. Abirino, Prof. Dr., Sejarah Pendidikan Kristen di Indonesia, Jakarta, 1980.
3. Ali Moertopo, Menteri Penerangan R.I., Wawancara dengan Panitia Penulisan Sejarah Film Perang Pattimura, Jakarta, 1980.
4. Budhisantoso, S., Dr., Arti pentingnya Sejarah Masyarakat Dalam Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional, Proyek IDSN, Ditsenitra, Departemen P. dan K., Jakarta, 1982/1983.
5. Bleeker, F., Reis door de Minahasa en de Molukschen Archipel, gedaan in de maanden September en October, 1855, in het gevolg Van den Gouverneur Generaal Mr. A.J. Duymaer Van Twist, tweede deel, Batavia, 1856.
6. Clerq, F, S, A, de, Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate, 1890.
7. Coolhaas, W.P.H., Kroniek Van het Rijk Bacan, T.B.G., 1929.
8. Cense, A.A., Enige aantekeningen over Makassaars Boeginese geschiedschrijving (Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, deel 107, 1951).
9. Graaf, H.J. de, Dr., Oud Lector aan de Universiteit Van Indonesie in de Nieuwere Geschiedenis der Indonesische Volkeren, Een Oude en een Nieuwe Negerij, Jakarta, 1949.
10. Hitipeuw, Frans, Drs., Cengkeh dan Fala membawa Berkah dan Bencana Bagi Daerah dan Rakyat Maluku, Hasil-hasil Materi Seminar Sejarah Maluku I, Ambon, 1972.
11. Hitipeuw, Frans, Drs., Karel Sasuitubun, Proyek IDSN, Ditsenitra, Departemen P. dan K. Jakarta, 1981/1982.

12. Heeres, J.E. Mr., Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum, Hoogleraar aan de Rijks Universiteit te Leiden Bagian I 1596-1650 (Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde Van Ned. Indie serie ke 7, jilid III, 1907.
13. Kern, R.A., Geschiedenis Van Nederlandsche Indie.
14. Leirissa, R.Z., Kerajaan Ternate dan Stelsel Ekstirpasi, Jakarta, 1965.
15. Tatukaisupy, Abdulgawi, Catatan dan Gambar Struktur Pemerintahan dan Pelapisan Masyarakat Iha, 1966.
16. Naidah Van Ternate, diterjemahkan dan diterbitkan oleh P. Van der Crab dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde Van Ned. Indie, IV Volgreeks, 2de deel, 's Gravenhage, BKI, 1878.
17. Manusama, Z.J., Dr., Sekelumit Sejarah Tanah Hitu dan Nusaulaut serta Struktur Pemerintahnya sampai Pertengahan Abad ketujuhbelas, Bunga Rampai Sejarah Maluku I, Jakarta, 1969.
18. -----, Satu Setengah Abad Pemerintahan Adat di Tanah Hitu, Hasil-Hasil Materi Seminar Sejarah Maluku I, Ambon, 1972.
19. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Sejarah Daerah Maluku, Jakarta, 1976/1977.
20. Rumphius, G.E., De Ambonsche Historie, BKI, 1910, dua jilid.
21. Valentijn, François, Oud en Nieuw Oost Indien, jilid I dan II diterbitkan di Dortrecht, Amsterdam, antara tahun 1724 - 1727.
22. -----, Beschrijving Van Amboina.
23. Van der Crab, P., De Moluksche Eilanden, Reis Van Z.E. dan G.G. Charles Ferdinand Pahud door de Moluksche Archipel, Batavia, 1862.
24. -----, Naidah Van Ternate, diterjemahkan dan diberi catatan dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde Van Ned. Indie, IV Volgreeks, 2de deel, 's Gravenhage, BKI, 1878.

25. Uka, Tjandrasasmita, Drs., Peranandan Sumbangan Islam dalam Sejarah Maluku, Hasil-hasil Materi Seminar Sejarah Maluku I, Ambon, 1972.
26. Wessels, S.J.C., De Geschiedenis der R.K. Missie in Amboina, 1546-1605, Utrecht, 1926.

GAMBAR SILSILAH AWAL SULTAN-SULTAN
TERNATE, TIDORE, BACAN DAN JAILOLO



KETERANGAN: Putera ke 2 Kaicil Buka = Sultan Bacan I
 Δ Putera ke 4 Danayati = Sultan Jailolo I
 Putera ke 6 Sehajati = Sultan Tidore I
 Putera ke 8 Masyhur Malamo = Sultan Ternate I
 Putera ke 1, 3, 5, 7 adalah puteri-puteri Saidna Syekh Jaafer Sedek.

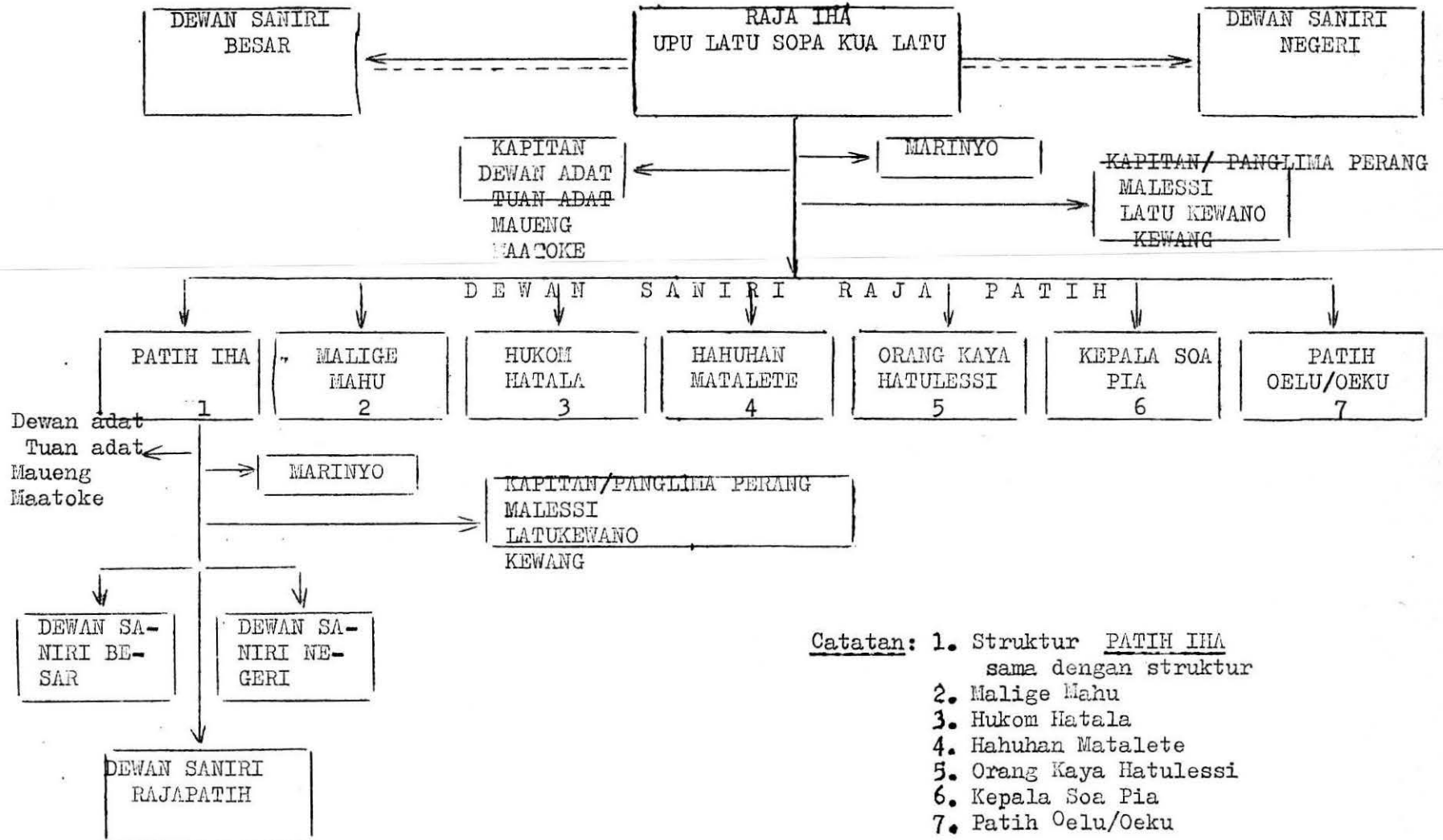
DAFTAR NAMA NAMA SULTAN TERNATE
DAN TAHUN PEMERINTAHANNYA DI TERNATE

1. SULTAN MASYHUR MALAMO (memerintah tahun 1500-1535).
2. SULTAN HAIRUN (memerintah tahun 1535-1570).
3. SULTAN BABULLAH (memerintah tahun 1570-1584).
4. SULTAN SARVEDIA (memerintah tahun 1584-1606).
(BERKAT)
5. SULTAN MODAFFAR (memerintah tahun 1606-1610).
(Diwakili pamannya Pangoran Hidayat Tomagala). Sultan Modaffar sendiri baru memerintah 1611-1627.
6. SULTAN HAMZAH
(Aaja al Mukminan/Hamzah : Barpiun Alamilah Syah) memerintah 1627-1648.
7. SULTAN MANDARSYAH (memerintah tahun 1648-1675)
8. SULTAN AMSTERDAMSYAH (memerintah 1675-1681)
(KAICIL SIBORI). Tidak punya turunan diganti adiknya (memerintah tahun 1681-1692).
9. SULTAN SAID FATCHULLAH (memerintah tahun 1692 sampai tahun.... kurang jelas).
(Putera SULTAN MANDARSYAH)
10. SULTAN RAJA LAUT, putera dari SULTAN FATCHULLAH.
Pemerintahan diteruskan oleh puteranya yang tertua.
11. SULTAN OUDSHOORN.
Walaupun mempunyai putera, tetapi dia diganti Saudaranya.
12. SULTAN SAH MARDAN (memerintah kurang jelas tahunnya).
Tidak mempunyai putera, diganti oleh adiknya.
13. SULTAN ZWAARDEKROON, kemudian diganti adiknya.
14. SULTAN ARUNSYAH atau HINUNSYAH.
Kemudian diganti oleh 4 putera Sultan Raja Laut secara berganti-ganti.
15. SULTAN AKHRAAL, putera Sulung Sultan Arun Syah, Beliau disebut juga Paduka Sri Maha Tuan Sultan Amiri Iskander Malikil Mulkil Mupnawwarah Saiyyidil Muharram Siadh Kecil Putera Akharaal.
Pada bulan Mei 1766 beliau ini dituduh bersokutu dengan orang-orang Inggeris melawan Belanda. Sultan ini dibawa ke Batavia dengan kapal laut "De Waker" dibawah perintah Kapten Laut Daniel Van Wamingen pamannya.

16. SULTAN SARKAN, juga disebut Hayyul Arifin Putera Sarkan, putera Sultan Zwaardkroon naik takhta pada tanggal 27 April 1796 dan wafat 1801. Setahun sebelumnya (tahun 1800) kekuasaan diambil oleh Gubernur W.J. Gransen, kemudian diserahkan lagi kepada Sultan yang berikutnya secara berganti-ganti sampai dengan sultan yang terakhir (sebelum Indonesia merdeka) yaitu: Sultan Iskandar Muhammad Jabir yang dinobatkan pada tahun 1930 di Ternate dan meninggal dunia di Jalan Raden Saleh Jakarta belum lama ini.

(MALUKU TENGAH)

DI ABAD KE XIV



Catatan: 1. Struktur PATIH IHA
sama dengan struktur
2. Malige Mahu
3. Hukom Hatala
4. Hahuhan Matalete
5. Orang Kaya Hatulessi
6. Kepala Soa Pia
7. Patih Oelu/Oeku

Seminar Sejarah Lokal

Topik : I

KEPEMIMPINAN DALAM STRUKTUR MASYARAKAT LIO
DI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh :

MUNANDJAR WIDIYATMIKA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
SEMINAR SEJARAH LOKAL

1982

KEPEMIMPINAN DALAM STRUKTUR MASYARAKAT LIO DI NUSA TENGGARA TIMUR

1. Pendahuluan

Pemimpin dalam suatu masyarakat berperan selaras dengan kebutuhan hidup warga masyarakat. Perubahan kebutuhan hidup dan cara hidup suatu masyarakat, sering mempengaruhi pola kepemimpinan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam suatu masyarakat tradisional, pemimpin selalu muncul dari lapisan atas struktur masyarakat yang ada. Dengan kata lain antara struktur masyarakat dan kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat.

Schulte Nordtholt mengungkapkan bahwa antara sistem bertani, sistem kepercayaan dan sistem politik mempunyai saling kaitan erat (Schulte Nordtholt, 1971 : 52). Walaupun pernyataan tersebut ditujukan pada masyarakat Atoni di Timor, nampaknya berlaku umum pula bagi suku-suku di Nusa Tenggara Timur.

Kupasan ini hendak mencoba menelaah hal itu khususnya terhadap suku Lio di Flores Tengah.

2. Struktur Masyarakat Lio

Masyarakat Lio mengenal empat golongan masyarakat. Keempat golongan tersebut yakni : Ata Ria, Ata Tebo Tahu atau Ata Meke, Faiwalo Anakalo dan Ata Koo.

Penggolongan tersebut terutama didasarkan atas kewajiban dan hak atas adat suku yang bersumber kepada kepercayaan nenek moyang. Ata ria merupakan lapisan atas yang terdiri dari pengu-

x) Di Nusa Tenggara Timur terdapat kira-kira 40 suku bangsa dan bahasa, di antaranya terdapat suku Lio yang merupakan salah satu bagian kelompok suku berbahasa Manggarai Riung yang termasuk rumpun bahasa Sumba-Bima. Suku Lio yang berbahasa Lio menghuni Wilayah Kabupaten Ende di Flores yang terdiri dari 5 kecamatan dengan 103 buah desa.

sa adat. Mereka berkewajiban menjaga ketertiban warga suku, menjadi pengantara antara warga dengan arwah nenek moyang dalam upacara, menjaga dan memelihara benda-benda pusaka dan bangunan suci serta melindungi warga suku dari setiap ancaman. Mereka mempunyai hak mengatur harta suku, terutama tanah suku, menerima segala persembahan berupa bahan makanan dan ternak dari warga, menerima segala hasil denda. Golongan kedua yakni Ata Tebe Tahu atau Ata Meke, merupakan orang bebas. Golongan ini bersama dengan golongan rakyat biasa (Faiwalo anakalo) merupakan golongan terbesar. Ata Meke merupakan rakyat yang memiliki kekayaan lebih dibandingkan dengan rakyat biasa. Kedua golongan ini berkewajiban melaksanakan perintah golongan pertama, memberi persembahan dalam rangka upacara kepada golongan pertama. Mereka mempunyai hak menggunakan tanah suku sejalin golongan pertama, mendapat perlindungan dan keamanan serta mendapat pelayanan untuk upacara. Mengapa kedua golongan ini dibedakan tidak begitu jelas. Nampaknya golongan Ata Meke mempunyai kebebasan yang lebih dari golongan Faiwalo anakalo tidak saja karena kekayaannya tetapi juga dari asal usulnya yang masih mempunyai hubungan dekat dengan golongan kedua. Lapisan keempat adalah Ata koo. Golongan ini merupakan budak, yang merupakan rakyat yang kehilangan hak-haknya. Mereka menjadi budak karena tertawan pada waktu perang suku, ataupun melanggar adat yang berat. Golongan ini sebenarnya dewasa ini tidak kentara lagi.

Masyarakat Lio adalah masyarakat yang terdiri dari kesatuan kekeluargaan luas yang dalam istilah sehari-hari disebut suku (sao mero tenda dewa). Setiap sao mero tenda dewa terdiri dari beberapa sao tenda atau embu yang merupakan gabungan keluarga bati yang disebut doka dapu atau kunu one.

Suku-suku tersebut biasanya menghuni satu desa tradisional atau lebih yang disebut nua. Tiap nua terdiri dari beberapa kopo dan tiap kopo terdiri dari beberapa bhisu. Dalam kehidupan masyarakat Lio kepercayaan terhadap arwah nenek moyang menduduki tempat yang sangat penting. Artinya kegiatan dan pola berpikir selalu berorientasi kepada nenek moyang. Kepercayaan kepada arwah

nenek moyang (embu memo bupu babo), berpengaruh pula pada pola tempat kediaman atau nua. Setiap desa tradisional Lio selalu berpola lingkaran. Sebagai pusatnya adalah tubu musu dan lodo nda yakni bangunan suci lambang nenek moyang lelaki dan wanita berupa menhir dan dolmen. Tubu musu dan lodo nda ditempatkan di tengah halaman kampung yang berbentuk lingkaran dan berpagar batu (Hanga). Setiap bangunan rumah diatur berkeliling menghadap hanga dan tubu musu serta lodo nda. Bangunan-bangunan yang ada yakni rumah adat Kedadi samping menghadap tubu musu dan lodo nda harus pula menghadap ke gunung. Desa-desa tradisional biasanya selalu berada di punggung bukit atau lereng gunung. Orientasi ke gunung ini berkaitan pula dengan orientasi arwah nenek moyang. Gunung dianggap sebagai tempat nenek moyang dan asal nenek moyang yang dianggap sumber keberuntungan, ketenteraman dan keselamatan karena dekat dengan nenek moyang dan dilindungi nenek moyang.

3. Kepemimpinan Masyarakat Lio

Kepemimpinan masyarakat Lio bersumber pada adat kepercayaan nenek moyang. Para pemimpin berasal dari golongan Ata rio dalam masyarakat dan terdiri dari tiga jenis. Ketiga jenis pemimpin tersebut adalah Mosalaki, Ria bewa dan Kopo kasa.

Mosalaki berasal dari kata mosu dan laki. Mosu artinya jantan, laki puseran rambut di kepala, orang yang menyatu dengan tanah atau pun rakyat. Mosalaki secara umum berarti pemimpin rakyat. Mosalaki sebenarnya bukan jabatan tunggal tetapi suatu dewan pemerintahan adat yang terdiri dari 7 orang Mosalaki. Mosalaki pertama adalah Mosalaki Puu Ine Ama ana kalo. Mosalaki Puu adalah kepala suku yang berfungsi pula sebagai kepala urusan pemerintahan, hakim, kepala upacara, keamanan dan kesejahteraan; Mosalaki Puu adalah pemimpin tertinggi suku. Dalam melaksanakan kepemimpinan, Mosalaki selalu bermusyawarah. Tetapi keputusan tertinggi terletak di tangan Mosalaki Puu. Mosalaki kedua sampai ke tujuh dalam masyarakat Lio dikenal dalam berbagai istilah. Namun secara umum mereka adalah pembantu pemimpin tertinggi dalam menjalankan perintah.

Mosalaki kedua yakni Mosalaki Wiwiloma yang berfungsi sebagai penghubung antara Mosalaki tertinggi dengan warga suku. Mosalaki kedua dikenal pula dengan istilah Mosalaki Tedo Mulu yang bertugas membantu Mosalaki tertinggi pada waktu melakukan upacara monanam yang pertama. Mosalaki ketiga yakni Mosalaki Heu Uwi, bertugas menyiapkan alat upacara. Mosalaki keempat disebut Mosalaki Sobe Nggebe bertugas mengumpulkan bahan makanan dari rakyat untuk keperluan upacara. Mosalaki kelima Mosalaki Neta Nao bertugas menyiapkan segala tali temali untuk keperluan upacara. Mosalaki keenam Mosalaki Noka Kaju bertugas menabik kayu pertama yang akan dijadikan bahan ramuan rumah adat. Mosalaki ketujuh yang bertugas sebagai pembantu umum. Mosalaki tertinggi disebut Mosalaki Sike Sani. Mosalaki ketiga, keempat dan kelima disebut juga Mosalaki ndu. Mosalaki keenam dikenal pula sebagai Mosalaki Ka padi/duri. Mosalaki ketujuh dikenal pula dengan sebutan Mosalaki Daisingi luga rei yang bertugas menjaga tapal batas tanah puku. Di samping Mosalaki yang dikenal tersebut, di beberapa daerah Lio dikenal pula Mosalaki Paki Tanah bertugas menarik pajak.

Jabatan Mosalaki adalah jabatan yang bersifat turun temurun. Kepemimpinan mereka telah ditentukan secara adat yang telah terpatrit dalam syair adat. Mereka menjalankan kepemimpinan yang telah diwariskan secara turun temurun. Penyimpangan dalam menjalankan kepemimpinan adalah tabu karena melanjar adat nenek moyang.

Di bawah jabatan Mosalaki terdapat jabatan Ria bawa. Pia Bawa adalah pembantu Mosalaki khusus dalam hal menyampaikan perintah kepada warga suku. Di tiap bagian kampung (kopo) terdapat pula pembantu Mosalaki yang otonom di wilayah kopo. Petugas ini adalah kopo/kasa.

Dari jabatan pemimpin yang ada jelaslah bahwa orientasi kepemimpinan ditujukan pada arwah nenek moyang. Artinya para pemimpin menjaga keserasian hubungan antara warga suku dengan arwah nenek moyang melalui serangkaian upacara-upacara. Tugas Mosalaki yang tersirat dalam syair adat disebutkan:

1. Laki inc ama (kepala pemerintahan).
2. Laki dai singi onga engga langi (menjaga tapal batas).
3. Laki susunggua oangga namu bapu (pengurus upacara adat).
4. Ria tanga sepu seru onga ngilo alnunu (pengurus persoalan warga suku).
5. Laki tu tego onga taga mido (pelayan warga).
6. Laki dari gomo onga engga rate (menjaga kubur dan membawa sajian bagi arwah).

Mosalaki yang menjabat seumur hidup dalam memimpin warga suku, kepemimpinan mereka bersifat kharismatik. Kepandaian memimpin diwariskan dari Mosalaki pendahulunya yang digantikan. Para Mosalaki sebelum meninggal, telah menarahkan beberapa calon penggantinya sebagai kader Mosalaki. Para Mosalaki hanya dapat diganti oleh keturunan Mosalaki. Calon pengganti yang diarahkan menjadi kader biasanya ditunjuk berdasarkan alamat petunjuk nenek moyang. Apabila terjadi lowongan jabatan mosalaki, karena Mosalaki yang bersangkutan meninggal, akan dilakukan pemilihan di antara calon yang telah dikaderkan. Pemilihan dilakukan dengan suatu upacara so au yakni membakar buluh/bambu muda sebagai petunjuk (perlambang). Bila buluh muda yang dibakar, pecahnya lurus berarti calon pertama yang diajukan terpilih. Sebaliknya bila pecahan bambu bengkok, harus dipilih calon kedua dengan cara yang sama. Nampaknya pemilihan dengan menggunakan bambu muda terkandung pengertian simbolis. R.H. Barnes dalam Penelitian di Kedang, Flores Timur menemukan bambu sebagai sumbu suku. Ruas bambu dengan buahnya yang disebut matan dan puen yang dari padanya akan dapat tumbuh mata. Mata inilah bila ditanam akan menghasilkan rumpun (R.H. Barnes, 1971 : 37).

Dengan simbol tersebut terkandung pengertian, calon Mosalaki sebagai calon pejabat suku, hendaknya seperti bambu. Dia harus melaksanakan kepemimpinan, berdasarkan kepercayaan nenek moyang. Dengan demikian diharapkan dapat mengayomi warga suku.

Apabila calon Mosalaki telah lulus upacara so au, dilakukan upacara pengolesan darah babi pada dahinya. Pengolesan darah terkandung maksud penyucian dan persumpahan. Bahwa calon pemimpin

haruslah suci, dalam menjalankan kepemimpinan harus menggunakan pemikiran yang bersih dari segala noda. Di kalangan suku-suku di di Nusa Tenggara Timur, upacara penyucian dengan menggunakan unsur darah binatang korban, air dan api adalah lazim.

Upacara selanjutnya adalah pelantikan calon Mosalaki baru di hadapan warga suku yang diakhiri dengan penyerahan benda pusaka (gong, keris, tombak, parang) suku dalam bola nggala (keranjang besar). Dengan demikian calon resmi menjadi pemimpin suku, bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan warga suku. Setelah pelantikan dilanjutkan pesta bersama dan tarian woge (perang).

Pola kepemimpinan tradisional tersebut dalam perkembangan sejarah mengalami beberapa pergeseran.

4. Pergeseran Pola Kepemimpinan

Dalam perkembangan sejarah kepemimpinan masyarakat Lio mengalami beberapa pergeseran. Pergeseran ini terutama oleh dua hal pokok:

4.1. Masuknya agama Roma Katholik di Flores

Para Misionaris Katholik pada tahun 1566 telah mulai kegiatannya di Nusa Tenggara Timur. P. Antonio Taverria O.P. telah mempermendikan 5.000 orang di Timor dan Ende pada tahun 1677 di Nusa Tenggara Timur telah ada 100.000 orang Katholik (Sejarah Gereja Katholik II, 1976 : 237).

Perkembangan ini semakin lancar dengan usaha pembukaan sekolah-sekolah oleh misi. Di Ende sampai tahun 1928 telah ada 35 Volkschool dengan siswa 3.164 orang. Dalam Perkembangannya di wilayah Kabupaten Ende 72% dari penduduknya beragama Katholik (NTE Dalam Angka 1980 : 77). Dengan adanya perkembangan ini sudah barang tentu mempengaruhi pola kepemimpinan masyarakat Lio berdasarkan kepercayaan nenek moyang. Secara formal pendeta/pastor menggantikan kedudukan Mosalaki dalam upacara-upacara keagamaan di gereja. Namun kedudukan Mosalaki tidaklah tergeser seluruhnya. Dalam upa-

cara-upacara pertanian di ladang dan upacara adat Mosalaki tetap berperan. Kenyataan ini disebabkan beberapa hal. Para warga masyarakat yang telah menganut agama Katholik di satu pihak, mereka belum dapat melepaskan kepercayaan nenek moyang. Dengan kata lain nampaknya di satu segi masyarakat tetap berpijak pada kepercayaan nenek moyang, di lain segi berpijak pada ajaran agama Katholik. Hal ini ditunjang pula bahwa agama Katholik toleran terhadap unsur unsur adat dan kepercayaan.

4.2. Campur tangan Pemerintah

Pergeseran sebagai akibat campur tangan pemerintah, dinilai dengan usaha pembentukan desa gaya baru di Nusa Tenggara Timur. Desa-desanya tradisional yang terpisah dan terpencar-pencar ditata dalam wadah desa gaya baru pada tahun 1969. Penataan ini terutama berkaitan dengan penataan administrasi pemerintahan. Secara fisik desa-desanya tetap tidak berubah. Pada tahap awal Kepala desa dan pamong desa diangkat dari unsur pemimpin adat. Namun dirasakan dalam usaha peningkatan ketrampilan pejabat desa, tokoh-tokoh adat ini kurang memenuhi syarat pendidikan. Oleh karena itu diangkat pejabat desa yang berlatar pendidikan cukup. Pada umumnya pejabat pemerintahan desa diangkat dari kalangan keturunan pemimpin tradisional pula.

Dengan demikian peranan pemimpin masyarakat Lio secara tradisional mengalami pengurangan dalam hal urusan pemerintahan dan urusan agama. Walaupun demikian peranan mereka masih sangat besar. Sebab kehidupan penduduk pada pola perladangan berpindah yang bersumber pada pola kepercayaan belum berubah. Di lain segi kepercayaan pada nenek moyang masih tetap melekat.

Dari 103 desa di Ende hanya 20% saja dari penduduknya yang telah melonggarkan ikatan adat dengan upacara-upacaranya (Bangdes Propinsi NTT, 1980, : 49 - 50).

5. Penutup

Dari uraian di atas nampak bahwa pola kepemimpinan masyarakat Lio yang didasarkan pada kepercayaan nenek moyang, berasal dari lapisan atas struktur masyarakat.

Para Mosaleki, sebagai akibat perkembangan jaman telah mengalami beberapa perubahan peran secara formal. Namun peranan mereka masih sangat besar. Oleh karena itu peran mereka dapat dimanfaatkan dalam usaha-usaha pembangunan melalui wadah LMKD yang secara formal telah ada, tetapi aktifitasnya belum nampak. Masalahnya bagaimana mendaya gunakan mereka. Salah satu jawaban tergantung pada pendekatan pemimpin formal desa.

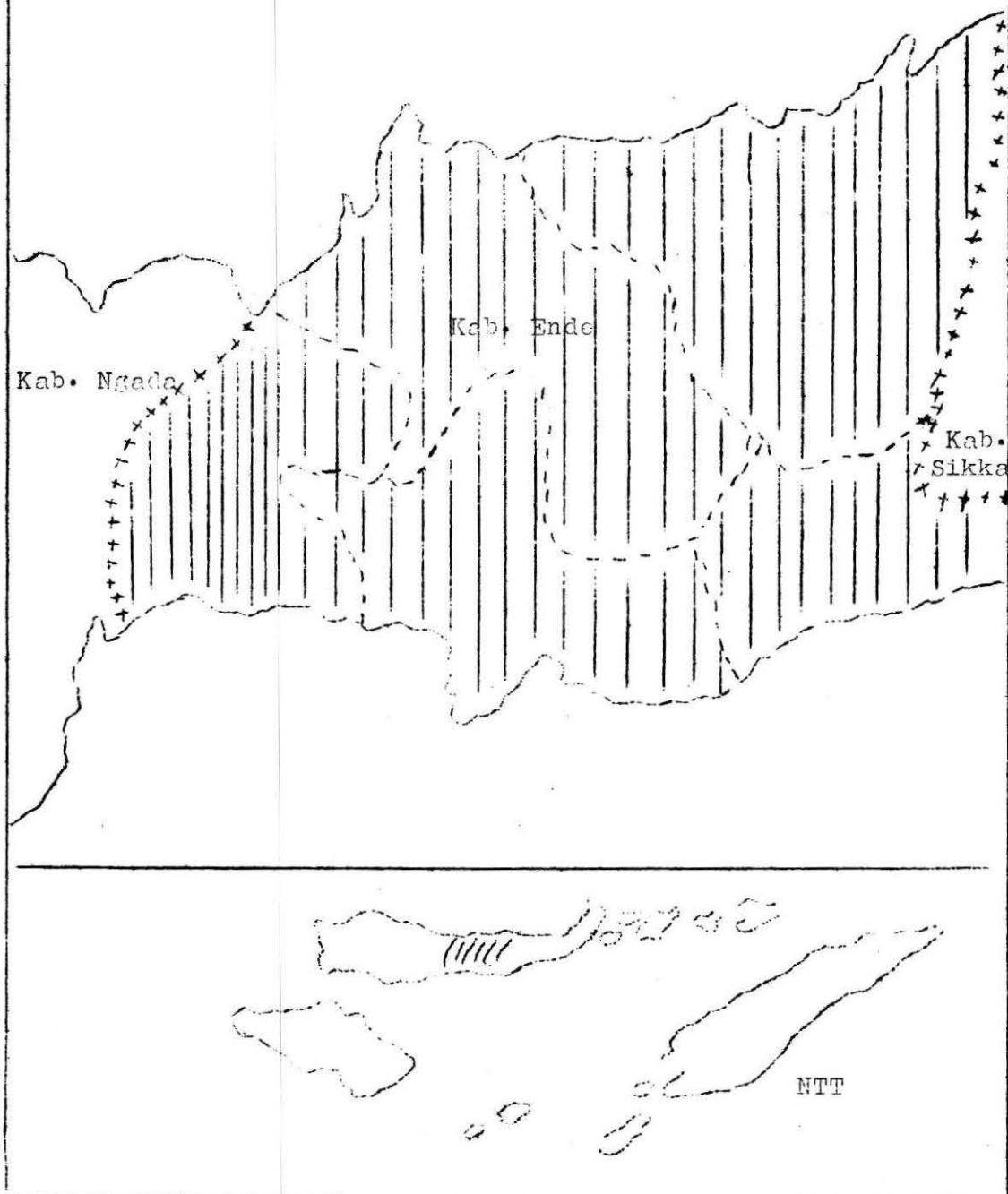
DAFTAR BACAAN

- Badjowawo, Struktur Pemerintahan Adat di Lisedetu, Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan, Ende, 1972
- Dao Gado, J., Adat Perkawinan di Kecamatan Mborong, Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Ende, 1971.
- Fox, Dr. J., The Flow of life Essays on Eastern Indonesia, Harvard University Press, 1980.
- Mika, D., Peranan Daedema dalam Ekonomi Rumah Tangga Keluarga Tanarea, Kecamatan Nangabanda, Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Ende, 1972.
- Nur. M., Upacara Ka Pena suku Mbuli, Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Ende, 1972.
- Nusa Tenggara Timur Dalam Angka tahun 1980, Kantor Statistik Propinsi, Nusa Tenggara Timur, Kupang, 1981
- Orimbo P. Sironi, Nusa Nipa, Arnoldus Ende, 1969.
- Sejarah Gereja Katholik di Indonesia, Jilid 2, 3a, 3b, Arnoldus Ende, 1974.
- Sejarah Pendidikan Daerah Nusa Tenggara Timur, Proyek IDKD, 1980.
- Sejarah Pengaruh Pelita di Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Nusa Tenggara Timur, Proyek IDKD, 1982.
- Schulte Nordholt, Dr. H. G., The Political System of Atoni of Timor, The Hague-Martinus Nijhoff, 1971.
- , Analisa Struktural dalam Anthropologi dan Sejarah, Cakrawala Majalah Penelitian Ilmu Sosial, LPIS Satyawacana No. 1 thn. VIII, 1975.
- Siddy. PS., Adat Perkawinan di Lio Slaten, Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan, Ende, 1972.
- Sindu, B., Adat Perkawinan di Lisedetu, Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Ende, 1971.
- Tipe dan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa Propinsi Nusa Tenggara Timur, Direktorat Bangdes Propinsi NTT, Kupang, 1981.
- Widiyatmika, M., Bahasa-Bahasa di Nusa Tenggara Timur Dalam Peta, Biro Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 1975.

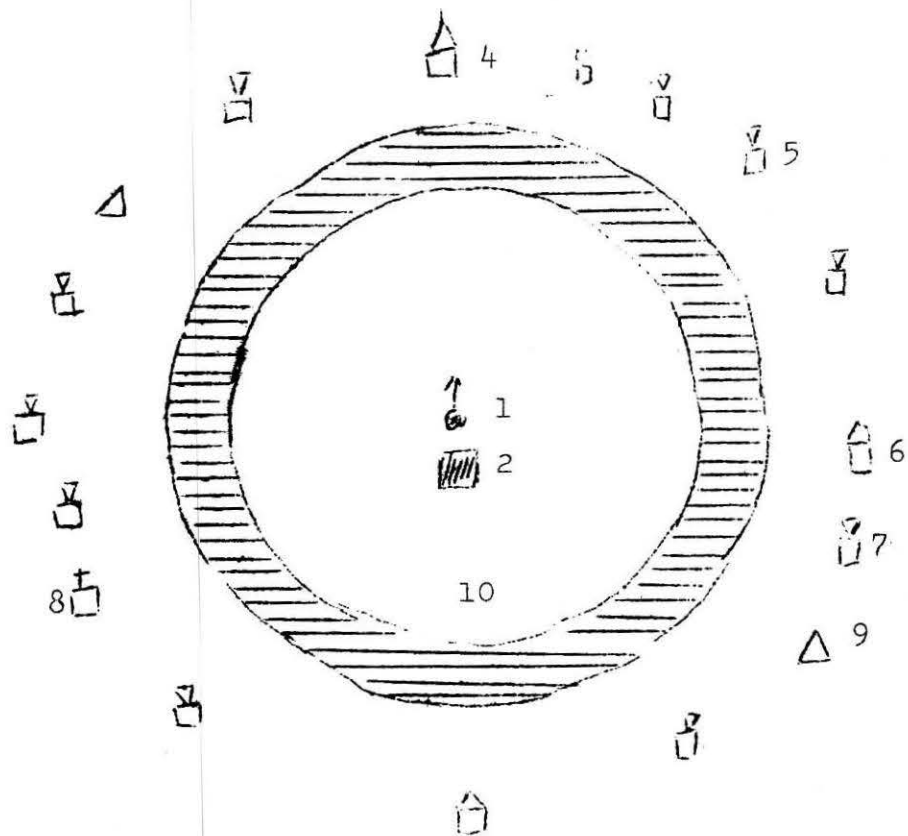
-----, Pola Pemukiman Penduduk di Nusa Tenggara Timur dan Pengaruhnya terhadap Kemiskinan Penduduk, Lembaga Penelitian Undana, 1979.

-----, Pola dan Makna Perladangan Bermindah di Nusa Tenggara Timur, Buletin Penelitian No. 1 Th. 1, Lembaga Penelitian Undana, Kupang, 1980.

PETA LOKASI PENYEBABARAN SUKU LIO
DI KABUPATEN ENDE, NTT



POLA NUA (DESA ASLI) LIO, FLORES



- Keterangan :
1. Tubu Musu (Lambang Nenek Moyang Lelaki)
 2. Lodonda (Lambang Nenek Moyang Wanita)
 3. Pagar batu mengelilingi halaman Kampung.
 4. Keda/Heda (Rumah Adat)
 5. Sao Ngguu (Rumah Upacara)
 6. Sao Wula Leja (Rumah Dewa)
 7. Kebo (Lumbung)
 8. Bhaku (Rumah Mayat)
 9. Sao Ole Mera (Rumah Tinggal biasa)
 10. Hanga (halaman kampung/Nua)

Seminar Sejarah Lokal

Topik : I

STRATIFIKASI SOSIAL DAN POL. KEPEMIMPINAN LOKAL
DI SURABAYA

Oleh :

S u y a t n o

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
SEMINAR SEJARAH LOKAL

1982

STRATIFIKASI SOSIAL DAN POLA KEPEMIMPINAN LOKAL DI SURABAYA

PENDAHULUAN

Dalam usaha menrungkakan pola-pola kepemimpinan di Indonesia, atau dasar suatu kenyataan dari kemajemukan masyarakat Indonesia, maka sudah seharusnya dimulai dari penelitian-penelitian mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan pola-pola kepemimpinan lokal.¹ Adanya berbagai etnis, aneka ragam aliran agama dan kepercayaan, berbagai adat dan tradisi, berbagai lapisan sosial tradisional, berbagai ideologi politik dengan segala perkembangannya, semuanya akan menjadi dasar yang membedakan pola-pola kepemimpinan lokal pada daerah satu dengan daerah yang lain. Kiranya perlu ditambahkan bahwa unsur-unsur lain, seperti tingkat intensitas praktek kolonial pada suatu daerah di masa lampau, dan distribusi serta komposisi penduduk pada suatu tempat, dapat pula mempengaruhi keaneka ragaman terhadap pola-pola kepemimpinan lokal di Indonesia.

Masalah pola-pola kepemimpinan lokal di Indonesia dapat dikembalikan pada tiga persoalan pokok. Pertama, masalah lapisan sosial penghasil pemimpin. Pada umumnya individu-individu atau keluarga-keluarga di dalam kelompok atau masyarakat yang mempunyai kesamaan tingkatan-tingkatan sosial pada satu dimensi stratifikasi membentuk suatu strata sosial.² Misalnya ada strata di bidang-bidang kekuasaan, ekonomi, pendidikan, agama, militer, politik, seni-seni dan lain sebagainya. Di dalam setiap strata sosial itu sering ditemukan sekelompok individu yang merupakan kelompok elite, dan di antara mereka ini ada yang mempunyai pengaruh besar pada masyarakat sehingga elite semacam ini dapat menjadi pemimpin di dalam kelompok strata sosialnya. Kita seringkali menemui suatu kelompok elite yang mempunyai pengaruh besar dan dominan pada berbagai strata sosial yang lain, di luar strata sosialnya sendiri.

Kedua hubungan antara unsur-unsur kultural dan identitas dari pada pemimpin. Misalnya kualitas seorang pemimpin dapat dikem-

balikan pada tingkat pengetahuan yang dimiliki dalam bidang-bidang adat dan tradisi, mistik, ilmu kekebalan, agama atau kepercayaan dan lain sebagainya. Ketiga, proses dan saluran untuk memperoleh status kepemimpinan. Pada umumnya setiap lapisan sosial, dalam memunculkan seorang pemimpin, mempunyai proses dan saluran yang berbeda-beda. Beberapa contoh dapat diberikan di sini, misalnya melalui penguasaan ilmu agama, kewandian menarik massa dan berpidato, keberanian, kejujuran, pengalaman dalam bidang organisasi sosial dan politik, memiliki karisma, sikap radikal dan agresif. Ketiga konsep di atas merupakan sebagian dari pada kerangka pemikiran untuk menjelaskan pola-pola kepemimpinan lokal di dalam masyarakat Indonesia.

Pembahasan terhadap masalah stratifikasi sosial dan pola-pola kepemimpinan Lokal, dalam perspektif sejarah adalah pembahasan melalui episode, peristiwa dan analisa sejarah. Pembahasan semacam ini akan dapat mengungkap lebih dalam terhadap masalah di atas, apabila dilengkapi oleh konsep-konsep sosiologi dan antropologi.

Makalah ini secara khusus membahas stratifikasi sosial dan pola kepemimpinan lokal masyarakat Jawa di Surakarta. Titik pembahasan akan dipusatkan pada periode revolusi kemerdekaan 1945-50. Dalam perspektif sejarah, Surakarta sebagai pusat kerajaan dan feodalisme telah memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan politik dan kulturil selama dua setengah abad. Demikian pula praktek kolonial di daerah ini, dengan intensitasnya, menimbulkan gerakan-gerakan petani anti-kolonial. Pada masa revolusi kemerdekaan, Surakarta telah menjadi pusat pergolakan politik dan revolusi sosial. Peristiwa-peristiwa ini semua memberikan suatu kekhususan daerah Surakarta sebagai studi kasus tentang pola kepemimpinan lokal di Jawa pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT

Surakarta, seperti halnya daerah Yogyakarta, sering dinamakan "Vorstenlanden" atau daerah kerajaan. Daerah kerajaan Sura-

karta terdiri dari dua kekuasaan yaitu pemerintahan Kasunanan dan pemerintahan Mangkunegaran.³ Masyarakat tradisional Surakarta mengenal pembagian tiga kelas sosial utama di dalam masyarakat. Pertama, sentono dalem yaitu keluarga raja yang digolongkan sebagai kaum ningrat atau bangsawan. Secara tradisional lapisan sosial ini menduduki pada tingkatan atas dari struktur sosial. Mereka ini memiliki gelar-gelar khusus sesuai dengan senioritas, status dan tingkatan hubungan darah dengan Susuhunan. Kelas sosial utama yang kedua ialah abdi dalem. Mereka ini adalah pegawai-pegawai yang menjalankan administrasi pemerintahan. Mereka ini adalah golongan priyayi dan dapat menggunakan gelar-gelar tertentu sesuai dengan kedudukan dan statusnya. Di samping itu mereka diberi nama-nama resmi oleh Susuhunan sebagai pengganti nama aslinya. Secara kulturil abdi dalem dapat didefinisikan oleh pola kehidupan priyayi yang halus dalam segala aspeknya, seperti bahasa, pakaian dan style tempat tinggal.

Kelas sosial yang ketiga ialah Kawulo dalem dan biasanya dihubungkan dengan pengertian wong cilik (orang kecil). Mereka ini umumnya memiliki sedikit hak dan banyak kewajiban untuk kepentingan feodal dan pemerintahan. Sumber norma-norma dan nilai-nilai sosial dari pada wong cilik ini adalah animisme pre-Hindu, Islam dan ceritera-ceritera wayang. Di dalam lapisan sosial ini termasuk wong tani (petani), wong dagang (pedagang) dan golongan tukang. Wong cilik yang beragama Islam umumnya juga disebut santri (wong mutihan) dan mereka tinggal di tempat-tempat khusus seperti Kauman, Mutihan. Norma dan nilai sosial mereka bersumber pada ajaran Islam.

Konsep kekuasaan dari pada kerajaan Jawa dipusatkan pada diri raja, oleh karenanya Susuhunan adalah sumber teoritis dari segala kekuasaan dan wewenang. Pada puncak struktur sosial, ia mempunyai kekuasaan-kekuasaan politik, militer dan agama. Pemusatan kekuasaan pada diri Susuhunan menciptakan suatu hirarki administrasi pemerintahan yang berorientasi ke atas de-

ngan sistim hubungan patron-client.⁴ Berbagai upacara diselenggarakan untuk memperkuat kedudukan raja dan keselamatan raja. Hubungan antara Susuhunan dan rakyat sering dinyatakan dalam bentuk hubungan yang disebut 'manunggaling kawulo lan Gusti', yaitu bersatunya rakyat dan raja. Dalam artian agama hubungan ini sering dinyatakan bersatunya manusia dan Tuhan. Pola hubungan ini, seperti halnya terdapat di Kasultanan Yogyakarta, sebenarnya merupakan tradisi kerajaan Mataram.⁵ Rupanya suatu pola hubungan dengan pralambang semacam ini dimaksudkan untuk menambah nilai karisma raja, mempertahankan kesatuan kerajaan dan menguatkan pengabdian feodal oleh rakyat kepada raja dan para pegawainya (priyayi).

Di samping lapisan-lapisan sosial di atas, kita mendapatkan lapisan sosial orang-orang Eropa, terutama Belanda. Mereka ini terdiri dari pegawai-pegawai pemerintahan kolonial dan para pengusaha swasta perkebunan-perkebunan. Sejak dinyatakan hapusnya secara resmi sistim Tanam Paksa tahun 1870 dan dimulainya Undang-Undang Agraria yang baru, jumlah perusahaan perkebunan milik orang-orang Belanda meningkat di Surakarta. Pada tahun 1915 jumlah perusahaan perkebunan ini ada 98 buah, dan mereka beroperasi pada tanaman-tanaman tembakau, tebu, indigo, kopi, teh dan karet.⁶

Penetrasi politik kolonial yang mendalam ke dalam masyarakat desa diikuti oleh perubahan-perubahan sosial yang cukup besar. Pada tahun 1847, Van Nes, seorang penasihat daerah 'Vorstenlanden', menginstruksikan pembentukan administrasi pemerintahan desa yang disebut kalurahan desa, dan di bawah pimpinan seorang lurah desa beserta para pembantunya.⁷ Sudah barang tentu mereka ini merupakan elite desa yang baru. Pada tahun 1918 jabatan bekel dihapuskan, sehingga hal ini makin memperkuat fungsi dan peranan lurah desa dalam masyarakat desa itu sendiri. Pada tahun 1924 daerah Surakarta (Kasunanan dan Mangkunegaran) telah membentuk 1396 unit kalurahan desa.⁸

Ada kelas sosial baru yang muncul di dalam lingkungan masyarakat petani yaitu tenaga upahan yang bekerja pada perkebunan-perkebunan. Para petani yang mempunyai status sebagai tenaga buruh upahan ini mempunyai beban yang sangat berat, karena mereka harus bekerja di perkebunan-perkebunan dan memenuhi kewajiban yang lain yaitu tradisi pengabdian feodal kepada para pemegang tanah lungguh (patuh) yang menyewakan tanah mereka kepada orang-orang Belanda. Tidak dapat diragukan bahwa kegelisahan sosial para petani di daerah perkebunan-perkebunan ini mudah timbul. Terutama perkebunan tebu yang memerlukan tenaga buruh yang sangat besar,⁹ selalu menjadi pusat kegelisahan sosial yang laten.¹⁰ Kegelisahan sosial semacam ini sering diikuti gerakan-gerakan sosial yang anti terhadap praktek perkebunan-perkebunan milik orang-orang Eropa ini. Dalam hal ini lapisan sosial petani mendapatkan suatu pola kepemimpinan baru yang dapat menangkap realitas sosial penderitaan petani.

Struktur sosial klasik Surakarta hingga invasi militer Jepang pada bulan Maret 1942 masih menunjukkan eksistensinya. Pada tanggal 5 Maret 1942 kesatuan militer Jepang menduduki daerah Surakarta.¹¹ Pada tanggal 30 Juli 1942 Hitoshi Inamura, komandan Tentara ke-16, dan kepala kekuasaan urusan pemerintahan di Jawa, menyatakan daerah Surakarta sebagai daerah otonom di Jawa yang disebut Kochi, yang status administrasinya seperti 'Vorstenlanden'.¹²

Pemerintahan Jepang sangat kekurangan tenaga pegawai, oleh karena itu pemerintah militernya masih meneruskan penggunaan priyayi lokal sebagai pegawai-pegawai sipil.¹³ Ini berarti bahwa lapisan sosial ningrat dan priyayi masih tetap menjadi elite penguasa dalam pemerintahan tradisional Surakarta yang fungsinya membantu pemerintahan militer Jepang. Mereka ini tetap terpisah kedudukannya dari lapisan sosial wono cilik.

Selama pendudukan Jepang ini lapisan sosial pemuda mulai dominan di dalam masyarakat. Pemerintah Jepang, atas pertimbangan untuk kepentingan militer dan perang, memobilisasikan

secara besar-besaran golongan pemuda ini. Seinendan, suatu organisasi ~~semi~~ militer untuk pemuda dibentuk di kota-kota dan di desa-desa. Keibodan, suatu organisasi pembantu kepolisian didirikan. Fujinkei, organisasi untuk kaum wanita juga dibentuk. Sebagian pemuda memasuki heiho (prajurit pembantu untuk militer Jepang), sebagian yang lain menjadi tenaga paksaan romusha yang bekerja di proyek-proyek untuk kepentingan perang. Sebagian besar dari mereka ini meninggal dunia tanpa diketahui tempatnya. Dalam tahun 1944 sekitar 2000 orang yang menjadi heiho dan tenaga romusha tidak pernah kembali ke kampung halamannya.¹⁴

Sebagian pemuda yang lain menjadi anggota Peta (Pembela Tanah Air), Barisan Pelopor dan Hizbullah. Mereka ini juga mendapat latihan-latihan militer. Unsur-unsur seperti suasana perang, propaganda Jepang, kekejaman militer Jepang dan tekanan ekonomi yang berat, membentuk jiwa pemuda yang memiliki ciri-ciri radikal, disiplin, semangat perang dan anti orang-orang Eropa.

Lapisan sosial pemuda ini sebagian besar berasal dari lingkungan wong cilik baik kota-kota maupun dari daerah pedesaan. Jadi golongan pemuda ini tetap di luar lingkungan golongan ningrat dan priyayi yang statusnya sebagai pegawai-pegawai sipil dalam pemerintahan militer Jepang.

Pada periode revolusi kemerdekaan, pembagian klasik masyarakat Surakarta ke dalam kelas-kelas sosial ningrat, priyayi dan wong cilik, terasa masih dipertahankan. Namun demikian ada lapisan sosial baru, yaitu golongan pemuda yang sangat dominan di dalam masyarakat tradisional ini. Sebagian besar golongan pemuda ini terdiri dari lingkungan sosial wong cilik, dan sebagian kecil dari lingkungan priyayi yang tidak mempertahankan sepenuhnya nilai-nilai feodal. Golongan pemuda ini adalah anggota-anggota organisasi pelajar, terutama di kota-kota, dan organisasi badan perjuangan (lasykar) baik di kota-kota maupun di desa-desa.

Ada lapisan sosial lain yang disebut golongan tua, yaitu

golongan yang pernah menjadi pemimpin atau anggota organisasi-organisasi politik masa pergerakan nasional. Golongan tua ini kemudian aktif kembali pada berbagai organisasi politik setelah proklamasi kemerdekaan, misalnya Partai Buruh Indonesia (PBI), Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Golongan tua tampak lebih dekat dengan golongan pemuda. Hal ini terlihat pengaruh golongan tua ini pada organisasi-organisasi pemuda dan kelasykaran yang berafiliasi dengan ideologi politik, misalnya Barisan Buruh Indonesia (BBI), suatu organisasi kelasykaran yang berafiliasi dengan PBI; Barisan Banteng cenderung ke arah ideologi PNI; Hizbullah di bawah pengawasan Masyumi.

Semua lapisan sosial di atas adalah sumber dari pada asal mula pemimpin-pemimpin lokal di Surakarta. Persoalan ini akan dibahas lebih mendalam pada uraian yang berikutnya.

ASAL-USUL DAN MACAM-MACAM KEPEMIMPINAN LOKAL

Dalam hari-hari segera setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Republik yang baru ini bergerak cepat mendirikan suatu pemerintahan revolusioner. Badan-badan eksekutif dan legislatif dibentuk. Badan kemiliteran walaupun masih pada tingkat awal telah pula didirikan. Organisasi-organisasi partai politik dibentuk kembali setelah mengalami pembubaran selama pendudukan Jepang. Respon spontan dari masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan Republik yang baru itu, membawa akibat lahirnya berbagai organisasi badan perjuangan yang disebut lasykar. Dengan kejadian-kejadian ini masyarakat telah menampilkan sejumlah pemimpin dengan segala identitasnya berbeda-beda, dan mereka ini berasal dari berbagai lapisan sosial.

Di bawah ini saya akan mencoba membuat suatu analisa mengenai asal-usul dan macam-macam kepemimpinan lokal di Surakarta pada masa revolusi kemerdekaan. Untuk memudahkan penga-

nalisaannya, saya menggunakan pendekatan organisasi untuk mengelompokkan macam-macam pemimpin lokal Surakarta. Dengan demikian : kita akan lebih mudah mendapatkan suatu gambaran karakteristik umum dari pola kepemimpinan lokal Surakarta, dan karakteristik khusus kepemimpinan lokal dalam hubungannya dengan lapisan-lapisan sosial yang ada.

1. Pola-pola kepemimpinan lokal dalam hubungannya dengan badan-badan pemerintahan

Bulan-bulan pertama setelah proklamasi kemerdekaan telah terjadi konflik sosial di dalam masyarakat lokal Surakarta, yang salah satu sebab utamanya ialah masalah perbelaan mengenai pola-pola kepemimpinan formil dalam badan-badan pemerintahan. Di satu pihak lapisan sosial ningrat dan priyayi konservatif masih mempertahankan pola kepemimpinan atas dasar tradisi feodal, seperti keturunan si penguasa, hubungan darah dan pemilikan gelar-gelar tradisional. Melalui proses semacam ini golongan ningrat dan priyayi ingin mempertahankan status kepemimpinan formilnya dalam pemerintahan Republik di Surakarta. Pada pihak yang lain, lapisan sosial revolusioner yang terdiri dari golongan pemuda, orang-orang pergerakan, guru, pelajar mempunyai ukuran pola-pola kepemimpinan formil yang berdasarkan pada nilai-nilai revolusi, seperti demokrasi, anti-feodal anti-kolonial, semangat berjuang, patriotik, semua faktor-faktor ini merumuskan alasan untuk menentang kedudukan pemimpin formil maupun pemimpin informal di dalam masyarakat.

Untuk memberikan suatu contoh yang lebih konkrit, marilah kita menganalisa pola kepemimpinan dalam pemerintahan KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Surakarta. KNID di Surakarta ini sebenarnya mirip dengan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang disahkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 22 Agustus 1945. Lembaga ini merupakan badan legislatif yang juga menjalankan pemerintahan untuk sementara waktu, sampai badan-badan eksekutif terbentuk. Pada bulan September 1945 KNID Surakarta dibentuk di bawah pimpinan RMTH Soemodiningrat, seorang ningrat revolusioner dari Kasunanan. Ia lulus dari fakultas hukum, Universitas Leiden, tahun 1935. Dari 1936 hingga 1940 ia menjadi

wakil ketua Parindra (Partai Indonesia Raya) cabang Surakarta. Dari 1937 hingga 1942 ia menjadi penasihat Perkumpulan Kawula Surakarta (PKS), suatu organisasi yang sebagian terbesar para anggotanya adalah wong cilik, terutama para petani. Pada masa pendudukan Jepang ia aktif dalam Putera (Pusat Tenaga Rakyat), Hōkōkai, dan ia pernah mengikuti latihan militer Peta di Bogor dan kemudian menjadi Chudanchō Peta di Surakarta. Terpilihnya Soemodiningrat sebagai ketua KNID tidak mematai kriteria ia sebagai keturunan ningrat dengan tradisi feodalnya, akan tetapi menggunakan ukuran-ukuran yang berhubungan dengan nilai-nilai revolusi kemerdekaan.¹⁵

Sebagian besar anggota-anggota KNID Surakarta terdiri dari golongan-golongan pemuda, orang-orang pergerakan (di antara mereka ini terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1926), dan orang-orang yang aktif dalam Putera, Hōkōkai, Peta, Barisan Pelopor dan Hizbullah. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kasus Surakarta menunjukkan adanya konflik sosial di dalam masyarakat, yang ber-sumber pada perbedaan konsep pola kepemimpinan dan saluran atau proses untuk mencapai kepemimpinan formil dalam pemerintahan. Konflik sosial ini meningkat menjadi gerakan-gerakan pro dan anti-swapraja mempertahankan pola kepemimpinan formil berdasarkan tradisi feodal. Golongan anti-swapraja menolak tradisi feodal sebagai faktor penentu untuk menukur kepemimpinan formil dalam pemerintahan. Golongan anti-swapraja mempertahankan pola kepemimpinan formil atas dasar nilai-nilai revolusi Indonesia, terutama orientasi kerakyatan, anti-feodal dan anti-kolonial dengan segala implikasinya.

2. Pola-pola kepemimpinan lokal dalam hubungannya dengan badan-badan perjuangan dan kemiliteran

Pada bulan-bulan pertama dalam periode revolusi kemerdekaan golongan pemuda telah memainkan peranan penting dalam pembentukan organisasi badan-badan perjuangan. Menurut Profesor Sartono Kartodirdjo, badan perjuangan ini dipengaruhi oleh proses revolusioner yang memasukkan pembentukan struktur politik baru dengan

melempar struktur-struktur tradisional di satu pihak dan kekuasaan kolonial yang dominan pada pihak yang lain.¹⁶ Ini berarti bahwa organisasi badan perjuangan itu anti-feodal, anti-kolonial.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 BKR (Badan Keamanan Rakyat) dibentuk dan dimaksudkan untuk menjaga keamanan. Para anggotanya terutama terdiri dari bekas anggota-anggota Peta dan Heiho, yang telah dibubarkan oleh Jepang. Di daerah-daerah, termasuk daerah Surakarta, mengikuti langkah pembentukan BKR di tingkat pusat ini. Pada pertengahan bulan September BKR Surakarta dibentuk oleh opsir-opsir Peta, seperti Muljadi Djodjmartono (daidanchō Peta), Sunarto Kusumodirdjo (chudanchō Peta), Sutarto (shodanchō Peta), dan para opsir yang lain. BKR Surakarta ini kemudian di bawah pimpinan Muljadi Djodjmartono dan Kusumodirdjo, yang keduanya mempunyai latar belakang pendidikan HIS.

Walaupun Sutarto tidak memegang pimpinan namun ia sangat populer di lingkungan para anggota BKR. Mungkin ia dikenal sebagai tokoh pemuda yang radikal dalam Peta, yang memimpin gerakan di bawah tanah anti Jepang melalui organisasinya IPTAS (Ikatan Pemuda Tanah Air Sejati). Pada bulan Agustus 1945 ia mendirikan AMT (Angkatan Pemuda Tentara) yang kemudian menjadi inti BKR Surakarta. Pada tahun 1930-an Sutarto menjadi pemimpin SPI (Saluh Pemuda Indonesia) cabang Madiun, yang merupakan gerakan pemuda radikal yang berafiliasi dengan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI).¹⁷ Sutarto berasal dari lingkungan rakyat kecil (orang cilik) dan hanya berpendidikan Sekolah Rakyat.¹⁸ Sebagai pemuda ia mempunyai ciri-ciri khusus, seperti anti-kolonial, anti-feodal, radikal, anti-fasisme Jepang, patriotik dan disiplin dalam organisasi. Oleh karena itu pada waktu BKR Surakarta dibubarkan dan diganti dengan TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) pada bulan Oktober 1945, Sutarto dipilih menjadi komandan TKR, dan ia pada kemudian hari menjadi komandan Divisi Panembahan Senopati di Surakarta. Contoh di atas ini menunjukkan bahwa proses pencapaian kepemimpinan dalam badan kemiliteran melalui saluran seperti yang dimiliki oleh Sutarto ini. Hal yang memperkuat identitas pemimpin militer dengan saluran seperti di atas ialah kasus tidak terpilihnya GPH

Purbonegoro dalam pencalonan sebagai komandan TKR Surakarta itu. Walaupun ia lulusan Akademi Militer Breda, Negeri Belanda, namun unsur ini belum merupakan faktor penentu dalam pencalonan kepemimpinan di atas. Akibatnya Purbonegoro kurang berjiwa patriotik dan mempertahankan status ninratnya. Jiwa semacam ini tampak pada waktu ia menundurkan diri dari latihan militer Peta di Bogor, di mana ia menolak berlakukan instruktur Jepang, yang menurut pandangannya tidak cocok dengan norma-norma kehidupan ninrat itu.

Pola-pola kepemimpinan dalam badan-badan perjuangan umumnya dibatasi oleh unsur-unsur: kemampuan berideologi politik, berani dan patriotik, pengetahuan kemiliteran, radikal, pengalaman berorganisasi, pendidikan. Unsur-unsur yang membatasi pola-pola kepemimpinan dalam badan perjuangan secara lebih konkrit dapat dilihat dari beberapa contoh di bawah ini.¹⁹

- a. BBI (Barisan Buruh Indonesia) - unsur-unsur yang membatasinya ialah kemampuan berideologi politik, terutama dalam afiliasinya dengan PBI (Partai Buruh Indonesia); patriotik, anti-imperialisme dan feodalisme.
- b. BPRI (Barisan Pemberontakan Republik Indonesia) - unsur-unsur yang membatasinya: jiwa patriotik dan pemberontak, berani, radikal. Mungkin hal-hal ini terpengaruh oleh pemimpin besarnya Sutomo (Bung Tomo) yang berjiwa pemberontak, radikal dan patriotik.
- c. Hizbullah - unsur-unsur yang membatasinya ialah: berani mati (mati syahid), jiwa perangi sahil dalam revolusi, pengetahuan kemiliteran, kemampuan berkomunikasi dengan partai Islam, seperti Masyumi.
- d. Barisan Banteng - unsur-unsur yang membatasinya: berpendidikan, kemampuan berideologi politik, pengetahuan kemiliteran, jiwa anti feodal dan imperialisme.
- e. Lasykar Rakyat - unsur-unsur yang membatasinya: berani dan patriotik, pengetahuan kemiliteran. Pada umumnya para pemimpin Lasykar Rakyat di tingkat kecamatan hanya berpendidikan sekolah rakyat, kriteria pendidikan kurang menentukan untuk

mencapai kedudukan kepemimpinan.

Pola-pola kepemimpinan dalam badan-badan perjuangan sering dibatasi oleh kepercayaan-kepercayaan di dalam kebudayaan Jawa. Lapisan sosial masyarakat Jawa yang berorientasi pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber pada animisme, pre-Hinduisme dan Islam, sering menempatkan peranan penting unsur-unsur seperti kawadukan (sifat kebal terhadap senjata tajam), pengetahuan kejawan (Jawaisme) sebagai faktor penentu dari suatu proses untuk mencapai kedudukan kepemimpinan dalam organisasi-organisasi badan perjuangan. Melalui sistim pengetahuan Jawa (petungan Jawa), salah satu aspek dari pengetahuan kejawan, kita dapat menentukan naga dina (hari buruk yang mendatangkan kecelakaan) dan jaya dina (hari baik yang mendatangkan keselamatan) dalam segala kegiatan di dalam masyarakat.

Faktor penentu lain untuk mencapai kedudukan kepemimpinan sering dikembalikan pada kekuatan magisnya. Di daerah pedesaan Surakarta pemimpin semacam ini sering disebut jago. Pola kepemimpinan jago ini sangat umum di dalam masyarakat Jawa.²⁰ Seorang jago dapat memimpin ruhi internasional suatu organisasi badan perjuangan. Ia dapat memberi nasihat kepada para anggota badan kelasykaran untuk memilih hari-hari dalam siklus naga dina dan jaya dina. Pada umumnya ia memakai pakaian dari petungan Jawa (perhitungan Jawa) yang bersumber Kitab Pranata.²¹

Seorang jago tidak selalu menjadi pemimpin dalam organisasi badan perjuangan, kadang kala ia hanya anggota masyarakat biasa yang dianggotakan sebagai pemimpin terhadap kelompok masyarakatnya. Akan tetapi sering dituturkan bahwa seorang jago menjadi pemimpin kelompok banjit, dan ia dalam hubungan ini sering disebut benggol, gente.²² Pola semacam ini merupakan salah satu saluran untuk mencapai kedudukan kepemimpinan informal di dalam masyarakat desa.

KESIMPULAN

Di dalam masyarakat di mana pengaruh tradisi feodal masih

kuat, walaupun masyarakat tersebut mengalami perubahan sosial yang besar namun pola-pola kepemimpinan tradisional masih dipertahankan oleh lapisan-lapisan sosial tertentu. Hal ini sering menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat sehubungan dengan munculnya pola-pola kepemimpinan yang baru, seperti terlihat pola-pola kepemimpinan yang dibawa oleh nilai-nilai revolusi. Suatu tipe masyarakat yang disebutkan di atas, seperti terlihat masyarakat Surakarta, mempunyai seluruh-seluruh dan proses-proses yang beraneka ragam dalam mencapai kedudukan kepemimpinan baik kepemimpinan formal maupun kepemimpinan informal.

CATATAN

1. Masalah Kepemimpinan pernah dibahas dalam Seminar Perkembangan Sosial-Budaya dalam Pembangunan Nasional tanggal 20-24 Januari 1970. Namun diskusi ini hanya sampai pada pemikiran teoritis dan belum menunjukkan suatu hasil studi penelitian yang konkrit.
2. Konsep strata sosial dalam pengertian ini diambil dari konsep sosiologi yang dikotengahkan oleh Leonard Broom dalam bukunya Sociology, New York, Harper & Row, 1968, hlm. 154-155.
3. Pembagian daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ini terjadi pada 1757, pada perjanjian di Salatiga. Lihat A.K. Pringgodigdo, Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoenagorische Rijk, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950, pp. 26-27.
4. Bandingkan dengan analisa Benedict Anderson mengenai ide kekuasaan dalam kebudayaan Jawa, dalam Claire Holt(ed), Culture and Politics in Indonesia, Ithaca, Cornell University Press, 1972, pp. 34-35.
5. Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta, diterjemahkan oleh H.J. Koesoemanto, Gadjah Mada University Press, 1981, p. 33.
- Lihat, Lijst van Particuliere Ondernemingen in Nederlandsch-Indië, Batavia, Landsdrukkerij, 1915, pp. 206-210.

7. Staatsblad, No. 37, 1847; no. 9, 1848.
8. L. Adam, De Autonomie van het Indonesische Dorp, Amersfoort, S.W. Melchior, 1924, p. 130.
9. Clifford Geertz, Agricultural Involution: The Ecological Change in Indonesia, Berkeley, University of California Press, 1963, p. 55.
10. Erich H. Jacoby, Agrarian Unrest in Southeast Asia, New York, Columbia University Press, 1940, p. 57.
11. 'Aanteekeningen Omtrent de Mangkoknegeren in de Maart 1942' ketikan, Surakarta, 1942, p. 2.
12. H.J. Benda et.al., Japanese Military Administration in Indonesia; Selected Documents, Translation Series, no. 6, Southeast Asia Studies, Yale University, 1965, p. 60.
13. H.J. Benda, 'The Beginning of the Japanese Occupation of Java', The Far Eastern Quarterly, vo. XV, no. 4, Agustus 1956, p. 544.
14. 'Bendel Djaman Djepang 1944-1945', Sub romusha, Arsip Mangkunegaran.
15. Wawancara dengan Soemodiningrat, Agustus 1979.
16. Lihat Sartono Kartodirdjo, 'The Role of Struggle Organizations in the Indonesian Revolution', RIMA, vol. 14, no. 2, 1980, pp. 92-109.
17. Biro Pemuda Departemen PD & K (ed), Sedjarah Perjuangan Pemuda, Djakarta, Balai Pustaka, 1965, pp. 72-75.
18. 'Riwayat Amarah Kolonel Sutarto', ketikan, Dinas Pemeliharaan Pemakaman Tentara, Divisi Diponegoro, Surakarta, 1 Juli 1955.
19. Data di bawah ini hasil wawancara dengan para pemimpin badan perjuangan di Surakarta bulan Juli dan Agustus 1979.
20. Lihat studi Anthony Reid, The Indonesia National Revolution 1945-1950, Victoria, Longman, 1974, pp. 56-57; 58 note 28. Rudolf Mrazek, The United States and the Indonesian Military 1945-1965, Prague, the Czechoslovak Academy of Science, 1978, pp. 17-77.
21. Wawancara dengan Sukardi, seorang jago dari Kabupaten Sragen, Juli 1979.

22. Untuk daerah lain di Jawa lihat Anton E. Lucas, 'The Bamboo Spear Pierces the Payung: The Revolution Against the Bureaucratic Elite in North Central Java in 1945', Ph.D. thesis, The Australian National University, Canberra, 1960.
-

Seminar Sejarah Lokal

Topik : I

STRATIFIKASI SOSIAL DAN POLA KEPEMIMPINAN
DI DAERAH SURABAYA: SUMBUH STUDI PERBANDINGAN
ANTARA DESA SEBELUM DAN SESUDAH PERTENGKALAN
ABAD KE-18.

O l e h:

F.A. Sutjipto

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
SEMINAR SEJARAH LOKAL

1982

STRATIFIKASI SOSIAL DAN POLA KEPEMIMPINAN
DI DAERAH SURABAYA: SEUNTU STUDI PERBANDINGAN
ANTARA MASA SEBELUM DAN SESUDAH PERTENGAHAN
ABAD KE-18.

oleh : P.I. Sutjipto

Pendahuluan

Judul tersebut di atas kiranya memerlukan sedikit penjelasan. Jelaslah di situ bahwa tema masalahnya adalah : stratifikasi sosial dan pola kepemimpinan. Ruang lingkup keruangan (spatial scope) meliputi daerah Surabaya, dalam arti wilayah daerah afdeling atau kabupaten Surabaya, yang membawahkan sejumlah distrik, di antaranya adalah Distrik Kota Surabaya. Adapun luas lingkup waktu (temporal scope) akan berpusat pada dua arah, ialah pertama mengenai masa sebelum pertengahan abad ke-18, sedang kedua adalah masa sesudah pertengahan abad ke-18. Meskipun kata sebelum abad ke-18 dapat juga meliputi masa-masa yang panjang, namun penyebutan peristiwa-peristiwa pada kurun ini hanya akan dibatasi dan ditekankan pada yang dapat membuktikan perbedaannya dengan kurun waktu sesudah pertengahan abad ke-18.

Demikian pula masa sesudah pertengahan abad tersebut dapat menyangkut masa jauh sesudah itu, namun inipun akan dibatasi pada sepanjang yang relevan dengan tema uraian.

Dalam hubungan dengan batas perisih kurun (caesuur) perlu dijelaskan bahwa pertengahan abad ke-18 merupakan batas antara masa kekuasaan kepala-kepala pribumi sepenuhnya dan masa kekuasaan kolonial di daerah Surabaya. Kurun waktu pertama (masa kekuasaan pribumi) dapat dibagi menjadi dua, ialah: masa ketika Surabaya merupakan daerah kekuasaan merdeka, dan kemudian masa ketika Surabaya berada dalam kekuasaan kerajaan Mataram. Untuk masalah ini maka akan digunakan sub-judul: Dari "Raja kecil" ke bupati vasal. Sedangkan kurun waktu kedua akan meliputi masa setelah daerah Surabaya dikuasai oleh kekuasaan asing ; untuk ini ditekankan pada kekuasaan Kompeni Belanda, Inggris,

dan Hindia Belanda. Dengan demikian tema pokok tentang : stratifikasi sosial dan pola kepemimpinan akan dibahas dalam konteks lingkup keruangan dan lingkup waktu tersebut, dengan mempertanyakan : apakah ada perubahan-perubahan stratifikasi sosial dan pola kepemimpinan selama kurun-kurun waktu itu ? Baiklah masalah tersebut dibahas satu demi satu.

Dari " raja kecil " ke bupati vasal (perkembangan politik)

Pada abad ke-16 sampai akhir perempat pertama abad ke-17, ialah sebelum Surabaya dikalahkan oleh Mataram pada tahun 1625, Surabaya merupakan daerah kekuasaan yang merdeka di bawah seorang kepala daerah yang kedudukannya setingkat dengan adipati atau "raja kecil" dengan memakai gelar pangeran. Adipati atau Pangeran Surabaya berusaha untuk tetap mempertahankan kemerdekaannya meskipun berkali-kali mendapat serangan-serangan dari pasukan kerajaan Jawa Tengah, baik itu dari Demak, Pajang maupun Mataram. Di antara daerah daerah pantai timur pulau Jawa (bang wetan) Surabaya merupakan pementang utama ekspansi-ekspansi kekuasaan tersebut. Bahkan kepala daerah Surabaya berhasil membentuk persekutuan di antara penguasa-penguasa daerah di pantai Jawa Timur, seperti Surabaya, Pasuruan, Tuban, Japen, Wirasaba, Arosbaya, Sampang, Pamekasan dan Sumenep¹.

Berkat persekutuan ini mereka dapat melawan bahkan menahan serangan pasukan Panembahan Senapati pada tahun 1589². Daerah-daerah pantai Jawa Timur yang masih dapat bertahan terhadap serangan ekspansi dari Senapati masih harus menghadapi tantangan yang lebih berat dari penggantinya ialah Sultan Agung (1613-1645). Ancaman dari pasukan Sultan Agung pada tahun 1615 memaksa dibentuknya persekutuan lagi di antara penguasa-penguasa daerah di tepi Selat Madura itu. Dalam persekutuan ini peranan utama Surabaya sangat besar, karena pada waktu itu Surabaya merupakan kekuasaan yang terkuat dibandingkan dengan lainnya. Usaha Mataram untuk menguasai daerah bang wetan masih dapat digagalkan.

Namun pada masa-masa selanjutnya usaha penguasaan Mataram lambat laun berhasil juga. Berturut-turut penguasa-penguasa daerah Jawa Timur dapat ditundukkan, antara lain: Gresik pada tahun 1613 telah ditaklukkan oleh Mataram³, Jaranan (1613), Pasuruan (1617). Beberapa kota di pulau Madura bagian Barat seperti : Bangkalan, Arosbaya, Balega dan Sampang ditundukkan pada tahun 1624. Hanya Pamekasan dan Suwonop yang masih dapat bertahan⁴.

Penyerangan Mataram terhadap Surabaya telah dilakukan pada tahun 1622, namun masih belum berhasil. "Verhaal van eenige oorlogen in Indie" tahun 1622 menyebutkan bahwa raja Mataram telah menempatkan kurang lebih 70.000 orang prajurit di sekitar kota Surabaya dengan maksud untuk mengepung kota tersebut. Surabaya dengan kekuatan 30.000 orang prajurit berhasil menahan kemajuan pasukan Mataram sehingga terhenti di "sebuah sungai"⁵. (mungkin sekali sungai Brantas sebelum bercabang menjadi sungai Porong dan sungai Mas). Dengan demikian usaha Mataram untuk menguasai Surabaya gagal. Namun dengan ditaklukannya kota-kota di Madura Barat oleh pasukan Mataram pada tahun 1624, kedudukan Surabaya makin terjepit.

Untuk mempersiapkan penyerangan lagi terhadap Surabaya Mataram terlebih telah mengirimkan pasukan sebesar 20.000 orang di bawah Tumenggung Alap-alap dengan tugas untuk mengadakan pengrusakan atas tanam-tanaman dan tanah persawahan sebelum pasukan ini kemudian bergabung dengan pasukan induk yang segera akan datang⁶. Penyerangan besar-besaran dilakukan pada tahun 1625 dan pada tanggal 1 Mei tahun itu juga Surabaya jatuh ke dalam kekuasaan Mataram. Dikatakan dalam Daghregister bahwa "conunck" beserta pasukannya telah menyerah. Disebutkan juga bahwa penduduk Surabaya yang semula berjumlah 50 sampai 60.000 jiwa setelah perang selesai tinggal tidak lebih dari 500 jiwa [sic]; karena banyak yang melarikan atau meninggal⁷.

Seperti halnya penaklukan Madura Barat yang berakhir dengan pengangkutan tawanan perang, termasuk pangeran kecil Madura bernama

Raden Prasena ke ibu kota Mataram⁸, demikian pula penaklukan Surabaya diikuti dengan pengangkatan para tawanan perang termasuk diantaranya Pangeran Pekik, anak Adipati Surabaya, ke Mataram⁹. Sejak itulah maka daerah Surabaya berada di bawah kekuasaan Mataram. Kepala daerah Surabaya yang semula adalah "raja kecil" yang merdeka penuh, setelah penaklukan itu mempunyai status sebagai bupati vasal kerajaan Mataram. Keadaan seperti ini berlangsung terus hingga menjelang pertengahan abad ke-18. Penunjukan pengganti-penggantinya sebagai bupati Surabaya untuk seterusnya berada dalam wewenang raja Mataram. Baiklah ditinjau proses selanjutnya.

Dalam hubungan dengan situasi politik dalam abad XVIII perlu diingat bahwa kekuasaan Kompeni Belanda mengalami proses perpindahan dari kegiatan ekonomi suatu badan dagang ke arah kegiatan politik ekspansi wilayah kekuasaan. Kekacauan yang berkali-kali terjadi di dalam kerajaan Mataram merupakan peluang bagi Kompeni untuk memperluas pengaruhnya. Satu demi satu daerah pantai wilayah Mataram dikunsaunya, sebagai imbalan balas jasa atas bantuannya kepada pihak-pihak bangsawan yang sedang berselisih. Demikian pula bantuan Kompeni kepada Mataram untuk mengalahkan perlawanan Trunajaya dan Surapati berakibat makin menyempitnya wilayah kekuasaan.

Timbulnya pemberontakan orang Cina (geger pacina) di Jawa Tengah pada sekitar tahun 1741 yang akhirnya membentuk dua kelompok yang saling bertentangan: Kelompok Pakubuwana II yang dibantu Kompeni berhadapan dengan kelompok bangsawan anti Sunan di bawah Raden Mas Garembi (Sunan Muning)¹⁰ merupakan kesempatan baik untuk perluasan Kompeni ke daerah-daerah Jawa Timur dan Madura. Kontrak yang dibuat antara Kompeni dengan Sunan Pakubuwana II setelah perang selesai, ialah pada tanggal 11 Nopember 1743, berisi ketentuan-ketentuan antara lain: Sunan Pakubuwana mengakui bahwa ia dapat menduduki tahta kembali berkat bantuan dan kebaikan Kompeni (fasal 1); Sunan hanya boleh mengangkat

patih atau bupati-bupati daerah pantai apabila telah -
mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral dan Raad -
(Dewan Hindia di Batavia) (fasal 4); dilain waktu itu -
Sunan diharuskan melepaskan seluruh ujung Jawa Timur -
dan pulau Madura kepada Kompeni (fasal 6), dan seterusnya.¹¹

Kontrak tersebut jelas melonggarkan sama sekali kekuasaan raja atas daerah pantai Jawa Timur dan Ujung Jawa -
Timur. Tidak hanya pengangkatan patih di pusat kerajaan,
tetapi juga pengangkatan bupati-bupati daerah pantai harus
dengan meminta izin lebih dahulu kepada Kompeni. Peristiwa
ini juga merupakan tonggak, sejak saat itu bupati-bupati
vasal Mataram di Surabaya berलिh menjadi pejabat daerah
yang tunduk pada kekuasaan Kompeni. Di Surabaya ditanam -
penguasa asing Kompeni berpangkat gezaghebber yang ber-
kedudukan di kota Surabaya. Kedudukan gezaghebber di Sur-
abaya berada di bawah gouverneur van Java's Noordoost-Kuust
(Gubernur Pantai Utara-Timur Jawa) yang berkedudukan di -
Semarang. Pada waktu-waktu tertentu para bupati pantai
Jawa Timur dan Madura diharuskan menghadap ke Semarang se-
bagai tanda setia. Pola ini sebenarnya adalah kelanjutan
dari pola tradisional, ialah diharuskan para bupati untuk
seba (menghadap) ke pusat Mataram pada waktu-waktu tertentu.

Stratifikasi Sosial

Bahasan tentang stratifikasi sosial dimaksud untuk -
menarik garis-garis horizontal yang memiris masyarakat -
menjadi lapisan-lapisan. Dengan demikian akan tampak ada-
nya lapisan yang di atas dan lapisan yang di bawah. Secara
garis besar masyarakat daerah Surabaya mungkin terbagi
dalam dua lapisan, ialah: lapisan atas yang merupakan kelas

yang memerintah dan lapisan bawah dari rakyat mayoritas sebagai kelas yang diperintah. Pada masa sebelum Surabaya jatuh ketangan Kompeni lapisan atas hanya terdiri dari kelas penguasa pribumi yang meliputi bupati (kepala daerah) beserta pejabat-pejabat birokrasi pemerintahan. Keluarga bupati dan pejabat tinggi daerah juga termasuk dalam lapisan yang berkuasa, maka mereka juga menikmati status terhormat dalam masyarakat. Lambang-lambang status kebangsawanan dan kepangkatan, seperti gelar, regalia, pengiring, rumah, pakaian dan lainnya membedakan mereka dengan rakyat kebanyakan.

Namun setelah daerah Surabaya, seperti halnya daerah daerah pantai Jawa Timur lainnya, jatuh ketangan pemerintah Kompeni, maka terjadilah dualisme pemerintahan. Dikatakan dualisme karena meskipun pemerintah Kompeni dengan figur pusat Gubernur Jendral telah menggantikan kedudukan raja Mataram, tetapi untuk mengurus pemerintahan daerah Kompeni masih menggunakan tenaga-tenaga birokrasi tradisional. Dapat dikatakan bahwa pola-pola dan sistem pemerintahan daerah tradisional masih dipertahankan berlakunya. Dalam praktek bupati-bupati daerah masih berkuasa terhadap rakyat dalam wilayah kekuasaannya, meskipun secara hirarkis kepala-kepala pribumi itu berada dalam pengawasan kepala-kepala asing (Belanda).

Gezaghebber pada jaman Kompeni yang berkedudukan di kota Surabaya itu adalah sebagai kepala daerah yang membawahkan Jawa Timur, termasuk Ujung Jawa Timur dan pulau Madura. Kedudukannya adalah satu tingkat di bawah Gubernur Pantai Utara-Timur Jawa di Semarang. Seperti telah dikatakan di muka gezaghebber membawahkan kepala-kepala bawahan yang berstatus militer (para komandan) yang berkedudukan di daerah-daerah. Sebagai puncak hirarki penguasa asing adalah Gubernur Jendral di Batavia. Laporan dari bawah ke atas melalui jalur: komandan -- gezaghebber -- gubernur -- gubernur jendral¹².

Lapisan bawah yang merupakan lapisan mayoritas dapat dibagi-bagi dalam golongan (grouping) menurut okupasi, etnis, segregasi permukiman, kekayaan dan sebagainya. Kota bandar Surabaya yang merupakan kota bandar terbesar kedua di pulau Jawa sesudah Batavia sudah pasti mempunyai penduduk yang lebih heterogin dibandingkan dengan distrik - distrik lainnya di kabupaten Surabaya. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pola kepemimpinan yang berlaku. Namun sebelum hal ini dibahas perlulah ditinjau lebih dahulu aspek geografis dan morfologis masyarakat daerah Surabaya.

Batas-batas wilayah Surabaya pada masa kekuasaan pri-bumi yang merdeka dalam abad ke-17 tidak dapat diketahui dengan jelas, demikian pula halnya waktu Surabaya di bawah kekuasaan kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Inggris Raffles membagi daerah kekuasaan Surabaya menjadi sembilan divisions, terdiri dari: Jabakota, Pemimi, Jenggala, Rawapulu, Gunungkendeng, Kabu, Lengkir, Japan dan Wirasaba, yang mempunyai jumlah penduduk 127.938 jiwa (tahun 1815)¹³. Namun suatu hal yang aneh bahwa Kota tidak tercantum dalam pembagian itu. Data mengenai pembagian daerah Surabaya nampak makin jelas pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terutama setelah dasawarsa ketiga abad ke-19.

Daerah afdeling atau kabupaten Surabaya meliputi distrik-distrik yang tersebar di daerah delta sungai Brantas (atau disebut sungai Surabaya). Dari kota daerah tersebut meluas: ke timur sepanjang 6 pal, ke selatan 22⁶pal (7 jam perjalanan dengan kereta), ke barat-daya 33 pal (10 jam perjalanan), dan ke barat 12 pal¹⁴. Sekitar pertengahan abad ke-19 kabupaten Surabaya meliputi sembilan distrik ialah: distrik Kota, distrik jabakota, Jenggala I, Jenggala II, Jenggala III, Jenggala IV, Rawapulu I, Rawapulu III dan distrik Kabo¹⁵.

Kota Surabaya memanjang di kanan dan kiri Kali Mas. Menurut P. Bleeker perkampungan Cina, Melayu dan Madura terletak disisi timur Kali Mas, memanjangi tepi sungai tersebut. Kampung Cina berhadapan dengan wijk Eropa, yang terletak di barat sungai. Kampung Melayu berada di sebelah utara kampung Cina. Di bagian timur ke dua perkampungan ini berbatasan dengan kampung-kampung Jawa¹⁶. Selain orang Cina, Eropa, dan Melayu, di kota Surabaya masih terdapat kelompok suku bangsa Nusantara maupun bangsa asing yang lain, seperti orang Arab, India atau disebut Koja, dan orang Bugis, Mandar, Makassar, Bali dan lainnya, namun jumlah mereka tidak banyak, sehingga tidak membentuk perkampungan khusus. Orang Madura dan Jawa termasuk sebagai penduduk pribumi.

Di distrik-distrik luar Kota Surabaya, terutama di daerah-daerah pertanian heterogenitas penduduk makin menipis. Di daerah-daerah ini terutama hanya terdapat orang Cina, Arab dan beberapa orang Eropa yang mengusahakan pabrik gula. Dari seluruh gambaran komposisi penduduk tersebut di atas dapat diketahui bahwa daerah Surabaya, terutama distrik Kota, merupakan wadah untuk keanekaragaman kegiatan yang mereka lakukan. Meskipun ada variasi bentuk kegiatan untuk mencari penghasilan namun secara garis besar dapat diketahui bahwa bentuk kegiatan yang paling menonjol adalah kegiatan di bidang perdagangan dan perusahaan. Hal ini memang sesuai dengan sifat kota Surabaya sebagai kota bandar perdagangan. Namun peranan dalam bidang perdagangan dan perusahaan bukanlah dipegang oleh penduduk pribumi yang merupakan mayoritas, tetapi oleh golongan etnis minoritas, seperti orang Cina dan Arab, juga oleh kelompok orang-orang suku Nusantara yang lain, seperti orang Melayu,

Bugis, Makasar, Mandar dan Bali. Perdagangan besar ekspor dan impor berada di tangan orang Eropa (Belanda, Jerman dan lainnya), yang juga sebagai pemilik toko-toko besar di Kota dan perusahaan transportasi.

Untuk memperoleh gambaran lebih konkrit tentang im-bangan peranan golongan etnis di bidang perdagangan dan perusahaan pertokoan, dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

TABEL I. JUMLAH PEDAGANG DAN PEMILIK TOKO DI KOTA
KOTA SURABAYA (DALAM TAHUN 1856)

Pedagang	besar	kecil	jumlah
Eropa	30	44	74
Cina	38	403	441
Arab	10	142	152
Melayu	20	115	135
Jawa	-	200	200
Jumlah	98	904	1002

Sumber : J.Hageman, "Bijdrage tot de kennis van
de residentie Soerabaja", III, 21e jaar
gang, i (1859), hlm.13.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kegiatan dalam perdagangan besar dipegang oleh orang-orang asing. Orang pribumi hanya melakukan perdagangan kecil-kecilan, termasuk pemilikan toko-toko atau warung-warung kecil. Ini pun jumlahnya masih kalah besar dibanding dengan orang Cina. Padahal apabila dilihat dari im-bangan jumlah penduduk, penduduk Cina jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan penduduk Jawa, seperti nampak pada tabel berikut :

TABEL II. IMBANGAN JUMLAH PENDUDUK JAWA DENGAN CINA
DI KOTA SURABAYA (EN. 1849-1856).

! tahun	! jumlah penduduk Jawa *)	! jumlah penduduk Cina **)	!
! 1849	! 34.834	! 4437	!
! 1850	! 35.483	! 4203	!
! 1851	! 85.470	! 4606	!
! 1852	! 87.062	! 4481	!
! 1853	! 87.540	! 4480	!
! 1854	! 87.959	! 4256	!
! 1855	! 88.277	! 4242	!
! 1856	! 88.557	! 4572	!

Sumber: *) J. Hageman, " Bijdrage tot de
kennis van de residentie Soerabaya"
TNI, 21e jaargang, i (1859), hlm. 28.

**) J. Hageman, Soerabaya 1857 en
vroeger, MS. KITLV, H.15, paragraaf 5.

Orang pribumi selain menjadi pedagang kecil, pengu-
saha toko atau warung, juga ada yang mempunyai matapenca-
harian sebagai tukang kerajinan, pekerja atau pelayan, se-
perti tukang kayu, tukang besi, tukang timah, penyamak ku-
lit, pembuat sepatu, penjahit, pembatik, penenun, pencuci
pakaian, pelayan rumah tangga dan sebagainya. Selain menjadi
pedagang ada juga orang Melayu yang menjadi tukang penukar
uang, tukang kerajinan dan lainnya. Diantara orang Arab ter-
dapat para pemberi pinjaman uang (rentenir), profesi yang
juga banyak dilakukan oleh orang-orang Cina kaya.

Diantara orang Cina kaya mempunyai kedudukan terhormat
dan berpengaruh, seperti misalnya " Han Boeijko " (Han Bui-ko),
seorang kapten Cina Surabaya yang terkenal kaya raya dan pe-
nah menyewa tanah daerah Besuki dan Penarukan dari Daendels¹⁷.

Ada di antara mereka yang memiliki pabrik-pabrik gula yang mengadakan kontrak dengan pemerintah. Orang-orang Cina kaya sering meminjamkan uang kepada pejabat-pejabat pribumi dengan bunga tinggi. Menurut Hageman seorang Bupati Kasepukan Surabaya yang bernama Raden Tumenggung Cakranegara pernah mempunyai banyak hutang kepada seorang Cina rentenir, sehingga separo dari tanah miliknya terpaksa disewakan untuk membayar hutang¹⁸.

Orang-orang Eropa kebanyakan menduduki jabatan terhormat di dalam birokrasi pemerintahan Eropa di Kota Surabaya, seperti di kantor Residen, Kantor Asisten Residen dan dinas-dinas lain dalam kota, termasuk dinas dalam urusan pelabuhan. Orang-orang Eropa swasta yang berokupasi sebagai pengusaha dan pedagang juga memperoleh status terhormat dalam masyarakat, justru karena mereka orang Babat seperti halnya para penguasa Belanda di Surabaya. Di samping itu di kota bandar besar seperti Surabaya, yang lain dengan daerah pedalaman, kekayaan merupakan lambang status yang cukup penting, yang sangat berpengaruh pada tingkat penghormatan masyarakat terhadap pemiliknya. Dalam pada itu lambang status kebangsawanan di Kota Surabaya sudah mulai kabur perannya, meskipun jika masih terasa, hanyalah terbatas pada lingkungan birokrasi penguasa pribumi yang masih diakui eksistensinya oleh pemerintah Belanda.

Pola Kepemimpinan

Sudah disebutkan di muka bahwa kadar heterogenitas penduduk di distrik Kota Surabaya lebih tinggi dari pada di distrik-distrik di luar Kota yang lebih merupakan daerah pertanian. Keadaan seperti ini sangat berpengaruh pada pola kepemimpinan. Dalam beberapa hal pola kepemimpinan di distrik luar

Kota masih meneruskan pola lama tradisional, seperti pada masa penguasa-penguasa pribumi sebelum pertengahan abad ke-18. Di situ campur tangan kekuasaan Eropa (Belanda) tidak begitu nampak. Sekali-kali hanya kelihatan para kontrolir Belanda yang sedang memeriksa daerah-daerah pertanian. Pada masa sebelum pertengahan abad ke-18, apalagi pada abad ke-17 pada waktu penguasa pribumi (adipati) daerah Surabaya masih merdeka penuh, pengurusan masalah-masalah - kotapun berada dalam tangan pejabat-pejabat pribumi.

Pada waktu daerah Surabaya berada dalam kekuasaan Mataram (sesudah tahun 1625) di samping penguasa daerah pribumi Surabaya sendiri, kadang-kadang datang pejabat pusat kerajaan yang diutus oleh Sunan untuk memeriksa kelancaran tugas tugas pemerintah daerah, terutama di bidang perpajakan dan cukai bandar¹⁹. Namun setelah Surabaya dikuasai oleh Belanda (Kompeni), di Kota Surabaya di samping terdapat penguasa - daerah pribumi (bupati), terdapat juga penguasa-penguasa Belanda yang juga memerintah, bahkan mengawasi seluk beluk - mengenai pemerintahan yang dijalankan oleh bupati. Dapat dikatakan bahwa kedudukan bupati sejak itu hanyalah seperti "pelayan besar" dari kekuasaan Belanda. Ia harus lebih memperhatikan keinginan atasan orang Belanda daripada kepentingan orang yang diperintahnya.

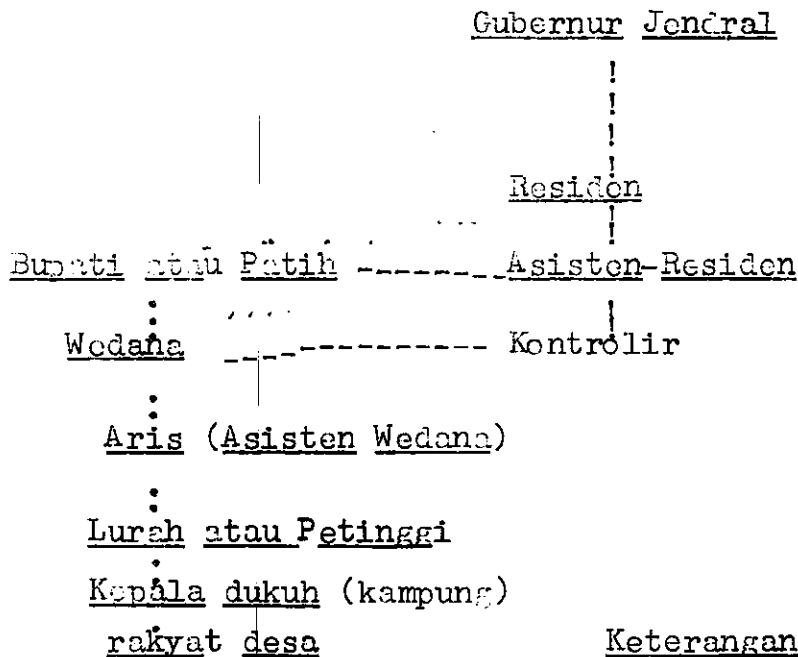
Jalur mengalirnya perintah dari atas ke bawah pada masa Surabaya masih merdeka adalah: adipati -- bupati -- umbul²⁰ -- demang -- petinggi -- atau lurah. Namun jabatan umbul (abad ke-17) yang setingkat dengan distrik itu pada masa - masa selanjutnya rupanya sudah tidak dipakai lagi, bahkan pada sumber-sumber dalam abad ke-19 itu sudah tidak ditemukan lagi pada nama-nama hirarki jabatan kepala daerah di Surabaya. Adapun hirarki kepala-kepala daerah dari bupati

ke bawah di daerah Surabaya dalam abad ke-19 adalah: bu-pati, wedana (kepala distrik), aris (kepala dari bagian wilayah distrik), kemudian kepala-kepala desa dengan nama lurah, petinggi, atau kebayan; setelah itu barulah kepala dukuh (atau yang di Kota Surabaya disebut kepala kampung)²¹

Di distrik Kota Surabaya perkampungan-perkampungan - golongan etnis dikepalai oleh kepala-kepala dari golongan mereka sendiri. Kepala-kepala ini diangkat oleh pemerintah Belanda dengan diberi pangkat-pangkat kemiliteran, seperti letnan, kapten atau mayor, disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah penduduk dan berat ringannya urusan yang ditangani. Dengan demikian terdapat nama kapten atau mayor Cina letnan Melayu, kapten Arab dan seterusnya. Cara ini dimaksud untuk lebih mempermudah pengurusan, terutama yang menyangkut hukum, tatacara adat istiadat dan sebagainya.

Demikian pemecahan kepemimpinan di dalam Kota Surabaya yang memang sangat heterogin itu. Kekuasaan Bupati Surabaya lebih ditujukan kepada pengaturan penduduk pribumi dengan segala masalahnya, seperti: kependudukan, keamanan, pengerahan tenaga kerja dan lainnya. Urusan kesehatan, transportasi, ekonomi perdagangan, pengairan, perbandaran, semuanya diurus oleh dinas-dinas dari pemerintah Belanda. Demikian pula halnya urusan pekerjaan umum dan kemasyarakatan (seperti masalah rumah bordil, rumah madat) ditangani oleh dinas pemerintah kolonial.

Hubungan antara kepala-kepala orang Belanda dan kepala-kepala pribumi dalam abad ke-19 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Keterangan :

- ! = jalur hubungan antar kepala-kepala Eropa.
- = jalur antara kepala Eropa dengan kepala pribumi.
- ... = jalur antar kepala-kepala pribumi.

Dari skema tersebut nampak sekali adanya dualisme pemerintahan yang membawa akibat adanya dualisme kepemimpinan. Bupati dan kepala-kepala pribumi lainnya mempunyai kedudukan sebagai perantara yang sulit. Kadang-kadang harus menghadapi dilema antara: memihak atasan Eropa dengan akibat hilangnya kepercayaan rakyat kepadanya atau memihak rakyat dengan akibat kemarahan atasan atau lebih buruk lagi pemecatan atas dirinya. Pola kepemimpinan seperti itu tidak hanya terjadi di daerah Surabaya, tetapi juga di daerah-daerah lain yang berada dalam kekuasaan Belanda.

Di pihak rakyat, rakyat sekan-akan dihadapkan kepada dua orang tuan. Di hadapan kepala-kepala pribumi mereka harus bersikap pada masa kekuasaan feodal pribumi, tetapi yang aneh ialah bahwa dihadapan tuan-tuan Eropa pun mereka juga dituntut untuk bersikap seperti itu. Cara-cara penghormatan tradisional juga berlaku bagi rakyat yang bertemu dengan kepala-kepala asing. Demikian pula sikap yang harus dilakukan oleh orang-orang pribumi yang bekerja pada rumah-rumah orang Belanda, baik itu pejabat pemerintahan maupun kepala kepala pabrik atau perusahaan.

Kesimpulan.

Dari seluruh uraian di atas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Stratifikasi sosial di daerah Surabaya sebenarnya - tidak banyak berbeda dengan di daerah-daerah lainnya di Jawa.
- Namun kota Surabaya yang merupakan kota bandar terbesar kedua setelah Batavia mempunyai penggolongan atau pengelompokan (grouping) masyarakat yang cukup intensif, baik pengelompokan dari segi etnis, okupasi, segregasi permukiman, tingkat kekayaan sebagai lambang status - dan tingkat ketrampilan berustaha.
- Pengelompokan yang intensif tersebut mempunyai pengaruh kepada kebijaksanaan kepemimpinan di distrik Kota, baik yang melanjutkan kepemimpinan pribumi tradisional maupun kepemimpinan asing yang lebih bersifat rasional.
- Secara umum dapat dikatakan bahwa seperti halnya di daerah lain pemerintahan di daerah kabupaten (terutama distrik Kota) Surabaya bersifat dualistis yang menggoyahkan kemandirian wibawa kepemimpinan tradisional dan memecah loyalitas rakyat bawahan.

C A T A T A N

- ¹ Lihat Surat Opperkoopman Andries Scury kepada Heeren XVII, tertanggal 22 Oktober 1615, dalam J.K.J. de Jonge, De opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indië, IV (1869), hlm.28. Mengenai penyerahan pasukan Mataram atas kota-kota - pantai Jawa Timur sebagian besar dilakukan melalui darat, karena seperti dilaporkan oleh J.P.Coen Mataram lebih kuat di darat dari pada di laut (lihat De Jonge, De opkomst, IV, hlm. 34-35; juga H.T.Colenbrander, ed., Jan Pietersz. Coen, Beschiedten omtrent zijn bedrijf in Indië, I, 's Gravenhage, 1919, hlm 118-119; cf. B. Schrieke, Indonesian Sociological Studies, II, The Hague/Bandung, 1957, hlm. 139-140).
- ² H.J.de Graaf & Th.G.Th. Pigeaud, "De eerste Moslimse vorstendommen op Java: Studies over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw", edisi VKI, LXIX, 's Gravenhage, 1974, hlm.183. Mengenai peperangan antara Surabaya dan Mataram lihat surat laporan "Commendeur" Hendrik Brouwer kepada Heeren XVII, tertanggal 27 Juni 1612, dalam De Jonge, De opkomst, IV (1869), hlm.2. Juga surat J.P.COEN kepada Heeren XVII, tanggal 24 Juni 1618 (ibid., IV, hlm.81)
- ³ Mengenai jatuhnya kota bandar Gresik dan Jaratan atas kesaksian J.P.Coer terjadi pada permulaan bulan September 1613. Waktu J.P.Coen tiba di bandar Gresik pada tanggal 14 September tahun itu juga, ia menyaksikan kota Gersik telah terbakar dan rusak, sedangkan penduduknya telah banyak yang menyingkir.

Menurut keterangan penduduk, kota Gresik dan Jaran-
tan telah 14 hari berselang diduduki pasukan Mata-
ram; lihat surat J.P. Coen kepada Heeren XVII tang-
gal 1 Januari 1614, dalam De Jonge, De opkomst, IV
(1869), hlm. 14.

- 4 Lihat Dagregister gehouden int Casteel Bataviavant
passerande daer ter plaetse als over geheel Neder
landts-Indie, 1624-1629 (register tanggal 22
Agustus 1624).
- 5 Seperti dikutip oleh B. Schrieke, Indonesian Sociolo-
gical Studies, I, hlm. 26.
- 6 Dagregister, 1624-1629, loc.cit.
- 7 Dagregister, 1624-1629, tanggal 1 Mei 1625.
- 8 H.J. de Graaf, "De opkomst van Raden Troenodjojo",
Djawa, XX (1940), hlm. 57. Cf. W.L. Olthof, ed.,
Babad Tanah Jawi in Proza, Javaansche Geschiedenis
(Poenika Serat abad Tanah Djawi saking Nabi
Adam doemoegi ing Taren 1647) I, 's Gravenhage,
1941, hlm. 129.
Dalam perang Trunajaya Pangeran Kajoran pernah
menyingkir ke Surabaya untuk bergabung dengan
menantunya, Trunajaya; lihat H.J. de Graaf, "Het
Kadjoran Vraagstuk", Djawa, XX (1940), hl. 284.
- 9 Lihat Babad Tanah Djawi, edisi W.L. Olthof, hlm. 133-134
Tradisi Jawa menyebutkan bahwa Pangeran Pekik akhirnya
dibunuh atas perintah Sunan Amangkurat I di ibukota
Mataram (Plered) beserta seluruh keluarganya, karena
ia dipersalahkan mengambil Rar^oOyi, puteri pingitan
(sengkeran) raja, untuk dikawinkan dengan cucunya
ialah Pangeran Adipati Anom, yang kelak setelah men-
jadi raja bergelar Sunan Amangkurat II; lihat H.J.
de Graaf, "De regering van Sunan Mangkurat I Tegal
Wangi, vorst van Mataram, 1646-1677", bagian 2,
's Gravenhage, 1962 (edisi VKI, XXXIX), hlm. 7-8.
Cf. P.J. Veth, Java, Geografische, Ethnologisch, His-
torisch, II, Haarlem, 1912, hlm. 15.

- 10 Mengenai perang Pacina ini diceritakan dengan panjang lebar di dalam Babad Pacina, MS. Perustakaan Sanabudaya, A/2. Juga lihat A.KA. Gijsberti Hedenpijl, "Zwerftocht van Sultan P.B.II na dien vlucht uit den Kraton te Kartasoea, op 30 Juni 1742", BKI, LXIV, 1918.
- 11 Mengenai teks lengkap kontrak ini lihat "Articulen van reconciliatie, vrede - vriend - en bondgenootschap tussehen de Doorlugtige Nederlandsche Oost-Indiesche Compagnie ter eenre en den Soesoehoenang Pacoeboena Senapatty Ingalaga Abdul Rachman Panatagama ter andere zyde...", dalam De Jonge, De opkom IX, hlm 434 dst.
12. Sebagai contoh misalnya usul untuk menaklukan Blambangan dari Gezaghebber yang diajukan kepada Gubernur Semarang, kemudian diteruskan kepada Gubernur Jendrak untuk mendapat persetujuan; lihat "Missive van Java's Noord-Oostkust" tertanggal 15 Maret 1767, dalam MS. Overgekomen Brieven, ARA kode KA.3107, hlm.45; juga "Missive Johannes Vos, Surabaya 17 Februari 1767 (terutama pada artikel 1 dan 2) dalam ibid., hlm.97. Termuat juga pada Babad Blambangan, MS.LOr. 2183, pupuh, XV, pada 36-43.
- 13 Daftar terperinci mengenai penduduk Surabaya pada jaman Raffles, lihat T.S. Raffles, History of Java, I London, 1817, hlm. 276-277, pada tabel : "General Account of the Cultivation and Population of Surabaya, 1815".
- 14 J. Hageman, "Bijdrage" ; op.cit., hlm. 129
- 15 Tempat kedudukan Wedana distrik dari masing-masing distrik trik wedana distrik kota Surabaya, di kampung Kalianyer Kota Surabaya; Wedana Distrik Jabakota, di desa Jetis (dekat pos Seraten); wedana distrik Jenggala I, di desa Gedangan (dekat pos Seruni) ; Wedana Jenggala II di Sidukari; Wedana Jenggala III di Krian; Wedana Jenggala IV di Tamansari; Wedana Rawapulu I, di desa Porong; Wedana Rawapulu II, di desa Bulang; sedangkan Wedana Kabo, di desa Gedek. Lihat ibid., hlm. 136-160.

- 16 Lihat ElBleeker, " Fragmenten eener reis over Java. Reis door Oostelijk Java", TNI, 11e jaargang, afl. 7-12 (ii) (1850), hlm. 101; juga lihat J. Hageman Oostelijk Java en Madura, II, MS. KITLV H.118. prgf.108.
- 17 Karena pemerintah Belanda sangat membutuhkan uang, salah satu jalan yang ditempuh untuk memperoleh uang adalah menjual tanah-tanah pemerintah kepada orang swasta. Daerah Besuki dan Penarukan oleh pemerintah semula disewakan kepada Kapten Cina Surabaya yang sangat kaya bernama Han Suik-ko. Waktu Kapten Cina ini meninggal, maka penyewaan diteruskan oleh anaknya bernama " Han Tianpit " (dalam sumber lain disebutkan Han Ciam-pit). Dalam tahun 1810 daerah-daerah itu bahkan dijual sama sekali kepadanya seharga 400.000 zilveren Spaanschen matten (lihat Rapport van de Landschappen Besoekie en Pannaroekan, 1813, MS.AN. kode: Probolinggo, no. 6d.hlm.7-8. Mengenai nilai 1 zilveren Spaansche matten, lihat J. Hageman, " Geschied - en Aardrijkskundig overzicht van Java", TBG, IX (1860) hlm. 335, yang mengatakan bahwa 1 Spaansche mat = f 2,66. Dalam kamus Van Daale Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal disebut : 1 zilveren Spaanschen mat = f 2,25 a f 2,40. Mengetahui penguasa daerah Basuki " Han Boeijko " dan " Han Tian-pit " lihat juga MS.RA. Collectie Nederburg no. 507, hlm. 73b-76b, pada sub-judul : Afgaande Aparte Missive van de . . Nicolaus Engelhard Gouverneur van Java's Noord-Oostkust aan Hun Hoog Edelheeden de Hooge Indische Regering te Batavia (27e A 1803)".
- 18 J. Hageman, Oostelijk Java en Madura, II, MS. KITLV, H.118. prgf.106.
- 19 Pada tahun 1644 Kyai Mitinegara dan Kyai Wirajaya - dua orang pejabat tinggi pusat diutus oleh Sultan Agung untuk mengadakan perlawatan ke kota-kota pantai dari Gresik sampai Jepara, dengan tugas khusus untuk mendesak para bupati pesisir agar segera menyerahkan hasil pungutan cukai bandar dan pajak daerah kepada pemerintah pusat kerajaan (lihat Daghregister, 1644, hlm. 369; dan Daghregister, 1653, hlm. 109; cf. B.Schrieke, Indonesian Sociological Studies, II (1957), hlm. 195, 373 n 447).

20

Mengenai jabatan umbul lihat antara lain L.W.C. van den Berg, De Inlandsche rangen en titels op Java en Madoera, 's Gravenhage, 1902, hlm.55 (untuk daerah Sumedang) ; umbul di daerah Semarang pada masa Trunajaya, lihat De Jonge, opkomst, VII, hlm. 137, juga hlm.xiii. Menurut ' Surat Pustaka Raja Puwara' tugas umbul adalah: amadanani tetiyang padhusunan, alenngah Mantri Penatus" (lihat J.Brandes, " Register op de prozaomzetting van de Babad Tanah Djawi" VBG, LI (1900), hlm.144 (lampiran II)

21

J. Hageman, " Bijdrage tot de kennis ...", op.cit., 136.

Yogyakarta, 22 Agustus 1982.

SEMINAR SEJARAH LOKAL

TOPIK : I.

STRATIFIKASI SOSIAL DAN POLA
KEPEMIMPINANNYA

Oleh :

Prof. Dr. Ngurah Bagus
Universitas Udayana

SEMINAR SEJARAH LOKAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1982

STRATIFIKASI SOSIAL DAN POLA KEPEMIMPINANNYA

(Beberapa Catatan Masalahnya di Bali)

I Gusti Ngurah Bagus
Universitas Udayana

1. Pengahuluan

Kajian yang diketengahkan dalam seminar ini masih berupa draft awal. Oleh karena itu karangan ini masih perlu disempurnakan lagi baik mengenai materi maupun cara pendektannya. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum tersedianya waktu yang cukup untuk mengumpulkan data di lapangan, membaca karangan-karangan sarjana lainnya mengenai Bali, yang walaupun belum banyak diterbitkan orang namun telah ada tulisan-tulisan yang menyanggung masalah itu,¹ penelaahan konsep-konsep yang diperlukan sehingga dapat mengungkapkan fakta tersebut secara memadai.² Hambatan waktu itu di samping datang dari pihak Panitia Penyelenggara juga keterbatasan penulis dalam banyak hal sehingga menurut hemat penulis karangan ini belum memuaskan benar.

Walaupun terdapat beberapa hambatan sebagaimana diuraikan di atas namun karena penulis menganggap seminar ini sangat penting untuk saling bertukar pikiran dalam rangka mengembangkan penelitian terutama mengenai masalah sosial di daerah, maka penulis usahakan juga untuk turut menyumbangkan pendapat berupa kajian yang belum lengkap/belum sempurna.

2. Permasalahan

Walaupun dalam seminar ini telah ditentukan judulnya oleh Panitia, namun karena menurut hemat penulis dengan judul tersebut masalahnya yang memang terlalu luas, maka penulis persempit per-

masalahannya. Hal itu mengingat adanya perkembangan masyarakat Bali yang melahirkan adanya stratifikasi sosial kelas preyayi sebagaimana hal itu secara pepintas telah pernah penulis uraikan (1979). Maka itu, penulis batasi masalahnya dengan membicarakan stratifikasi tradisional saja yaitu khusus mengenai masalah kasta (bangsa). Ini pun dalam penyajian kasusnya dibatasi hanya yang menyangkut hubungan garis besar antara kasta Triwangsa (orang bangsawan) di satu pihak dengan orang Jaba (kebanyakan) di pihak lain. Hubungan antara Triwangsa (bangsawan) dengan Jaba (orang kebanyakan) dalam sepanjang sejarah mengalami perubahan terlebih-lebih semenjak seluruh pulau Bali ini dikuasai oleh orang Belanda. Lebih-lebih setelah Indonesia merdeka perubahan besar makin dialami. Perubahan tersebut sudah barang tentu tercermin pula dalam aspek pola kepemimpinan. Untuk memberikan gambaran tentang bentuk dan bagaimana hubungan antara kasta Triwangsa dengan Jaba mengenai situasinya pada masa kini, merupakan tujuan pokok dari kajian ini. Dengan pendek dapat dikatakan bahwa kajian ini hendak menjawab (sementara) bagaimanakah bentuk dan fungsi stratifikasi sosial tradisional itu sekarang ini.

3. Pendekatan

Dengan telah dirumuskan permasalahan sebagai terurai di atas ^{makalah} diharapkan ini dapat memberikan jawabannya walaupun jawaban yang belum tuntas karena kajian ini baru berupa catatan. Melihat uraian permasalahan di atas jelas pula bahwa masyarakat Bali sekarang ini berada dalam masa transisi, seperti tampak melalui adanya perubahan dalam pelbagai aspek yang mendukung bentuk stratifikasi sosial tersebut. Gejala seperti ini sudah barang tentu memerlukan kajian teori yang memadai yang mampu menjelaskan fenomena tersebut.

Sesuai dengan tujuan penelitian dan melihat permasalahan di atas, maka kajian ini akan menganalisisnya berdasarkan pendekatan struktur dan proses melihat sejauh mana bentuk-bentuk struktur masyarakat berhubungan/berinteraksi dan bagaimana proses perubahan tersebut dilihat dari segi dimensi waktu.³ Dengan pendekatan seperti itu sedapat mungkin dalam kajian ini diungkapkan relasi/hubungan pokok bukan saja yang terjadi antarkasta melainkan juga relasi yang menyeluruh/total dari sistem sosial lainnya sehingga tergambarlah jaringan hubungan itu sebagai suatu sistem. Relasi seperti itu tidak saja dilihat dari segi fungsinya dalam rangka terjalinnya hubungan itu tetapi yang penting ialah kekuatan-kekuatan apa yang menyebabkan adanya perubahan itu sepanjang proses itu terjadi.

Dinamika interaksi yang terjadi antarsistem sosial yang terfokus pada relasi kasta serta bagaimana proses perubahannya akan memberikan gambaran tentang realitas stratifikasi sosialnya. Dengan hubungan antarkasta yang terlihat dalam relasi patronase tersebut akan tercermin pula bagaimana pola-pola relasi itu terjadi terutama pola kepemimpinan yang tampak dalam struktur tersebut.⁴

4. Sistem Stratifikasi Sosial

Seperti dikatakan di atas di Bali sekarang terdapat kelas preyayi yang timbul dalam masyarakat. Maka itu dalam kajian ini akan dikhususkan pembicaraannya mengenai sistem stratifikasi tradisional ialah tentang kasta. Untuk istilah kasta di Bali terdapat dua kasta untuk itu ialah warna dan wangsa. Karena istilah tersebut berasal dari bahasa Sanskerta, namun kata kedua khusus timbul dalam bahasa-bahasa di Indonesia khususnya dalam bahasa Bali (Bagus, 1979). Dalam kajian ini penulis memilih istilah kasta.

Akhir-akhir ini karena pengaruh bahasa Indonesia yang demikian besar dalam kehidupan masyarakat Bali maka kata-kata itu pun tidak dipakai lagi dalam masyarakat.

Seperti dikatakan di atas, karena kajian ini khusus melihat hubungan antarstratifikasi dalam arti yang menyeluruh (kontekstual) maka dalam karangan ini akan diuraikan pula bentuk-bentuk sosial lainnya sejauh tampak mempunyai kaitan dengan sistem kasta seperti sistem komunitas, sistem kekerabatan, dan sistem organisasi sukma rela. Tentang sistem kasta sebagaimana halnya di Indonesia, di Bali dikenal istilah Brahmana, Satria/Kesatria, Wesia, dan Jaba/Sudra. Istilah yang terakhir ini (Jaba) tumbuh dari proses perkembangan lokal. Di samping istilah ini ada lagi istilah lainnya, Kaula. Karena berdasarkan perkembangan makna maka istilah Jaba yang berkaitan dengan perkembangan sosial di Bali, dipilih untuk makalah ini. Urutan penyebutan kasta di atas adalah sesuai dengan jenjang tinggahnya terutama apabila hal itu ditinjau dari segi idealnya. Tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian terutama sebagai yang tercermin dalam pergaulan antardiri. Hal ini tergantung pula nanti pada aspek lain seperti kekuasaan, pendidikan, kedudukan dalam masyarakat, kekayaan, dan lain-lainnya.⁴ Seseorang dapat diketahui termasuk ke dalam salah satu kasta di atas pada umumnya melalui namanya, misalnya gelar Ida Bagus (untuk laki-laki), Ida Ayu (untuk perempuan), gelar Cokorde, Anak Agung, dan bahkan I Gusti di beberapa daerah untuk Satria. Karena itu untuk ini dibedakan adanya Satria Dalem di satu pihak dan Satria Jaba di pihak lain. Selanjutnya gelar Gusti/Gusi untuk Wesia, dan orang yang memakai nama teknonim pada umumnya dimasukkan Jaba.

Nama seseorang berkaitan dengan sistem klen yang menunjuk adanya hubungan sistem stratifikasi itu dengan sistem kekerabatan.

Dengan demikian tampaknya hubungan yang erat antara kedua sistem itu. Maka dari itu apabila membicarakan sistem sosial di Bali, maka kedua sistem itu harus dibicarakan sekaligus. Sudah barang tentu titik berat uraiannya tergantung dari tema karangan yang akan disusun. Mengenai susunan itu yang berlaku di Bali, dapat di-citukkan lagi yaitu: Brahmana, Satria, dan Wesa disebut dengan satu nama Triwangsa. Dengan demikian terdapat dua lapisan kasta yaitu Triwangsa ialah orang Bangsawan dan Jaba orang kebanyakan. Hubungan yang mengatur antarkasta itu sebagaimana halnya di India adalah didasarkan pada sistem penisahan antara nilai kesucian (suci, sukla) dan pencemaran (letch, cemor). Seandainya terjadi suatu pencemaran akibat sesuatu maka hal itu dapat disucikan dengan upacara penyucian yang disebut prayascita. Hal itu tampak dalam aturan yang menata hubungan antardiri seperti dalam bidang perkawinan, pernikahan bahasa, adat makan, dan lain-lainnya. Aturan/norma ini dalam perkembangan zaman telah ada yang dihapus dan dalam beberapa hal telah tampak pula adanya kelonggaran, tidak seberat dahulu. Hal ini telah penulis uraikan secara panjang lebar dalam sebuah tesis (Bagus, 1979).

Khusus mengenai hubungan antarkasta yang berkaitan dengan salah satu fungsinya dalam masyarakat, akan diuraikan di bawah ini, tetapi sebelum membicarakan hubungan itu dan menurut pendekatan di atas yang hendak melihat pula adanya hubungan yang menyeluruh/total dengan sistem sosial lainnya maka dalam karangan ini terlebih dahulu akan diuraikan pula secara sekilas tentang sistem sosial lainnya terutama dalam tingkat desa.

Dalam hubungan antardiri dan demikian pula dalam hubungan antarkelompok penting sekali diperhatikan sistem komunitasnya terutama ialah tentang desa, banjar, juga dalam hal ini subak.

Desa sebagai kesatuan sosial yang berdasarkan teritorial (Kayangan Tiga) warganya terikat pada kuil-kuil (pura) desa, terutama secara bersama menuju kuil bale agung, puseh, desa atau segara, sedangkan untuk kuil dalam (konatian) dalam satu desa mungkin saja terdapat lebih dari sebuah. Warga desa terikat terutama dengan penyelenggaraan segala sesuatu yang menyangkut upacara dan pemeliharaan dari semua kuil itu. Dalam hal ini ada suatu badan dari warga desa yang mengatur, memimpin semua penyelenggaraan itu yang sangat besar dipengaruhi oleh sistem kasta itu. Di sini terutama di desa apanase akan tampak hubungan antarkasta baik karena pimpinan dipegang oleh kasta Triwangsa, baik dalam penyelenggaraan masalah kewargaan maupun upacara. Yang jelas akan tampak terutama peranan pedanda (pendeta) dari kasta Brahmana yang akan memimpin upacara terlebih-lebih dalam upacara yang besar.

Dalam banyak desa di Bali terutama di daerah apanase warga desa untuk efisiensinya dibagi ke dalam banjar, suatu komunitas yang lebih kecil yang fungsinya biasanya menyangkut masalah sosial ekonomi. Apabila desa menitikberatkan pada masalah adat dan keagamaan maka di sini adalah mengenai masalah sosial, aspek sosial dari keagamaan terutama yang menyangkut masalah pelaksanaan upacara siklus hidup anggota warga, di samping menyelenggarakan masalah kesejahteraan/ekonomi dari warga banjar. Tetapi di samping itu juga dapat menyelenggarakan masalah yang menyangkut kewajiban desa dan juga urusan pemerintahan (Lurah). Terakhir ini banyak menyangkut masalah yang berkenaan dengan urusan kedinasan. Pengaturan semua tugas yang dibebankan kepada warga banjar itu semuanya diatur oleh pimpinan banjar (Kelian banjar).

Dalam mengatur semuanya itu sama halnya dengan pengaturan yang terjadi dalam warga desa, pengaruh sistem kasta sangat besar. Bahkan pada banjar inilah paling sering terdapat konflik-konflik yang menyangkut tentang hubungan antarkasta itu. Dalam banyak hal maka kasta Satria dengan Wesya sering memperlihatkan keterlibatan mereka dalam bidang ini.

Mengenai subak yaitu organisasi pengairan terutama di sawah, di samping menyelenggarakan masalah teknis penanaman di sawah-sawah juga mengadakan ibadat/upacara baik pada tingkat subak maupun di atas tingkat subak seperti upacara besar di danau dan di pantai.

Seperti dikatakan di atas sistem kasta sebagaimana di India adalah berhubungan erat dengan sistem kekerabatan. Dalam bidang ini telah cukup banyak penelitian yang dilakukan orang (V.E. Korn, 1932; Helder dan Clefford Geertz, 1975; Bagus, 1979; James A. Boon, 1977; M. Hobart, 1980). Khusus dalam hubungan ini terutama yang diketengahkan adalah menurut pendapat penulis dengan tak mengesampingkan pendapat sarjana lain terutama Helder dan Clefford Geertz. Terlebih-lebih hal itu apabila dihubungkan dengan masalah kasta sebagaimana halnya sama dengan masyarakat khususnya di Bali terdapat pula kelompok kerabat yang disebut keluarga (kuren) yang memiliki sistem keturunan patrilineal (purusa, uliban nuani).

Dalam sistem kekerabatan di Bali keluarga merupakan kesatuan sosial yang amat penting, karena di dalamnya terlihat hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Hal ini jelas terlihat dalam hukum adat Bali yang mengatur segala sesuatunya mengenai hal itu.

Keluarga dalam sistem klen terjaring ke dalam kelompok kekerabatan yang lebih luas. Berdasarkan struktur dan fungsinya penulis bedakan antara klen kecil (sangah gedo) dengan klen besar (soroh). Klen kecil terdiri dari orang-orang yang menuja kuil leluhur yang hubungan kekerabatannya dapat dilacak secara geneologis dan di antara mereka terdapat keadaan yang menunjukkan adanya saling mengenal; (2) biasanya memiliki harta pusaka yang antara sesama warga kecil masih dapat dipersebutkan menurut hukum adat waris; (3) melakukan pelbagai kegiatan gotong royong terutama dalam bidang upacara agama dan beberapa aspek dalam bidang sosial ekonomi. Sedangkan klen besar adalah warga yang menuja kuil leluhur jauh yang hubungan kekerabatannya terjadi secara geneologis dan sulit untuk dapat dilacak dan bahkan tak dapat dilacak lagi; (2) warga yang menuja kuil leluhur yang semuanya itu merupakan kesatuan dengan mengidentifikasikan dirinya ke dalam struktur kasta; (3) kecuali itu mereka melakukan kegiatan gotong royong terutama dalam upacara-upacara kuil leluhur.

Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa sistem kekerabatan memiliki hubungan yang erat dengan sistem kasta. Klen, sebagaimana halnya dengan jati di India, menjadi pendukung kasta. Maka dari itu membicarakan sistem kasta terutama dalam hubungannya dengan sistem patronase boleh dikatakan tidak dapat dipisahkan. Seperti telah terbukti dari penelitian-penelitian terdahulu maka memperhatikan hubungan antara kasta dengan sistem klen terlebih-lebih dalam gerakan-gerakan sosial adalah sangat penting.

Tentang organisasi sukarola (goka) walaupun kekuatannya adalah sukarola, namun dalam beberapa hal penting disinggung dalam kaitan ini. Organisasi ini didirikan karena adanya kebutuhan akan sesuatu seperti untuk menanam, mencangkul, menabuh gunulan, dll.

Sifat organisasi umumnya temporer, karena itu dapat didirikan dan diubahkan menurut keperluan. Yang paling erat berhubungan dengan sistem patronase ialah organisasi yang agak tradisional terutama yang menyangkut organisasi tari-tarian dan gamelan untuk upacara.

5. Relasi Patronase dan Pola Kepemimpinannya

Dalam bagian ini walaupun dalam sistem stratifikasi tradisional seperti telah diuraikan terdapat lebih banyak relasi yang memperlihatkan hubungan itu, namun dalam hal ini akan diuraikan hanya relasi ketergantungan/patronase antara hubungan kasta Brahma dengan kasta lainnya yang dikenal dengan sebutan hubungan Siva dengan Sisya (Pasiwaan) serta hubungan antara kasta Satria dengan kasta Jaba yang dikenal dengan sebutan hubungan Gusti dengan Pradik/Pradu (Pagustian).

Yang dimaksud dengan hubungan Siva dengan Sisya ialah hubungan orang dari kasta Brahma sebagai pemimpin upacara, khususnya di sini sebagai pendata (pedanda) dengan kasta-kasta lainnya sebagai Sisya, yaitu orang-orang yang patut dipimpin upacaranya. Sedangkan hubungan Gusti maksudnya ialah hubungan kasta yang umumnya dari kasta Satria (dan juga Wesya) sebagai penguasa/tuannya/ratu/prabu, ponceol, dan panyaj atau pengikutnya/pengiringnya. Hubungan patronase antara Gusti seperti itu biasanya bersifat turun-temurun diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagaimana aturan-aturan yang berlaku antarhubungan itu serta bagaimana pola kepemimpinannya, secara ideal, dapat dibaca dalam berbagai teks-teks lama yang banyak terdapat di Bali. Tetapi sejauh mana teks-teks itu dipakai secara kontekstual dalam kehidupan perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini akan tercermin pula dalam pola kepemimpinannya yang walaupun terdapat variasi, namun intinya

apabila meminjam istilah Max Weber adalah bercorak otoritas tradisional yang kadang-kadang karena kelebihan yang dimiliki oleh pemimpinnya (Siva, Gusti) dapat pula bersifat kharismatik (Arnold. S. Wennebron, 1966:101-105). Hal itu nyata dilihat dalam peristiwa sejrah yang sering terjadi di Bali yang dikenal dengan istilah puputan 'gugur bersama dalam kemuliaan' (Soedjana, dkk, 1978:45-62).

Dalam keterbatasan, kajian ini hanya mengemukakan hal-hal yang umum saja serta dua masalah yang didapat dari dua desa ialah mengenai hubungan Siva-Sisya dari desa Manduang Kelungkung dan hubungan Gusti-Panjah dari desa Batubulan Kabupaten Gianyar.

6. Gambaran Situasinya di Desa Manduang dan Batubulan

6.1 Latar Belakang

Suatu bentuk sistem sosial yang kita dapati sekarang ini tentulah merupakan suatu hasil dari proses sejarah sosial yang telah berlangsung lama sebelumnya. Untuk memahami masalah hubungan antarkasta, terutama dalam hubungan yang menyangkut kepemimpinannya, diperlihatkan uraian latar belakang sejarah sosial yang renik mengenai hal ini tentu tidak dapat diuraikan di sini. Apa yang dapat disajikan hanyalah garis besarnya saja yang menyangkut terutama aspek sosial budaya yang melatarinya.

Apabila dipelajari dari segi yang lebih mendalam sebenarnya hubungan antarkasta Triwangsa dan Jaba itu terutama kalau dilihat dari faktor penyebabnya ialah adanya konflik-konflik (ketegangan-ketegangan) yang memisahkan sistem nilai yang menjadi dasar pemisahan itu. Masalah ini diungkapkan dalam pelbagai bentuk penuangan sebagaimana yang tampak dalam berbagai bentuk sastra (dongeng, prasasti klasik, mitologi). Dalam mengungkapkan masalah itu

terkandung antara lain tentang protes-protes sosial yang dilon-
tarkan masih dalam bentuk tersembunyi. Kemudian pertentangan se-
cara terbuka menurut suatu penelitian terjadi setelah tahun dua-
puluh setelah seluruh Bali dikuasai Belanda. Walaupun pemerin-
tah kolonial dalam melaksanakan politik raja terutama mengenai
masalah adat berdasarkan hukum adat Bali, namun konflik mengenai
masalah adat yang berkaitan dengan sistem nilai yang melatarinya
terus berlangsung. Masalah ini berjalan terus sampai mencapai
puncaknya yaitu dengan dihapuskannya salah satu aturan tentang
perkawinan campuran antarkasta oleh DPRD Bali pada tahun 1950.
Adanya perubahan yang revolusioner ini adalah akibat suatu produk
dari suatu proses pertentangan kasta yang telah berjalan berabad-
abad. Keputusan itu berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat-
nya.

Walaupun keputusan itu telah diumumkan pada tahun 1950 na-
mun tersenyawa dan dilaksanakan dalam masyarakat menghendaki
waktu yang lama juga. Dengan keputusan itu berarti secara formal
aturan (pasuara) yang mengatur perkawinan antarkasta tidak mempu-
nyai kekuatan hukum lagi. Penghapusan ini tidak dapat dilepaskan
dari penelitian politik yaitu setelah terjadinya penggabungan NIT
ke dalam RIS, kemudian RIS menjadi Negara Kesatuan Republik In-
donesia yang berkedudukan Pancasila, maka di samping itu peratur-
an tentang adat yang disebut dengan "pasuara". Lingkungan
peraturan politik Jawa itu selanjutnya apabila dikaji latar
belakang sosialnya ternyata peranan "pasuara" itu pula menjadi
pendukung-mendukung ideologi politik sebagaimana tercermin dalam
perjuangan partai-partai yang menonjol persaingannya antara tahun
50-an sampai dengan tahun 60-an.

Pengaruh partai-partai tersebut yang mendukungkan perjuangan ideologi egaliter serta adanya kesadaran akan harga diri dalam kalangan kelompok masyarakat menyebabkan jurang pemisah antara kasta makin lenah dan menjadi kendur. Perjuangan itu turut mendapat bantukan dari kasta Jaba yang secara terbuka ditentengkan dalam tempat desa dan banjar sehingga menimbulkan banyak ketegangan-ketegangan sosial. Suatu contoh yang konkrit mengenai ini dapat juga ditunjuk pada peristiwa yang terjadi pada tahun 1968 yaitu dengan dibentuknya suatu organisasi dari klen Pasek (dalam arti yang luas) dengan nama Ikatan Warga Pasek Sanak Pitu. Yang diperjuangkan oleh gerakan ini antara lain mengangkat Siwa sendiri sehingga dengan demikian dapat melepaskan diri dari ikatan patronase dengan kasta Brahmana.⁵ Dari gambaran itu jelas tampak adanya suatu proses kendurnya ikatan patronase itu. Pada beberapa tempat di Bali, ikatan patronase Gusti-Panjak bahkan telah menghilang dan tak dirasakan lagi adanya dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk memperoleh gambaran yang konkrit akan diuraikan mengenai kedua jenis patronase serta pola kehidupannya yang terdapat dalam sistem patronase itu yang diambil seperti dikatakannya di atas, dari dua kabupaten di Bali terutama tentang hubungan Siwa-Sisya (Pesiryan) dari desa Manduang, kabupaten Klungkung dan hubungan Gusti-Panjak (Tagustan) dari desa Batubulan, kabupaten Gianyar.

6.2 Situasinya di Desa Manduang

Kelompok masyarakat, keluarga Brahmana yang ada di desa Manduang asal-usulnya adalah dari desa Cucukan yang terletak di kabupaten Klungkung juga. Keluarga itu datang dan menetap di desa tersebut adalah atas permintaan masyarakat desa sendiri (nuur) yang ter-

jadi pada abad yang lalu. Di desa itu keluarga tersebut diberikan sebidang tanah untuk tempat tinggal yang disebut Geria serta sebidang sawah yang disebut Catu. Pendeta itu yang masih hidup sekarang berumur kira-kira 63 tahun bernama Ida Pedanda Gede Handu-ang. Tugas beliau terutama adalah memimpin upacara terutama upacara yang agak besar, meliputi semua upacara yang di Bali disebut Panca Yadnya yaitu (1) upacara yang menyangkut upacara peralihan/siklus hidup dari lahir hingga upacara potong gigi dan menikah (Manusa Yadnya); (2) upacara kematian aktif-aktif (Pitra Yadnya) serta upacara penyucian roh leluhur (nyekah); (3) upacara untuk menjadi pemimpin upacara untuk kuil desa yang disebut perangku desa (Resi Yadnya, Mawinton); (4) upacara perayaan-perayaan pelbagai kuil keluarga (daia) dan kuil desa (pusch, bala agung, dan dalem setra), kuil-kuil dan upacara yang menyangkut pertanian (subak, nasceti) semuanya disebut Dewa Yadnya; dan terakhir (5) upacara penghormatan kepada roh yang dianggap mengganggu, yang disebut buta (Buta Yadnya).

Dari uraian di atas nyatalah bahwa seluruh upacara warga desa baik individual maupun desa (komunal) adalah dilaksanakan di bawah petunjuk dan dipimpin oleh beliau. Dalam menyelenggarakan semua upacara-upacara boleh dikatakan sesuai dengan sifat upacara tersebut seluruh keluarga, klen, banjar, desa, subak (komunitas), dan juga akan melibatkan organisasi sukarola (geka). Beliaulah yang memberikan petunjuk dari awal, seperti menetapkan kapan dewa-sa upacara itu dilaksanakan, besar kecilnya upacara, petunjuk-petunjuk cara membuat sesajen, cara pelaksanaan upacara, hingga sampai pada tercapai akhir ialah memimpin upacara tersebut sesuai dengan peraturan agama. Dalam menyelenggarakan semua itu terutama apabila jenis upacara itu besar, biasanya keluarga beliau (Dayu tukang,

Pendeta Istri) selalu turut terlibat menyelesaikan sesajennya. Persiapan upacara seperti itu dapat berlangsung sehari-hari. Dalam situasi inilah akan terlihat hubungan antara beliau sebagai pendeta dengan orang (Sisia) yang mengadakan upacara. Karena segala sesuatu dilaksanakan itu telah diatur oleh adat, maka biasanya pelaksanaan upacara itu akan dapat berjalan lancar. Sedangkan warga desa sebagai sisia mempunyai kewajiban menyelenggarakan semua upacara besar yang diadakan oleh pendeta tersebut. Bahkan juga dalam hal ini segala perbaikan rumah tempat tinggal pula, terutama perbaikan yang berat-berat ditanggung oleh warga desa (sisia).

Dalam memimpin upacara dan penyelenggaraan segala sesuatu yang diberikan oleh warga desa adalah dipimpin serta diberikan/diurusungkan secara ikhlas. Menurut keterangan informan di dalam memimpin upacara-upacara baik perorangan maupun masyarakat tidak ada suatu motif keuntungan yang tampak dari pihak pendeta (Siwa). Sampai kini tidak ada seseorang pun dan klen-klen tertentu di desa tersebut yang hendak memutuskan hubungan siwa tersebut (nilai bakti, rukun manusya). Dengan demikian pimpinan pendeta tersebut masih secara patuh diikuti oleh warga desa (sisia). Perasaan yang menurut warga desa disebut "sih-bakti" (saling cinta dan menghormati) masih terjalin secara baik antara siwa dengan sisia.

Berdasarkan di atas jelas masih tampak lenyapan hubungan antar klen dalam bidang upacara di desa Manduang. Apabila dilihat dari kepemimpinan Siwa (pendeta) terhadap sisianya jelas tampak otoritas tradisionalnya. Hal itu dapat terjalin baik karena masih terpeliharanya hubungan baik antar-Siwa dan Sisia di desa tersebut.

6.3 Situasinya di Desa Batubulan

Desa Batubulan sekarang merupakan salah satu desa yang ramai dikunjungi wisatawan karena dikenal dengan pertunjukan barongnya. Di desa ini yang paling menonjol kedudukannya terutama dalam adat adalah klen Satria Dalen yaitu kasta Satria dari keturunan Dalen. Sejarahnya adalah berhubungan erat dengan Satria lainnya di kabupaten Gianyar serta berhubungan sejarah Satria Dalen lainnya di kabupaten Klungkung. Mengenai desa Batubulan yang khusus akan diuraikan adalah hanya yang berstatus moncol (kepala klen) saja yang bergelar Cokorda, dan mendiami kompleks perumahan yang disebut puri, ialah puri Batubulan yang terletak di sebelah timur jalan. Di puri tersebut berdiam pula keluarga lainnya yang statusnya bukan moncol. Moncol inilah yang berhubungan dengan bawahannya (panjak) terutama yang masih terlihat pada empat banjar sekitarnya yaitu (1) banjar Den Jalan, (2) banjar Batur, (3) banjar Pakambangan, dan (4) banjar Telabah. Untuk memperlihatkan hubungan yang erat antara puri dengan keempat banjar tersebut, maka kelompok banjar tersebut disebut pula dengan satu nama yaitu Jero Kuta. Dengan melihat letak keempat banjar tersebut yang mengelilingi puri serta dengan sebuah seperti itu, menunjukkan bahwa dalam sejarahnya dahulu semasih zaman kerajaan keempat banjar itulah yang merupakan pengikut serta pengiring moncol yang terpercaya dan paling terdekat. Hubungan politis seperti itu sekarang tentu tidak ada lagi serta yang ada hanyalah hubungan yang bersifat adat. Hal itu tampak dalam kegiatan yang berhubungan dengan memelihara (ngayah) bangunan-bangunan adat terutama bangunan-bangunan suci di kuil keluar (panerajan), dan kewajiban lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan upacara-

upacara pura yang besar-besarnya. Dalam hal ini terdapat pengaturan hierarki (ngayuh) melalui sistem banjar. Dalam mengatur hubungan itu tidak hanya berlaku sifat mekanisme melalui struktur moncol-banjir, melainkan yang memegang peranan penting, yang turut menentukan perannya mempererat hubungan itu ialah perilaku dari moncol/keluarga moncol terhadap warga keempat banjar tersebut. Maka itu hubungan pribadi keluarga puri harus dapat mengabdikan hati warga banjar. Walaupun dari dahulu ada otoritas tradisional yang dimilikinya namun faktor psikologis memainkan peranan penting pula. Dalam hal ini harus diperlihatkan sikap saling menolong, saling mengunjungi sesuai dengan tradisi (utu) terutama apabila terjadi upacara-upacara keluarga di keempat banjar itu. Rupanya hubungan inilah yang merupakan salah satu faktor yang dapat mengikat relasi patronase yang diwariskan itu hingga masih dapat tampak fungsinya sekarang ini.

Di samping itu, ikatan-ikatan itu dituangkan lagi dalam tingkat desa dengan sikap kerelaan keluarga puri memberikan tawaran secara sukarela kepada warga desa untuk kepentingan sosial desa seperti tanah untuk sekolah, lapangan olah raga. Dalam hal ini terdapat juga peranan kuil puri oleh banjar lain yaitu banjar Pagotok untuk pertunjukan barong di luar Jero Kuta. Faktor lain yang turut juga mengikat ialah kewajiban pengerjaan sawah milik puri (nandu) yang diberikan kepada orang-orang tertentu di keempat banjar itu. Dengan demikian ada pelbagai cara yang digunakan untuk memperkuat adanya relasi patronase di desa tersebut.

Dari uraian di atas ternyata bahwa walaupun hubungan patronase tidak seperti waktu zaman kerajaan, namun masih tampak kelangsungannya terutama berdasar pada masalah adat dan upacara agama.

Untuk memperkuat relasi patronase di samping merakai cara yang telah diwariskan (otoritas tradisional) juga dengan usaha sikap pribadi serta memiliki faktor kekayaan dalam rangka memelihara, memperkuat serta bahkan memperluas pengaruhnya.

7. Kesimpulan

Sejauh ini hasil di atas bagian ini masih berupa catatan karena itu kesimpulan ini masih bersifat sementara dan perlu diteliti lebih lanjut. Apabila dilihat secara menyeluruh dari dua kasus yang disajikan terutama hubungan patronase Siga-Siga (Pasiwaan) walaupun terdapat konflik-konflik sosial di Bali umumnya, agaknya di Mandung atau di Klungkung umumnya masih menunjukkan keadaan yang boleh dikatakan tidak begitu mengalami perubahan. Pola kepemimpinan masih bersifat otoritas tradisional. Sedangkan di daerah Gusti Panjak (Pogustian) memperlihatkan adanya perubahan hubungan dengan faktor perkembangan sejarah politik yang terjadi di seluruh Bali. Hubungan yang masih ada ialah keterlibatan dalam masalah adat dan agama. Dalam rangka mempertahankan gengsiya dalam tingkat desa ada pelbagai usaha yang ditonjolkan seperti menggunakan kekayaan yang ada serta usaha pendekatan pribadi yang menonjol (utun).

Catatan

1. Untuk menyebut beberapa di antaranya adalah karangan-karangan Hildred Geertz dan Clifford Geertz (1975); Mark Hobart (1975); Clifford Geertz (1960);
2. Menurut hemat penulis memahami hubungan stratifikasi sosial dan pol. kerd. k. lainnya sangat besar manfaatnya membaca konsep-konsep yang dikembangkan dalam antropologi politik. Dalam menyusun makalah ini penulis banyak mengambil idenya dari para sarjana ini (A.R. Radcliffe-Brown, 1940; M. Fortes and E.E. Evans-Pritchard (1940), E.R. Leach, 1954; John Beattie, 1966; Michael Banton (1965); Max Gluckman, 1962; Elizabeth Colson, 1968:189-193; Cohen Ronald, 1973:661-681).
3. Khusus dalam hal ini bacalah karangan D.E. Brown (1976).
4. Tentang konsep relasi dan sistem patronase bacalah karangan Gluckman di atas (1962) dan Michael Banton (1968).
5. Tentang gerakan Pasok dapat dibaca dalam buku James A. Boon (1977).

Daftar Pustaka

- Bagus, I Gusti Ngurah
1979 "Perubahan Penaklukan Bentuk Kormat dalam Masyarakat Bali, Sebuah Pendekatan Etnografi Berbahasa". Tesis. Jakarta (belum terbit)
- Banton, Michael (Ed)
1968 The Social Antropology of Complex Societies. London.
- 1969 Political System and The Distribution of Power, London.
- Beattie, John
1970 Other Cultures Aims Methods and Achievements in Social Anthropology. London
- Boon, James A.
1977 The Anthropological Romance of Bali 1597 - 1972, Dynamic Perspective in Marriage and Caste, Politics and Religion. Cambridge.
- Brown, D.E.
1976 Principles of Social Structure. Duckworth.
- Cohen, Ronald
1973 "Polotocal Anthropology", dalam Handbook of Social and Cultural Anthropology. (Ed. John J. Honnigan) Chicago.
- Colson, Elizabeth
1968 "Political Anthropology"(The Field), dalam International Encyclopedin of the Sosial Sciences Vol. ii. New York.
- Fortes, M.E.E. Evans-Pritchard, Eds.
1940 African Political System. London.
- Geertz, Hildred and Clifford Geertz
1975 Kinship in Bali. Chicago.
- Geertz, Clifford
1980 Negara, The Theatre State in Nineteenth - Century Bali. Princeton.

Gluckman, Max (Ed.)

1962 Essays on The Ritual of Social Relations. Manchester.

Hobard, Mark

1975 Orators and Patrons: Two Types of Political Leader in Balinese Village Society, dalam Political Language and Oratory in Traditional Society. H. Bloch (Ed). London.

1980 Ideas of Identity. The Interpretation of Kinship in Bali. Denpasar.

Korn, V.A.

1932 Het Adatrecht van Bali. 's-Gravenhage.

Leach, E.R.

1964 Political System of Highland Burma, A Study of Kachin Social Structure. London.

Radcliffe - Brown, A.R.

1940 Preface to African Political System, ed. H. Fortes and E.E. Evans-Pritchard, London.

Soedjana, dkk.

1978. "Puputan dalam Konteks Kebudayaan Bali" dalam Cakra-wala Pola Ilmiah Pokok: Kebudayaan, Suatu Acuan Penggarapannya, I Gusti Ngurah Bagus (Editor). Denpasar.

Tannebaum, Arnold S.

1968 Leadership (Sociological Aspects), International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 9. London.

Seminar Sejarah Lokal

Topik : I

STRATIFIKASI SOSIAL DAN KETERMINIFIKASI

oleh :

DR. Onghokham

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
SEMINAR SEJARAH LOKAL
1982

Stratifikasi Sosial dan Kepemimpinan.

Yang akan menjadi pokok pembicaraan dalam makalah ini adalah kepemimpinan dan stratifikasi dipedesaan Jawa, khususnya Jawa Timur. Dalam makalah P dan K. untuk seminar ini ada usul untuk melihatnya dengan teori "Great Tradition" (tradisi kraton/kota) versus tradisi desa (little tradition). Memang kita akan memakainya disini namun hanya untuk sebagian yakni dalam menilai aspek-aspek budaya dalam kepemimpinan. Akan tetapi budaya hanya sebagian dari pada hidup manusia. Untuk realita politik dan sosialnya kami ingin menunjukan pada tiga teori mengenai desa yang sedang ramai didiskusikan. Sebenarnya hanya ada dua teori sebab teori pertama mengenai desa melahirkan teori kedua yakni teori J. C. Scott yang terkenal sebagai "Ekonomi Moral Petani",¹⁾ sedangkan yang kedua adalah dari Samuel L. Popkin, *The Rational Peasant*,²⁾ (Petani rasional) Kontroversi kedua tokoh ilmu sosial Amerika ini sedang mengisi majalah ilmu sosial Barat dan saya yakin akan mempunyai dampak mendalam mengenai apa yang kita sebut desa itu.

Memang sebelum kita dapat membicarakan kepemimpinan dan stratifikasi sosial kita harus menjawab : "apa desa itu ?" seperti juga diusulkan oleh proposal P dan K dengan menyentuh soal Great and Little Tradition-nya.

Desa tertutup v s Desa terbuka.

Scott dan Popkin berdebat mengenai masalah dampak pasaran dunia terhadap petani/desa, dampak kolonialisme terhadap petani/desa dan pembentukan negara (state formation) terhadap desa. Sedangkan disini kita hanya akan berbicara mengenai kepemimpinan dan stratifikasi. Berhubung dengan ini saya rasa bahwa Teori-teori Scott dan Popkin dapat dipakai sebagai saling mengisi.

Popkin dapat dipakai sebagai koreksi terhadap Scott. Biar pun saya pada umumnya memihak Scott namun karena berbagai pengamatan tajam Popkin saya akan memakainya dalam berbagai aspek.

Tiga Teori tentang Desa.

Teori tradisional dan konvensional mengenai desa adalah bahwa desa itu adalah semacam ikatan sosial yang mirip dengan sosialisme primitif atau komunisme primitif. Desa adalah sesuatu kesatuan masyarakat yang otonom, yang dapat bertahan terhadap semua gejolak dunia dan merupakan benteng dari budaya tradisional. Desa dalam rangka ini diromantisir dan di-idealkan.

Banyak cendekiawan dari berbagai negara dan masyarakat melihat desa mereka dengan kaca mata demikian. Di Inggris desa disamakan dengan Yeomanry yang hilang, di Perancis le village (desa) dilihat sebagai utama peradabannya yang a.l. terungkap dalam seri-komik Asterix yang terkenal yang antara lain sekarang juga di Indonesiakan oleh Sinar Harapan ; Orang Rucia, pra-revolusi, mengagungkan mir dan seterusnya. Juga di Jawa dan Indonesia kita menemukan romantisasi yang sama, antara lain Tjipto Mangunkusumo dalam penelitiannya mengenai Saminisme, Soetardjo Kartohadikusumo dalam bukunya "DESA", dan pun berbagai sarjana Belanda seperti De Kadt Angelino, Furnicall, Boeke dan seterusnya. Sebenarnya para ahli hukum adat Belanda maupun Indonesia menganut teori dan sebagainya baik dari Van Vollenhoven sampai ke Soepomo.

Kalau kini di-Indonesia masih ada banyak penganut teori diatas ini maka di Barat orang-orang mulai meninggalkan teori tersebut. Mengapa orang Barat kini mulai meninggalkan teori seperti dari Furnivall, De Kadt Angelino, para ahli hukum adat, dan sebagainya baik dalam pembicaraan mengenai Indonesia, Malaysia atau Asia Tenggara pada umumnya?. Itu adalah karena peristiwa dibagian dunia ini. Asia adalah dunia petani/dunia pedesaan dan disana terjadi revolusi-revolusi seperti revolusi Indonesia, Cina, Vietnam dan lain-lain. Revolusi menurut pendapat Barat seharusnya datang dari kota : Paris atau St. Petersburg yang sekarang dinamakan Leningrad. Bagaimana menjelaskan sekarang kalau revolusi itu datang dari desa seperti di ERG, Vietnam, Indonesia dalam tahun 1945 dan 1965/1966 dan seterusnya ?.

J. Scott mengadakan koreksi terhadap pandangan desa sebagai ikatan gotong-royong; tentram dan damai yang tidak memiliki otonomi untuk bergolak. Menurut Scott para petani didesa itu adalah demikian miskin, perekonomian mereka adalah perekonomian "cukup" (cekap) yang pada dasarnya berarti serba kurang sehingga seluruh dinamika/masyarakat pedesaan ditetapkan oleh ini. Jadi kalau ada beban-beban yang lebih berat yang mengancam ekonomi serba kekurangan ini maka akan ada pembrontakan. Desa ini pada umumnya adalah korban-korban dari pasaran bebas, pasaran dunia, pembentukan negara modern baik kolonial maupun nasional seperti misalnya

Thailand dalam abad ke-XX ataupun Republik Indonesia. Akan tetapi dalam teori moral ekonomi ini desa tetap merupakan satu kesatuan dan hubungan patron-client atau kependimpinan dan para pengikut adalah saling menguntungkan dan tidak bersifat eksploitatif antara lain karena berdasar pada saling mempertahankan hidup (survival).

Dinamika petani ditentukan oleh prinsip "keamanan dahulu" (safety first) dan karena prinsip ini tanah-tanah petani bila mungkin tersebar di beberapa pelosok, petani memiliki beberapa patron (atasan), petani tidak berani menanam terlalu banyak uang dalam satu usaha dan seterusnya. Desa bagi petani merupakan lembaga utama yang melindunginya dan kesadaran kewarga-negaraan dalam desa adalah tinggi.

Hubungan patron-client (bapak-anak buah) adalah saling menguntungkan dan saling mempunyai kewajiban dan lain-lain. Keadilan disini yang penting akan tetapi keadilan berdasarkan perasaan dan tidak atas norma-norma hukum. Orang tidak tahu **dengan** pasti bilamana petani merasa bahwa keadilan telah dilanggar dan prinsip-prinsip ekonomi-moral petani terancam atau diganggu. Motif-motif ekonomi ini berpengaruh pada kependimpinan dan stratifikasi seperti kita akan melihat nanti.

Berlawanan dengan teori Scott adalah S.L. Popkin yang melihat petani sebagai individu yang rasional yang dapat berinisiatif untuk mencari keuntungan dari pasaran dunia dan kesempatan-kesempatan lain.

Dalam rangka ini hubungan patron-client (bapak-anak buah) dilihat sebagai eksploitatif dan desa dibagi dalam kelas-kelas. Hubungan bapak-anak buah adalah atas dasar favoritisme dimana umpamanya sumber-sumber dan barang-barang serba kurang maka tidak ada jalan lain kecuali membaginya atas dasar favoritisme atau sistim anak-mas.

Dalam satu hal baik Scott maupun Popkin setuju yakni tingkat hidup petani yang serba-kurang (subsistence level). Akan tetapi kalau Scott mengatakan bahwa pembrontakan tani meletus karena ancaman terhadap tingkat hidup rendah ini maka Popkin mengatakan

bahwa petani dapat berontak untuk memperoleh tingkat hidup yang lebih baik jadi tidak hanya karena ancaman saja.

Yang penting dari tesis Popkin adalah pengaruh negara atas kehidupan desa dan struktur desa. Memang dalam masyarakat agraria desa dan petani terlalu penting untuk dibiarkan demikian saja sehingga merupakan suatu lembaga otonom yang berdiri sendiri. Menurut Popkin justru dalam negara tradisional (feodalisme/ kerajaan Asia Tenggara tradisional dan lain-lain) maka negara atau elite akan mempengaruhi lembaga-lembaga desa demi kepentingannya. Desa menurut teori ini dibentuk oleh kepentingan negara, struktur pemilikan tanah apakah tanah itu berbentuk tanah komunal (desa) atau pribadi dan sebagainya, pemerintahan desa, pembagian teritorial, sifat pemukiman, dan lain-lain, dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan memajukan desa dan memperoleh tenaga kerja bakti atau kewajiban militer demi keuntungan negara. Bukti-bukti dari perkembangan pengaruh negara atas desa di Jawa sangat kelihatan dan masuk akal sebab bila desa merupakan satu-satunya sumber bagi elite penguasa maka dengan sendirinya desa akan dibentuk menurut kepentingannya.

Teori Popkin menekankan pada perbedaan-perbedaan dalam desa dan pertentangan-pertentangan internal. Tidak semua diberi dan nerasa warga-desa misalnya buruh tani yang tidak punya tanah tidak merupakan warga-desa penuh paling-paling hanya sebagai penghuni. Keputusan-keputusan desa yang dinamakan musyawarah adalah ditangan segelintir keluarga cikal-bakal saja atau para sesepuh. Popkin juga menekankan kemungkinan dan kesempatan untuk aliansi aliansi antara kelompok-kelompok di desa dengan kelompok-kelompok elite diluar desa yakni dikota/kraton baik dilapangan ekonomi maupun politik. Bagi Popkin hubungan bapak-anakbuah adalah hubungan antara "yang dipertuan" (lord/priyayi) dan petani atau ditingkat desa adalah antara pemilik-tanah dan penggarap tanah. Sebagai konklusi harus dikatakan bahwa Scott adalah ahli Malaysia sedangkan Popkin adalah ahli Vietnam. Kedua struktur sosial ini berbeda. Perbedaan keahlian daerah mungkin juga mempengaruhi teori mereka.

Indonesia yang beraneka ragam seperti disemboyankan oleh moto negara kita "Ehinika Tunggalika" dapat memakai berbagai teori bagi berbagai masyarakat. Saya kira umpamanya bahwa masyarakat dengan struktur klan yang kuat seperti misalnya Minangkabau, Tapanuli dan lain-lain dapat memakai teori Scott sedangkan bagi beberapa bagian dari Jawa teori Popkin adalah lebih cocok atau kombinasi dari kedua teori adalah sangat relevan baginya. Dalam uraian kepemimpinan dan stratifikasi lokal kami akan memakai kedua teori tersebut sebagai latar belakang. Artinya kita melihat teori Popkin hanya sebagai koreksi terhadap teori Scott sebab sebenarnya kedua dapat saling mengisi.

Desa dan Negara.

Menurut tesis Popkin negara dari permulaan mempengaruhi desa dan bahwa desa itu bukan suatu lembaga yang otonom. Bagi priyayi desa dan struktur masyarakat petani itu terlalu penting untuk dibiarkan dan untuk tidak diorganisir demi kepentingan elite berkuasa. Perbedaan status antara priyayi dan petani dikatakan adalah bahwa golongan priyayi tidak perlu bekerja dengan tangannya sendiri atas tanah untuk dapat makan beras sedangkan para petani harus menggunakan tenaga untuk mengerjakan tanah. Masalah bagi negara tradisional adalah lalu bagaimana memperoleh bagi golongan priyayi yang non-produktif ini tenaga pekerja dan padi (hasil bumi) bagi elite. Suatu sistem perpajakan atau upeti dan kerja bakti adalah hasil dari ini. Demi kepentingan sistem upeti dan kerja bakti maka penguasaan tanah didesa dan hubungan-hubungan lain diatur dari atas. Sedangkan kepemimpinan didesa disedapat mungkin tidak didasarkan atas kedudukan seorang di masyarakat setempat (desa) akan tetapi atas dasar dekat-jauhnya atau pada aspek loyalitas terhadap priyayi atau pejabat pokoknya terhadap penguasa-penguasa diluar desa. Akan tetapi sebelum melanjutkan pembicaraan mengenai kepemimpinan lokal dan stratifikasinya maka kita harus membicarakan lebih dahulu pemerintah pusat dan strukturnya untuk melihat secara lebih lanjut sifat kepemimpinan lokal ini. Sebab seperti sudah dikatakan negara atau pemerintah pusat ini sangat berpengaruh padanya.

Sering dikatakan bahwa pemerintah tradisional itu sangat tidak efisien khususnya menurut ukuran-ukuran negara modern sekarang. Alat-alat pemerintahannya sangat lemah sehingga daerah-daerah diperintah sebagai daerah-daerah taklukan. Pembentukan negara tradisional sendiri sering dibentuk dengan kekerasan artinya entah pembantaian terhadap dinasti lama, pembunuhan terhadap raja (Ken Arok) atau penaklukan dari kerajaan lama. Sedangkan tiap dinasti baru mendirikan kraton dan pusat kerajaan yang baru. Artinya setiap pendiri kerajaan baru adalah seorang Senopati seperti raja pertama Mataram yang juga disebut demikian.

Priyayi atau elite berkuasa bukan darah raja adalah kawan-kawan seperjuangan dari senopati yang menjadi sultan Mataram pertama itu. Dalam kerajaan tradisional perang merupakan salah suatu fungsi terpenting dari negara. Pengamanan kraton dan pusat itu adalah obsesi dominan. Daerah-daerah yang tidak dapat dikuasai dihancurkan dan dimusnahkan sedangkan penduduk daerah yang ditaklukan sering dijadikan budak-budak atau diangkat ke daerah kraton yang menang. Akan tetapi di daerah-daerah dimana diperkirakan kekuasaan pemerintah pusat masih dapat dipaksakan seperti misalnya di daerah nancanegara atau pun dipasisiran, maka disana semacam warlord (penguasa-penguasa perang) lokal yang menguasai daerah-daerah tersebut dan mereka ditugaskan untuk mengumpulkan pajak (upeti) dan mengorganisir kerja bakti.⁵⁾

Biarapun asal dan fungsi kepemimpinan di daerah dan pusat ini berasal dari penaklukan namun dalam setiap sistim setelah perebutan tentu ada usaha untuk penertiban dan membangun ketertaturan serta melegitimasi kekuasaan dan sebagainya. Kedua usaha dari negara yang baru merupakan sumber-sumber kepemimpinan lokal. Raja dikatakan berkuasa karena dia adalah penerima waku dan menyinarikan kekuasaannya (cahya) kepada jurusan wilayah. Sebagai raja ia adalah pemilik semua tanah yang merupakan sumber penghasilan utama dinegara agraris. Kekuasaan raja ini dalam praktek didelotasikan pada para priyayi termasuk bupati-bupati di daerah yang diberi hak penuh atas hasil (upeti) dan tenaga rakyat yang dibawah mereka dengan ketentuan bahwa sebagian dari upeti diserahkan lagi pada raja dan bahwa priyayi

termasuk yang dimaneanegara mengorganisir tenaga kerja juga untuk pekerjaan-pekerjaan umum di kraton dan demi kebutuhan kraton lain akan tenaga kerja. Pada setiap priyayi diangkat yang disebut panitikan sejumlah chachah (keluarga petani) yang biasanya terdiri dari empat laki-laki dewasa yang merupakan kesatuan pajak dan militer.⁽⁶⁾ Jumlah chachah yang dibawah oleh seorang priyayi ini adalah dasar kekuatan politik dan militernya serta juga sumber penghasilannya (kekayaannya). Bila seorang priyayi meninggalkan jabatannya karena dipaksa atau wafat maka tanah-tanah yang dikuasai chachah-chachahnya juga kembali pada raja. Walaupun ada kecenderungan untuk mengangkat ahli waris atau putra dari priyayi yang meninggalkan jabatannya sebagai penggantinya namun ini tidak selalu demikian.

Kalau pada tingkat priyayi seorang bupati merupakan tingkat pimpinan lokal tertinggi maka bupati atau priyayi mengangkat seorang demang dan bekel dari kalangan chachah-chachahnya, jadi pada tingkat petani, sebagai pengumpul pajak dan tenaga kerja. Kalau jumlah chachah sedikit maka cukup hanya seorang bekel yang diangkat. Demang dan bekel atau hanya bekel merupakan keponimpinan setempat pada tingkat desa sebab baik demang maupun bekel adalah petani (cultivator, kata orang Inggris). Juga pada tingkat demang dan bekel ini kelihatan adanya kecenderungan turun temurun.

KEKAYAAN.

Pada akhir abad ke-XVIII dan permulaan abad ke-XIX adanya yang merupakan alat turun-menurunkan jabatan-jabatan bupati ditingkat priyayi dan demang-bekel ditingkat desa adalah rupanya kekayaan pribadi (uang) dan ini mungkin merupakan faktor juga pada zaman berikutnya. Salah satu perso^{alan} terbesar dari kerajaan-kerajaan tradisional baik di Jawa, ataupun di Sumatra, Eropa dan lain-lain, adalah memperoleh keuangan (cash). Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini jabatan-jabatan dijual pada yang

kaya yang memiliki uang tunai. Demikianlah berbagai jabatan bupati, demang dan bekel dijual pada yang beruang. Yang beruang ini adalah elite politik jadi keturunan bupati demang atau bekel karena ayah-ayah mereka sempat mengumpulkan kekayaan dan anak-anak mereka membeli jabatan-jabatan tersebut karena insyaf akan sumber kekayaan dari jabatan-jabatan itu. Sampai kini orang memerlukan banyak uang untuk dipilih sebagai lurah desa. Dengan mengungkapkan ini kami hanya ingin menunjukkan pada suatu gejala di masyarakat Jawa ini dimana uang / kekayaan juga bisa memainkan peranan untuk menentukan kepemimpinan lokal. Yakni pembelian jabatan untuk mengeruk kekayaan setempat secara lebih efisien.⁷⁾

Akan tetapi kalau diatas maksudnya ditingkat priyayi yang penting adalah penguasaan atas jumlah orang (chachah) yang jabatan-jabatan demang atau bekel dilihat dalam rangka ini maka pada tingkat petani tanah adalah penting. Kalau bagi priyayi yang penting bagi kepemimpinan itu adalah garis genealogis (turun-temurun) dan dekatnya pimpinan desa itu dengannya maka pada tingkat petani dasar-dasar tersebut adalah masalah keturunan atau tidak dari cikal-bakal sebab itu memberikan hak atas tanah. Para petani jauh lebih langsung dari pada priyayi hidup dari tanah dan tanah ini merupakan arti yang sangat penting bagi mereka sebagai satu-satunya sumber hidup. Golongan-golongan didesa dibagi atas dasar kepemilikan tanah ini yang juga berarti para pembayar upeti atau pajak tanah pada zaman kolonial.

Dalam zaman pra-kolonial umpananya kekuasaan demang dan bekel kami mengenal golongan sikap yakni mereka yang punya tanah dan wajib membayar upeti serta menyediakan tenaganya untuk kerja bakti. Dalam zaman kolonial hal ini sama biarpun istilah para pemilik tanah ini berubah. Lurah dalam zaman kolonial dan sebenarnya sampai kini memiliki demikian banyak kekuasaan karena tanah-tanahnya yang luas. Tanah bengkok nya saja sudah lima hektare. Tanah luas ini memberikan dia suatu kedudukan sebagai majikan dari penggarap-penggarap tanahnya atau dari buruh tani. Disampingnya sumber penghasilan yang besar ini memberikan dia kedudukan sebagai patron (bapak) didesa.

Sebelum kita melanjutkan maka kita mungkin harus menyimpulkan berbagai aspek kepemimpinan dan stratifikasi. Yang utama adalah dekat dan jauhnya dari pimpinan tertinggi yakni raja atau bupati pada tingkat rendahan. Dilihat dari kalangan priyayi dasar kekuatan dan kedudukan mereka sangat tergantung dari jumlah *chachai* yang mereka kuasai. Dikalangan petani sendiri tanah merupakan ukuran bagi tingkat sosial. Namun juga dikalangan petani ini tenaga merupakan faktor yang sangat penting sebab tanah-tanah luas hanya dapat dikerjakan oleh tenaga buruh-tani atau penggarap-penggarap dan dikalangan petani kaya jumlah orang yang di bawahinya ikut serta menentukan kedudukannya.

Charisma Para Pemimpin.

Kalau diatas dibicarakan dasar-dasar stratifikasi dan status pemimpin maka ada aspek kedua dari kepemimpinan yang tidak kurang penting artinya yakni *charisma*. Kami sadar bahwa sifat kepemimpinan di Indonesia sangat *charismatis* sifatnya. *Charisma* ini merupakan semacam legitimasi bagi kepemimpinan. Kalau dikalangan priyayi pemikiran legitimasi ini berkisar pada wahyu dan *cahya* yang katanya dimiliki raja yang karena itu berhak berkuasa maka dikalangan petani rupanya bukan wahyu dan *cahya* yang utama akan tetapi kekebalan. Kekebalan inilah yang menjadi legitimasi bagi para pemimpinnya. Pemimpin bagi rakyat petani adalah jago utama istilah jago inilah dipakai untuk mengidentifikasikan yang kini disebut pemimpin. Pada jago ini terikat *sifat kebal*. Asal mula dari konsep-konsep jago dan kebal ini mungkin sekali berasal dari *ethos ksatria* atau dari zaman penaklukan jadi dari keprajuritan. Ketidakamanan daerah-daerah pedesaan semacam zaman pra-kolonial dengan kondisi-kondisi sebagai daerah perbatasan (*frontier society*) menekankan pada konsep jago dan kebal. Dalam babad-babad misalnya seperti umpamanya Babad Ponorogo yang mengisahkan peperangan-perperangan antara para pendatang yang beragama Islam dan penyebar-penyebar agama Islam pertama seperti Batoro Katong yang harus menghadapi tentara Hindu selalu ditekankan sifat-sifat kekebalan dari

Kedua belah pihak serta ke-jagoan mereka. Sampai kini para jago Ponorogo yang disebut ~~warok~~⁹⁾ dikatakan berakar pada zaman Baturo Katong tersebut. Hal ini tidak saja di Ponorogo tetapi agak umum di Jawa sebab pada perkumpulan-perkumpulan sifat jago dan kebal ini terlihat menonjol sekali. Dengan singkat konsep-konsep disekitar jago dan kebal berasal dari adanya demikian banyaknya kekerasan di Jawa pada masa-masa lampau. Sebab untuk selamat dalam peperangan, perkelahian fisik dan perjuangan diperlukan sifat-sifat jago dan kekebalan.

Antara wahyu dan kebal sebagai dasar legitimasi kepemimpinan tidak perlu ada konflik hanya perbedaan pada sifat dalam hubungan Great Tradition dan Little tradition (tradisi kota dan desa). Kedua dapat saling melengkapi. Selain itu dimata masyarakat petani juga para priyayi sampai ke-raja adalah jago dan kebal. Akan tetapi disini juga terlihat perbedaan etos antara kalangan atas dan dunia-desa. Kalau wahyu dan cahaya menekankan hierarchi masyarakat dan bahwa nasib yang menentukan itu maka untuk menjadi jago dan bekal perlu adanya aktivitas yakni pembuktian dari sifat-sifat tersebut. Dengan kata lain kalau dikalangan priyayi pasivitas atau sikap tidak terganggunya seseorang oleh keadaan yang menonjol maka dikalangan bawah justru aktivitaslah yang menjadi unsur penting. Sebab makin kebawah makin banyak diperlukan hubungan ke-atas dan penyelesaian berbagai macam persoalan. Namun khusus hubungan ke-atas inilah yang mengharuskan aktivitas para jago dikalangan petani.

Kalau diatas dikatakan bahwa konsep jago dan kebal berasal dari masapra-kolonial dengan pembentukan negara melalui kekerasan dan keadaan frontier-society (masyarakat/daerah perbatasan/wild west) dari kebanyakan wilayah kerajaan tradisional, maka bagaimana ia berkembang dibawah Pax-Neerlandica ? Pax-Neerlandica atau jaman kolonial menekankan saluran-saluran birokrasi, mentiadakan kekerasan, hierarchi masyarakat yang ditekakan dan seterusnya.¹⁰⁾ Dengan sikat zaman kolonial ini kelihatan sangat bertentangan dengan konsep-konsep jago dari masyarakat. Charisma

kepemimpinan bertentangan dengan rasionalisme dan hierarchi negara-pejabat (beambten stat). Charisma jago seperti juga wahyu bertentangan dengan prinsip hierarchi - demikian juga konsep-konsep disekitar jago seperti kekebalan dan aktivitas. Akan tetapi konsep jago aktivitas dan kekebalan ini kita harus lihat dalam rangka serta kekurangan masyarakat petani dan seba kelemahannya untuk mengerti tidak mele-
tusnya konflik yang banyak antara petani versus kolonialisme disekitar jago.

Sistim jago, konsep kebal dan lain-lain akhirnya berstruktur mendamaikan namun kadang kala dapat menjadi basis pembrontakan dan kasus kekerasan dari bawah terhadap negara. Biarpun kisah-kisah perlawanan terhadap kolonialisme melanda kita namun sebenarnya selama zaman kolonial (bagi Jawa sejak 1830) kita lebih banyak kenal zaman damai. Biarpun negara kolonial ini terkenal sebagai jauh lebih eksplo-
itativ dari pada kerajaan tradisional. Artinya negara kolonial menurut jauh lebih banyak dalam pajak, kerja rodi dan lain-lain dari rakyat dari pada dahulu. Disamping mungkin masih adanya tuntutan-tuntutan tradisional. Dengan singkat peranan jago dengan sifat kekebalan harus berfungsi lain dari pada dalam keadaan pra-1830.

Menurut laporan-laporan Hindia Belanda jago dari pedesaan muncul dari kalangan setingkat (peer-group). Upamanya dari segolongan tuan ~~tengah~~ (tiang cekap) muncul salah seorang dari mereka yang menjadi jago. Demikian juga golongan keluarga cikal-bakal yang memihak fraksi lain dari pada fraksi lurah memiliki jago mereka yang tetap merupakan calon lurah bayangan. Para penggarap juga ada jago tersendiri. Anehnya kelompok-kelompok lurah dari berbagai desa juga memiliki seorang jago untuk mendekati bupati atau pejabat priyayi lain. Jago menjadi semacam calo-kekuasaan (power-broker) antara desa artinya dalam golongan dan kelompok-kelompoknya dengan dunia diluar desa.

Administrasi Resmi.

Secara resmi Hindia Belanda mengatur pemerintahan pangreh-praja yang lengkap dengan mengambil model pemerintahan kraton

di Jawa tengah yang dikirakan sebagai pemerintah tradisional Jawa yang berlaku dimana-mana. Demikianlah bahwa disamping birokrasi Hindia Belanda yang terdiri dari seorang Residen dengan stafnya dengan daerah karesidenan dibagi dalam 4 sampai lima ke-asisten-residenan yang dibagi lagi dalam daerah-daerah yang dikepalai kontroleur. Birokrasi Hindia Belanda ini sangat menyolok dalam perbedaannya dengan konsep penguasaan Jawa-tradisional. Hindia Belanda membagi daerah dalam wilayah-wilayah yang sambung-ber-sambung. Kesatuan wilayah yang terkecil di Jawa adalah desa dan wilayah : satu desa berbatasan dengan yang lain sehingga seluruh pulau Jawa dibagi dalam desa-desa menurut para ahli. ¹²⁾

Disamping administrasi Hindia Belanda ini ada seorang bupati yang daerahnya sejak 1870 bersamaan dengan satu-ke-assisten-residenan. Bupati didampingi seorang patih dan staf lainnya. Sedangkan satu kabupaten ini dibagi dalam wilayah-wilayah : kawedanaan yang terdiri dari beberapa kecamatan dan barulah kita datang pada tingkat desa. Juga administrasi pangreh praja ini berdasarkan hierarchi dan wilayah biarpun menurut konsepsi Jawa tradisional konsepsi tersebut tidak ada sebab yang ada adalah kekuasaan berdasarkan jumlah orang yang dibawahhi seorang penguasa.

Pemerintah kolonial juga membawa lembaga-lembaga lain yang mempunyai tuntutan-tuntutan tertentu terhadap penduduk pedesaan. Sebab setelah 1870, akhirnya sistim tanam paksa, perkebunan-perkebunan yang sebelumnya adalah milik negara kolonial dikuasai oleh swasta Belanda. Akan tetapi perkebunan swasta ini tidak secara 100% merupakan lembaga ekonomi swasta sebab dalam memperoleh tanah atau tenaga kerja bantuan baik dari pejabat Hindia Belanda maupun dari pangrehpraja dan lurah diperlukan. ¹³⁾ Dengan demikian perkebunan merupakan kesatuan politik maupun ekonomi. Bagi rakyat didesa keadaan menjadi sangat kompleks dalam menghadapi dunia luar ini dan muncullah berbagai macam calok kekuasaan atau calok antara dunia desa dan luar.

Calok/Penghubung.

Calok-calok tersebut didesa masih dikenal dengan istilah umum yakni jago-desa dengan sifat-sifat kekebalan namun sekarang tidak saja terhadap senjata akan tetapi terhadap penguasa-penguasa. Memang ada istilah-istilah lain bagi jago ini seperti weri (mata-mata) atau blater (orang pintar) yang mengetahui dunia diluar desa. Perbedaan istilah ini mungkin tergantung dari daerah dan juga dari berbagai tugas penghubung atau jago. Weri misalnya berfungsi dibidang kepolisian dan adalah penghubung antara sejumlah penduduk desa dan polisi. Pada umumnya dunia luar ini termasuk kepolisian mencurigai setiap penduduk desa dan bila ada kejahatan timbul maka seluruh penduduk desa dapat dikenakan tindakan-tindakan polisi seperti penggeledahan rumah dan lain-lain. Hal-hal semacam ini tentu sangat tidak enak dan tugas weri adalah untuk menghindari sekelompok penduduk dari supervisi polisi kolonial. Seorang blater misalnya dapat bertugas sebagai penulis surat resmi yang berisi permohonan, atau protes dari penduduk desa pada penguasa, khususnya kalau surat-surat tersebut tidak dapat disalurkan melalui lurah resmi, atau lurah tidak mau menulung. Blater ini juga sering disebut pokrol-bambu yang dapat berfungsi dalam pengadilan dan membantu orang-orang yang berhubungan dengan hukum.

Ada berbagai istilah lain lagi yang menunjukkan berbagai ¹⁴⁾ fungsi. Konsep jago desa sebagai seorang penghubung (broker) atau calok akhirnya terungkap dalam istilah "palang" bagi misalnya seorang jago-lurah antara lurah-lurah. Sebab biarpun ada camat yang membawahi sekelompok desa mungkin kelompok desa yang disebut kecamatan itu tidak mewakili kelompok yang sebenarnya. Atau kelompok desa tersebut merasa kurang kepercayaan terhadap camat dan wedana dan dari mereka lalu timbul seorang palang. Palang ini dapat langsung berhubungan dengan bupati atau patih tergantung dari siapa yang lebih berpengaruh terhadap pejabat Belanda. Sebab Belandapun biarpun sudah ada ketentuan hierarchis antara bupati dan patih mengikuti pola siapa yang paling efektif berfungsi antara kedua

pejabat pribumi tertinggi didaerah.

Berbagai istilah seperti panewu (kepala kelompok 1000 (sewu) orang atau panglawe (kepala rombongan 25 orang) menunjukkan pemuka atau jago yang seperti dahulu kala dalam zaman pra-kolonialisme juga masih berfungsi sebagai pemimpin atas dasar jumlah orang. Dengan demikian terlihat betapa pelan hilangnya berbagai konsepsi mengenai dasar-dasar kepemimpinan sebab memang dalam struktur agraris masih tetap ada berbagai struktur yang merupakan kontinuitas dari zaman dahulu.

Masalah sekarang adalah bagaimana sebenarnya jago yang dikenal dengan berbagai istilah dan tugas ini berfungsi dalam masyarakat. Apakah jago berfungsi sebagai mewakili dunia desa terhadap penguasa atau ia menjadi alat dari penguasa untuk memanipulir desa? Jago atau calok-calok ini berfungsi di kedua pihak dalam arti bahwa pihak kuat yakni negara biasanya lebih dapat mempergunakan jago. Mungkin sekali jago ini mendapat imbalan dari dua pihak baik atasan maupun bawahan atau kelompok yang diwakilinya. Mungkin ada baiknya untuk memberi beberapa contoh kon_{kri}g-calok-calok tersebut.

Alat atau wakil.

Palang misalnya muncul dalam hubungan pajak atau tuntutan kerja rodi. Bila seorang bupati merasa bahwa sekelompok desa kurang dapat memenuhi kebutuhan pajak dan tenaga kerja maka salah seorang dari mereka dijadikan orang kepercayaan yakni palang. Palang itu mendapat kepercayaan khusus karena masih berhubungan darah dengan bupati, orang kuat setempat atau karena hal-hal lain. Palang dapat menghubungi para pembayar pajak dan tenaga rodi dari desa-desa tersebut dengan ancaman bahwa kalau dia tidak diserahkan kepercayaan penuh untuk berunding dengan bupati maka pajak dan rodi akan meningkat. Dengan ancaman bahwa beban lebih besar akan menimpah desa-desa maka fungsi

penghubung diberikan pada palang oleh para lurah. Para lurah percaya bahwa karena hubungan dekatnya dengan atasan mereka akan mendapat kondisi-kondisi perpajakan yang terbaik. Yang menonjol dari ini adalah bahwa para palang harus membuktikan bahwa mereka adalah efisien dalam pengumpulan pajak dan lain-lain. Sedangkan bagi rakyat yang penting itu adalah bahwa palang dipercayai oleh atasan. Dilihat dari sudut petani didesa adalah bahwa mereka akan bisa selamat terhadap beban lebih besar atau malapetaka lain. Namun sering juga bahwa palang bukan memaknai unsur memperoleh kepercayaan dari bawah akan tetapi taktik-taktik kekerasan artinya berfungsi sebagai tukang pukul dari atasan.

Sebenarnya untuk terlalu menekankan pada sifat jago yang kebal dari si-palang kami melupakan suatu aspek lain yang penting dari kedudukan palang. Dalam memperoleh kepercayaan dari penduduk desa-desa atau dari para lurah beberapa desa untuk menjadi penghubung dengan bupati maka palang juga berfungsi sebagai patron (bapak) dan memberikan pada berbagai orang atau lurah pribadi janji-janji keringanan dari beban yang diinginkan bupati. Artinya kedudukan palang tidak lepas dari suatu kedudukan politik dan seorang palang sering merupakan titik dari aliansi-aliansi didesa-desa di Jawa.

Contoh konkrit yang lain bagaimana para jago desa ini berfungsi diberikan oleh laporan pemilihan lurah pada akhir abad ke-19. Para calon lurah saling berlomba untuk berjanji akan dapat mengumpulkan pajak dan tenaga bakti serta tentu saja perbaikan-perbaikan intern desa yang mungkin merupakan beban lagi bagi penduduk. Rupanya lalu calon yang paling sanggup mengumpulkan pajak yang paling besar itulah yang dipilih. Sangat menarik sekali adalah bahwa dalam babad-babad daerah sering diceritakan bahwa bupati baru (biasanya yang pertama dalam pemerintahan kolonial) adalah memang orang yang dapat menjanjikan yang banyak pada penguasa baru. Pada hal babad tersebut ditulis oleh pengagum dari

bupati tersebut dan adalah seorang penulis babad keluarga bupati.

Umpamanya babad Pacitan yang ditulis dalam tahun 1924 memberikan contoh tersebut.¹⁶⁾ Disana ketika Belanda datang untuk pertama kali di Pacitan (1830) dengan rencana-rencana tanam kopi secara paksa maka dipanggillah suatu pertemuan dengan semua pejabat Jawa dan Pacitan. Sang bupati pada waktu itu hanya dapat menjanjikan bahwa setiap regu yang terdiri dari jumlah petani tertentu hanya dapat menanam 25 pohon kopi dan memeliharanya. Lalu muncul seorang demang yang menjanjikan pada Belanda bahwa ia sanggup menyuruh regu yang sama untuk menanam dan memelihara 100 pohon kopi bahkan lebih. Dengan demikian Belanda mengangkat bupati kolonial pertama di Pacitan dan demang tersebut, menggantikan bupati lama. Bupati baru itu adalah nenek moyang penulis babad Pacitan. Disini kita melihat lagi bagaimana suatu prinsip dipercaya oleh atasan berfungsi pada para jago atau penghubung kekuasaan tersebut.

Konklusi:

Kita memulai tulisan ini dengan mengajukan dua teori yang satu dari J.C. Scott dan yang lain dari S. L. Popkin. Apakah desa itu sesuatu lembaga tersendiri yang otonom, yang tertutup dahulu kala seperti dalam gambaran Scott atau desa selalu dibawah pengaruh perkembangan negara ? Persoalan ini akan memiliki dampak bagi masalah stratifikasi dan kepemimpinan didesa. Dasar dasar kepemimpinan didesa pada zaman pra-kolonial adalah jumlah tenaga yang dikuasai, kekayaan baik berupa tanah maupun harta dan disamping itu charisme merupakan unsur penting. Mengingat ini rupanya kita harus melihat desa tidak sebagai satu kesatuan akan tetapi masyarakat desa kita harus membagi lebih lanjut dalam golongan-golongan. Terhadap dunia luar (penguasa) maka kelihatan kesatuan-kesatuan golongan ini memiliki jago yang menghubungi penguasa. Namun bagaimana sebenarnya jago-jago saling menghubungi kelompok-kelompok dalam desa sendiri atau bagaimana sistim hubungan

interen sendiri beroperasi kita hampir tidak tahu apa-apa. Sebab dari ini adalah terlalu banyaknya studi. adalah mengambil asumsi bahwa desa merupakan satu kesatuan.

Dilain pihak dari bahan-bahan desa dalam zaman kolonial ada cukup banyak indikasi bahwa desa memang memiliki cara-cara sendiri untuk menghadapi dunia luar. Biarpun pemerintah Hindia Belanda telah menyusun suatu hierarchi pemerintahan yang rapih berdasarkan wilayah dan fungsi namun dari bawah pribadi (charisma) memainkan peranan besar. Adanya jago yang berfungsi dalam - peer group (kelompok setingkat) menunjukkan semacam adanya otonomi. Akan tetapi mereka yang menihak pada teori Popkin akan mengatakan bahwa para jago ini hanya pelengkap dalam pemerintah negara. Akan tetapi disekitar jago ini juga timbul pembrontakan-pembrontakan pada saat-saat tertentu dan jago memberi juga alternatif kepemimpinan bagi para petani.

--oo0oo--

Catatan Kaki.

- 1). James C. Scott, The Moral Economy, of the Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, Yale Univ. Press, New Haven dan London, 1976. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia : Moral Ekonomi Petani. Perlawanan dan Subsistensi di Asia Tenggara, I. P. 3 ES, 1981.
- 2). Samuel L. Poplin, The Rural Peasant. The Political Economy of Rural Society in Vietnam, Univ. of California Press, Berkeley, 1979.
- 3). J. H. Boeke, De Economie van Indonesie, Tjeenk Willink, Haarlem, 1951, 3de druk.
- 4). J.C. van Deur, Indonesian Trade and Society, The Hague, 1955. B. J. O. Schrieke, Indonesian Sociological Studies, The Hague 1955 dan 1957.
- 5). Soemarsaid Moertono, State and Statecraft in Old Java, Modern Indonesia Project, Ithaca, 1981 (revised ed). hal. 95 - 96.
- 6). M. C. Ricklefs, Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749-1792, Oxford Univ. Press, 1974, hal. 422 - 423 (catatan kaki).
- 7). P.B.R. Carey, Babad Dipanegara, KITLV, 1981.
- 8). Purwowijoyo, Babad Ponorogo, (3 jilid) C.V. Nirbata, Ponorogo, 1979.
- 9). J.B.M. Lyon, "Over waroks en gemblaks van Ponorogo", Koloniaal Tijdschrift, Vol. XXX, (1941) pp. 740 - 761.
- 10). H. J. Benda, "The Pattern of administrative reforms in the closing years of years of Dutch rule in Indonesia", Journal of Asian Studies, Vol. 25 (4), 1966, pp. 589 - 605.

- 11). Onghokham, The Residency of Madiun, Priyayi and Peasant during the Nineteenth Century, Yale Univ. Ph. D. diss. 1975.
- 12). H. Sutherland, The Making of a Bureaucratic Elite, ASAA, 1979
- 13). J. H. Boeke,
- 14). Onghokham, "The Insuperable and the Paranoid", in Southeast Asian Transition, R. McVey (ed.), Yale Univ. Press, 1978
- 15). M. G. Schulte Nordholt. Ojo Dimeh, Opbouw in Opdracht of Ontwikkeling in Overleg, Sheldruk Boulevard, Enschede, 1981, diss, 1981 (Vrije Universiteit van Amsterdam).
- 16). Babade Negara Patjitan, LOR. 8991, Naskah Leiden Univ. Oriental Library, Patjitan, Gandaatmaja, 1924.

Per
Je